i



i

# Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

**KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ANAK DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA: PERAN NEGARA, AGAMA DAN RELASI KUASA**



Peneliti:

Ketua : Anthin Lathifah

NIP 197511072001122002

Anggota : Briliyan Ernawati NIP 196312191999032001

Anggota : Kiki Rahmawati NIM 1902056040

Anggota : Ike Maya Sari NIM 1902056088

# PENELITIAN DIBIAYAI DARI ANGGARAN DIPA UIN WALISONGO SEMARANG

**TAHUN 2022**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena rahmat hidayah dan inayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Salawat serta salam senantiasa dihaturkan untuk habibana wa Nabiyyana Muhammad SAW.

Penelitian dengan judul “**Konstruksi Hukum Perkawinan Anak dan Implikasinya di Indonesia: Peran Negara, Agama dan Relasi Kuasa”** penting dilakukan karena tidak hanya mendeskripsikan problem perkawinan anak di Indonesia dalam tataran legal formal tetapi juga dalam tataran relaitas sosial, terutama di daerah Jawa Barat dan Jawa tengah yang menempati posisi kedua dan kesembilan tertinggi angka perkawinan anak di Indonesia sebagai lokasi penelitian. Kondisi tersebut berimplikasi pada bangunan hukum yang ada baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum yang seolah melanggengkan tingginya angka perkawinan anak. Oleh karenanya penting merekonstruksi bangunan hukum terkait umur perkawinan di Indonesia baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Penelitian ini dapat diselesaikan karena bantuan dari bebagai Pihak di antaranya Jajaran Rektorat, LP2M, Reviewer dan team peneliti. Untuk itu ucapan terima kasih tak terhingga ditujukan kepada Rektor UIN Walisongo Bapak Prof Dr, H, Imam Taufiq M.Ag dan semua jajarannya, Ketua LP2M Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, Reviewer Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag serta rekan-rekan peneliti Ibu Hj Briliyan Ernawati, SH., MH, Kiki Rahmawati dan Ike Maya Sari. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan balasan yang sebaik-baiknya, Jazakumullah ahsanal Jaza.

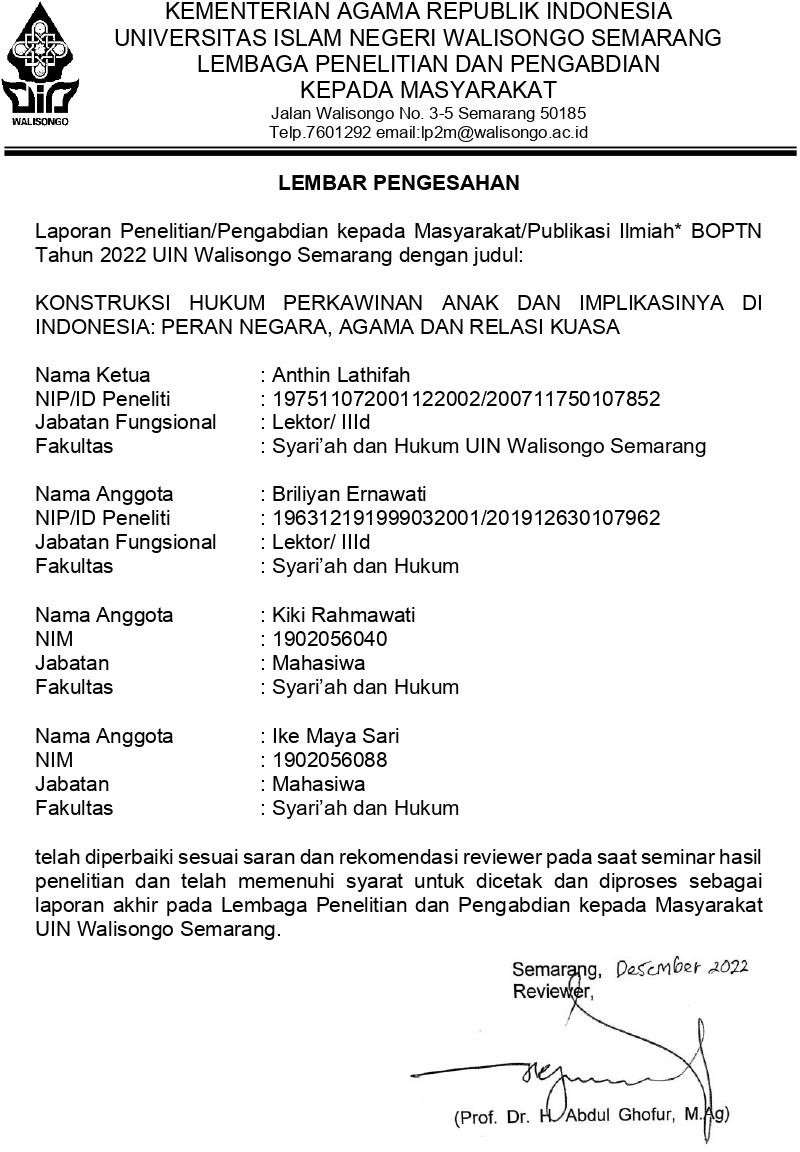
Demikian, semoga hasil penelitian ini memberi manfaat untuk keilmuan dan menjadi amal soleh bagi peneliti dan pembaca sekalian. Amin

Ketua Peneliti

Anthin Lathifah

# SURAT PERNYATAAN

# LEMBAR PERNYATAAN



# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR ii](#_bookmark0)

[SURAT PERNYATAAN iv](#_bookmark1)

[LEMBAR PERNYATAAN v](#_bookmark2)

[ABSTRAK 1](#_bookmark3)

[BAB I 1](#_bookmark4)

[PENDAHULUAN 1](#_bookmark5)

1. [Latar Belakang 1](#_bookmark6)
2. [Batasan dan Rumusan Masalah 9](#_bookmark7)
3. [Tujuan dan Signifikansi Penelitian 10](#_bookmark8)
4. [Kajian Terdahulu 11](#_bookmark9)
5. [Kerangka Konseptual 13](#_bookmark10)
6. [Metode Penelitian 18](#_bookmark11)

[BAB II 25](#_bookmark12)

[PERKAWINAN ANAK, RELASI KUASA DAN SISTEM](#_bookmark13) [PEMBANGUNAN HUKUM 25](#_bookmark13)

1. [Perkawinan Anak 25](#_bookmark14)
2. [Relasi Kuasa dan Pembangunan Hukum 55](#_bookmark15)

[BAB III 60](#_bookmark16)

[KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ANAK DI](#_bookmark17) [INDONESIA (KASUS DI (JAWA TENGAH DAN JAWA](#_bookmark17) [BARAT) 60](#_bookmark17)

1. [Jawa Tengah 61](#_bookmark18)
2. [Perkawinan anak di Jawa Barat (Kabupaten Indramayu) 107](#_bookmark19)

[BAB IV 142](#_bookmark20)

[REKONSRUKSI HUKUM PERKAWINAN ANAK DI](#_bookmark21) [INDONESIA 142](#_bookmark21)

1. [Perkawinan Anak: Antara Peran Negara, Konstruksi](#_bookmark22) [Pemahaman Agama dan Relasi Kuasa 142](#_bookmark22)
2. [Implikasi Hukum 160](#_bookmark23)
3. [Rekonstruksi Sistem Hukum Perkawinan Anak 165](#_bookmark24)

[BAB V 148](#_bookmark25)

[PENUTUP 148](#_bookmark26)

1. [Kesimpulan 148](#_bookmark27)
2. [Saran 150](#_bookmark28)

[DAFTAR PUSTAKA 153](#_bookmark29)

[LAMPIRAN-LAMPIRAN 161](#_bookmark30)

# ABSTRAK

Angka perkawinan anak di Indonesia meningkat pasca perubahan umur perkawinan bagi calon mempelai perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2019, yang bersamaan dengan munculnya Pandemi Covid-19, terutama di Jawa Barat yang menepati posisi kedua dan Jawa Tengah yang menempati posisi kesembilan tertinggi di Indonesia. Oleh karenanya penting mengetahui peran Negara, pemahaman agama dan relasi kuasa berpengaruh terhadap konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia pasca peningkatan umur tersebut. Bagaimana implikasi hukumnya dan bagaimana rekonstruksi sistem hukum perkawinan anak di Indonesia yang ditawarkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun data didapatkan dari hasil wawancara dengan key informan dan dokumen data terkait perkawinan anak yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosio-legal.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Negara berperan dalam menentukan peningkatan angka perkawinan anak, demikian pula pemahaman agama dan relasi kuasa. Kondisi tersebut menandakan belum maksimalnya kinerja sistem hukum baik substansi, struktur maupun budaya hukum. Hal tersebut berimplikasi pada tidak efektifnya system hukum baik substansi hukum, struktur hukum dan terutama budaya hukum masyarakat. Oleh karenanya untuk mengefektifkan sistem hukum tersebut, maka sangat penting dilakukan upaya rekonstruksi sistem hukum. Adapun rekonstruksi hukum umur perkawinan dilakukan dengan tiga cara: pertama, merekonstruksi substansi hukum dengan melakukan perbaikan ketentuan hukum dikabulkannya syarat dispensasi perkawinan, menegakkan pidana terhadap pelaku pelanggaran perkawinan anak dan membuat aturan turunan untuk meminimalisir

perkawinan anak; kedua, kinerja struktur hukum harus mendukung upaya minimalisir angka perkawinan anak; dan ketiga, meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat untuk menikah pada usia dewasa.

# BAB I PENDAHULUAN

# Latar Belakang

Perkawinan anak atau sering disebut perkawinan dini atau perkawinan bawah umur, masih menjadi masalah besar di Indonesia, bahkan secara kuantitatif terjadi peningkatan di beberapa wilayah pada masa pandemi covid sejak tahun 2020 hingga 2021. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan anak memiliki permasalahan baik dari sisi filosofis, juridis dan terutama sosiologis baik disebabkan pemahaman hukum, prilaku hukum maupun budaya hukum masyarakat.

Berdasarkan data lokadata,id, sebenarnya terjadi penurunan jumlah perkawinan anak dari tahun ke tahun. Lokadata mencatat pada tahun 2017, pelaku usia perkawinan bawah umur sejumlah 2,66 persen atau sekitar 700 ribu kasus, Pada tahun 2019, seiring dengan dikeluarkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan umur perempuan dari 16 menjadi 19 tahun usia perkawinan bagi perempuan, terdapat 2,52 persen anak usia di bawah 16 tahun menikah. Sehingga secara kuantitatif pada tahun 2019, terjadi penurunan anak usia di bawah umur menjadi 661 ribu kasus. Begitu pula pada Bulan Maret 2020, angka usia perkawinan di bawah 16 tahun sejumlah 2.16 persen atau sekitar 561 ribu kasus.

Demikian pula penurunan terjadi pada jumlah perkawinan usia 16-18 tahun yang pada tahun 2017 jumlahnya sekitar 5,5 juta atau sekitar 20,89 persen, menurun menjadi 20,55 persen atau sekitar 5,3 juta anak pada tahun 2019. Bahkan berdasarkan hasil survei pada

bulan Maret 2020, angka perkawinan usia 16-18 tahun juga menurun menjadi 19,68 persen atau sekitar 5.1 juta anak.1

Walaupun secara nasional angka perkawinan anak mengalami penurunan, namun di empat provinsi terjadi kenaikan terutama yang terjadi di empat provinsi, yakni Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2 persen, Kalimantan Tengah sekitar 20,2 persen, Sulawesi Tengah 16,3 persen dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1 persen. Bahkan Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur sebagaimana Data Pusat Statistik Nasional merupakan daerah dengan prevalensi perkawinan anak paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.2 Kondisi demikian menjadikan Indonesia menempati posisi kedua terbanyak kasus perkawinan anak di ASEAN.3 Adapun 10 daerah dengan perkawinan anak tertinggi menurut Badan Pusat Statistik secara berurutan terjadi di Kalimantan Selatan sebanyak 12,52 persen, selanjutnya Jawa Barat sebanyak 11,48 persen, Jawa Timur 10,85 persen, Sulawesi Barat 10,05, Kalimantan Tengah sebanyak 9,85, Banten 9,11, Bengkulu 8,81, Jawa Tengah 8,71 dan Jambi 8,56. 4

Menurut Sri Mulyati, direktur eksekutif Yayasan Sapa, pada tanggal 6 Mei 2021,5 perkawinan anak semakin marak terjadi di lapangan. Kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi apalagi di masa pandami, dimana anak-anak

1 *Perkawinan-Usia-Dini-Masih-Tinggi @ Lokadata.Id*, n.d.

2 Nur Sahrizal et.al., *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta, 2020).

3 [https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-](https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all) [2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all)

4 badan Pusat Statistik, “10 Provinsi Dengan Perkawinan Wanita Di Usia 7-

15 Tahun Tertinggi (2020),” 2021, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan- pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020.

5 *Perkawinan-Usia-Dini-Masih-Tinggi @ Lokadata.Id*.

sekolah banyak yang di rumah melakukan aktifikatas lebih santai dan berbasis IT, anak semakin dibuai oleh tontonan yang tidak hanya pelajaran sekolah.

Argumentasi meningkatnya perkawinan anak juga diperkuat oleh banyaknya kasus permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Menurut data Badan Peradilan Agama, kasus permohonan dispensasi perkawinan6 pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019. Pada tahun 2020 tercatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan, meningkat dari tahun 2019 sebanyak 23,1 ribu. Artinya angka dispensasi perkawinan pada tahun 2020 meningkat tiga kali lipat atau sekitar 177,7 persen dari tahun 2019.7

Peningkatan jumlah perkawinan anak tersebut diasumsikan terjadi karena beberapa hal yakni pemahaman dan prilaku agama masyarakat, kurang efektifnya peran negara dalam membudayakan hukum perkawinan usia dewasa, serta kekuasaan patriarkhi dalam keluarga dan masyarakat.

Secara normatif, agama atau dalam hal ini islam, tidak menentukan batasan umur perkawinan, tetapi islam menentukan kedewasaan secara fisik dan mental dijadikan dasar usia kematangan menikah. Namun tidak jarang pelaku hukum merujuk pada praktek perkawinan Nabi Muhammad

6 Dispensasi perkawinan adalah permohonan perkawinan bagi anak yang usianya dibawah usia 19 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Hal ini karena berdasarkan undang-undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat dialksanaka terhadap laki-laki dan perempuan yang sudah berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun juga bagi perempuan.

7 Dwi Hadya Jayani, *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat Pada 2020*, 2020, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi- perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020. [Dispensasi Perkawinan](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020) [Anak Meningkat 3 Kali Lipat pada 2020 | Databoks (katadata.co.id).](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020)

dengan Aisyah,8 tanpa melihat konteks yang berbeda antara praktek Nabi dan konteks sekarang di Indonesia, serta tanpa mempertimbangkan beberapa riwayat tentang umur Aisyah saat menikah dengan Nabi yang terjadi perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya.

Parahnya, alasan normatif tersebut dijadikan acuan oleh sebagian orang tua yang hendak menikahkan anaknya dalam usia bawah umur. Bahkan dalam tataran implementasinya, tidak jarang dasar hukum tersebut dijadikan sebagai dasar politis dibolehkannya perkawinan anak yang dilakukan berdasarkan relasi kuasa atau patriarkhi. Hal ini seperti yang terjadi pada bulan oktober 2021. Seorang Ketua MUI Buru Selatan, Maluku, Ambon, Intan Karate telah menikahkan anaknya yang berusia di bawah umur, yakni anak perempuannya yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berusia

15 tahun dengan seorang Ustadz yang berasal dari Tangerang Banten, walaupun akhirnya dibatalkan.9

Kasus lain pada tahun 2008, Syekh Puji pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, yang berusia 43 tahun, menikahi Luthfiana Ulfa yang ketika itu berumur 12 tahun.10 Atau bahkan kekuasaan laki-laki memperdaya korban perempuan dengan dalih agama untuk kepentingan nafsunya terjadi pada kasus Hery Wirawan pimpinan

8 Yusuf Hanafi, “Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra. Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam,” *Istinbáth* Vol. 15, N, no. Desember (2016).

9 [Ketua MUI Buru Selatan Nikahkan Anaknya yang Masih SMP dengan](https://regional.kompas.com/read/2021/10/10/082655078/ketua-mui-buru-selatan-nikahkan-anaknya-yang-masih-smp-dengan-tokoh-agama?page=all) [Tokoh Agama, Sebut Dapat Petunjuk dari Mimpi Halaman all - Kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2021/10/10/082655078/ketua-mui-buru-selatan-nikahkan-anaknya-yang-masih-smp-dengan-tokoh-agama?page=all) diakses tanggal 10 Desember 2021.

10 [Kisah Lutfiana Ulfa, Remaja yang Rela Jadi istri Kedua Syekh Puji di Usia](https://www.insertlive.com/hot-gossip/20210730124442-7-229511/kisah-lutfiana-ulfa-remaja-yang-rela-jadi-istri-kedua-syekh-puji-di-usia-12-tahun) [12 Tahun (insertlive.com)](https://www.insertlive.com/hot-gossip/20210730124442-7-229511/kisah-lutfiana-ulfa-remaja-yang-rela-jadi-istri-kedua-syekh-puji-di-usia-12-tahun) diakses tanggal 10 Desember 2021

pondok pesantren di daerah Bandung yang mencabuli para korban yang jumlahnya sekitar 21 santrinya.11

Selain pemahaman agama dan relasi kuasa terutama kuasa patriarkhi, perkawinan anak juga terjadi karena budaya hukum masyarakat dan prilaku remaja yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, sehingga dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan paling banyak disebabkan karena perempuannya sudah hamil terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana penjelasan Hakim Yustisial Mahkamah Agung Mardi Candra, bahwa hamil di luar nikah kerap menjadi alasan terbanyak untuk mendesak hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bawah umur.12

Dari beberapa kasus tersebut, diasumsikan bahwa perkawinan anak terjadi karena ada problem antara peran Negara, pemahaman dan prilaku agama serta adanya relasi kuasa dalam budaya patriarkhi yakni kekuasaan laki-laki (ayah) terhadap anak-anak perempuannya, atau seseorang yang memiliki kekuasaan lebih mensubordinasi pihak yang lemah seperti halnya anak tidak memiliki kekuasaan untuk memilih keputusan terbaik bagi dirinya sendiri, sehingga ia terpaksa menerima keputusan orang tuanya.

Di sisi lain, menurut Djamilah dan Reni Kartikawati, sebenarnya perkawinan bawah umur disebabkan oleh kurangpahamnya pemahaman para remaja terhadap pendidikan kesehatan reproduksi, sehingga menimbulkan dampak terhadap ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan.13 Demikian pula Ahsanul Halik menjelaskan terdapat faktor

11 [Pengakuan Herry Wirawan Pelaku Pemerkosaan 12 Satriwati di Bandung](https://www.kompas.tv/article/241551/pengakuan-herry-wirawan-pelaku-pemerkosaan-12-satriwati-di-bandung) [(kompas.tv)](https://www.kompas.tv/article/241551/pengakuan-herry-wirawan-pelaku-pemerkosaan-12-satriwati-di-bandung) diakses tanggal 19 Desember 2021

12 [Hamil di Luar Nikah Sering Jadi Alasan Untuk Dispensasi Perkawinan](https://www.suara.com/lifestyle/2021/02/15/165000/hamil-di-luar-nikah-sering-jadi-alasan-untuk-dispensasi-perkawinan-anak) [Anak (suara.com)](https://www.suara.com/lifestyle/2021/02/15/165000/hamil-di-luar-nikah-sering-jadi-alasan-untuk-dispensasi-perkawinan-anak) diakses tanggal 10 Desember 2021

13 Djamilah and Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,”

*JURNAL STUDI PEMUDA* Vol. 3, no. No. 1 (2014).

internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman pelaku pernikahan bawah umur dan kondisi lingkungan keluarga di mana pelaku pernikahan bawah umur tinggal. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor agama, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun dampaknya meliputi aspek agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan kehidupan dalam rumah tangga.14 Sonny Dewi Judiasih menjelaskan adanya kontradiksi antara tujuan meminimalisir perkawinan anak dengan adanya dispensasi perkawinan yang semakin marak dilakukan.15 Ishita Pande menggambarkan ada permasalahan terkait antara sex, hukum dan politik dalam perkawinan anak yang terjadi di India.16 Mary juga menjelaskan bahwa perkawinan anak di India merupakan permasalahan kompleks terkait dengan permasalahan sosial dan feminist.17

Sebenarnya secara normatif, Negara telah melakukan upaya-upaya hukum dengan melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait umur perkawinan dari 16 tahun bagi calon mempelai perempuan menjadi 19 tahun, namun demikian nampaknya perlu meningkatkan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk meminimalisir problem tersebut

14 H. Ahsanul Halik, “PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram,” *Schemata Volume 6or 2, Desember 2017* 6, no. 2 (2017).

15 SD. Judiasih, Bambang Daru Nugroho Susilowati S. Dajaan, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawindengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–222.

16 Ishita Pande, *Sex, Law, and the Politics of Age*, *Sex, Law, and the Politics of Age* (Cambrigde: Cambridge University Press, 2020).

17 Mary E. John, *Child Marriage in An International Frame* (New York: Routledge, 2021).

Dengan latar belakang tersebut, maraknya perkawinan anak dapat diasumsikan disebabkan oleh tiga hal penting yaitu: *Pertama*, peran negara dalam menentukan regulasi terkait perkawinan anak baik dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan yang membuka peluang banyaknya perkawinan anak seperti ketentuan dispensasi kawin dan itsbat nikah, serta belum efektifnya regulasi terkait dan kebijakan pelaksanaannya di lapangan; Kedua, peran agama baik pengaruh pemahaman terhadap agama yang terkait umur perkawinan ataupun kurangnya prilaku yang mengedepankan nilai-nilai agama secara kontekstual terkait umur perkawinan; Ketiga, adanya relasi kuasa yang dilakukan baik oleh orang tua ataupun kekuasaan patriarkhi atas anak-anak perempuan. Penyebab tersebut nampaknya mengakibatkan tidak efektifnya undang-undang perkawinan, meningkatnya angka perkawinan anak di beberapa daerah sebagaimana yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa barat dan Jawa Timur serta maraknya permohonan dispensasi perkawinan.

Perkawinan anak di Jawa tengah menempati peringkat sembilan secara nasional terjadi selama covid adalah di tahun 2021. Menurut data tercatat bahwa tahun 2019 tercatat angka perkawinan anak berjumlah 2.049 kasus, namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 12.972 kasus atau 630 persen.18 Adapun angka kenaikan tertinggi perkawinan anak pada tahun 2020 terjadi di Kabupaten Brebes dengan jumlah 769 perempuan dan 511, Kabupaten Pemalang dengan jumlah 293 perempuan dan 189 laki-laki, selanjutnya

18 Cecep Burdansyah, “Kasus Pernikahan Anak Di Jateng Melonjak 630 Persen,” *Https://Www.Tribunnews.Com/Regional/2021/06/15/*, 2021, https[://www.](http://www.tribunnews.com/regional/2021/06/15/kasus-pernikahan-anak-)tr[ib](http://www.tribunnews.com/regional/2021/06/15/kasus-pernikahan-anak-)u[nnews.com/regional/2021/06/15/kasus-pernikahan-anak-](http://www.tribunnews.com/regional/2021/06/15/kasus-pernikahan-anak-) di-jateng-melonjak-630-persen.

menempati urutan ketiga adalah kabupaten Banjarnegara dengan jumlah 528 perempuan dan 161 laki-laki. Urutan keempat Banyumas dengan jumlah 360 perempuan dan 194 laki-laki, dan menempati urutan kelima Kabupaten cilacap dengan jumlah 168 perempuan dan 144 laki-laki, sedangkan kota semarang cukup rendah dengan jumlah 93 perempuan dan 59 laki-laki. 19

Di Jawa Barat perkawinan anak juga tertinggi kedua secara Nasional dengan jumlah 21.499 pada tahun 2019 dan menurun menjadi 9821 kasus pada tahun 2020.20 Adapun kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Selatan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur. Namun dalam penelitian ini data penelitian difokuskan pada kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Indramayu dengan pertimbangan tingginya kasus perkawinan dini dan juga perceraian dini yang terjadi di sana.

Dengan alasan-alasan tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan, terutama di Jawa Barat dengan alasan daerah tertinggi kedua di Indonesia terutama di daerah Kabupaten Indramayu dengan keunikan tidak saja perkawinan anak yang terjadi di sana, tetapi juga perceraian anak. Adapun di wilayah Jawa Tengah diwakili oleh wilayah kabupaten Brebes sebagai daerah tertinggi pertama angka perkawinan anak di Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap sebagai daerah tertinggi keempat banyaknya perkawinan anak di jawa Tengah dan Kota Semarang sebagai masyarakat kota yang juga cukup tinggi angka perkawinan anaknya.

19 Data perkawinan anak tahun 2020 dari Kementerian Agama Jawa Tengah

20 Azzis Zulkhairil, “Selama 2020 Ada 9.821 Perkawinan Anak Di Jawa Barat,” *Jabar.Idntimes.Com*, n.d., https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis-zilkhairil/selama-2020-ada- 9821-perkawinan-anak-di-jawa-barat.

Penelitian ini penting untuk merumuskan langkah- langkah strategis dan sistematis yang harus dilakukan Negara dan masyarakat sehingga Negara memiliki peran tidak hanya pada pembentukan hukum, tetapi sosialisasi hukum bahkan menciptakan budaya hukum agar perkawinan anak semakin berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi. Oleh karenanya penelitian ini menawarkan bangunan hukum baru perkawinan usia dewasa yang diawali oleh pemahaman konsekstual tentang usia perkawinan anak dalam konteks tujuan perkawinan. hingga pembangunan budaya perkawinan usia dewasa yang harus diinisiasi oleh Negara dengan mempertimbangkan nilai- nilai agama humanis sehingga perkawinan anak dan segala problem yang ditimbulkannya semakim minim atau bahkan tidak terjadi lagi di lapangan.

# Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada tiga permasalahan. Pembatasan pertama, terkait peran negara dalam meminimalisir perkawinan anak yang terdapat dalam regulasi ataupun tindakan-tindakan preventif lainnya. Kedua, perkawinan anak dilihat dari perspektif agama dan relasi kekuasaan bawah umur di Indonesia dilihat dari perspektif politik hukum dan agama.

Dari pembatasan tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Negara, pemahaman agama dan relasi kuasa berpengaruh terhadap konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah
2. Bagaimana implikasi hukum yang terjadi atas kasus perkawinan anak di Jawa tengah dan Jawa Barat?
3. Bagaimana rekonstruksi sistem hukum perkawinan anak di Indonesia

# Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

* 1. Untuk mendeskripsikan peran Negara, pemahaman agama serta relasi kuasa dalam konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia khusunya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
  2. Untuk mengetahui implikasi hukum atas kasus perkawinan anak di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
  3. Untuk merekonstruksi sistem hukum perkawinan anak di Indonesia.

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini akan menambah khazanah keilmuan khususnya diskursus hukum perkawinan anak di Indonesia baik dalam perspektif hukum Islam Islam peran negara dan budaya patriarkhi dalam konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia.
2. Secara Praksis, hasil penelitian ini mempetakan perkawianan bawah umur di Indonesia yang dikonstruksikan dalam peran negara, agama dan relasi kuasa. Selain itu penelitian ini menawarkan solusi atas permasalahan yang ditimbulkan dari ketentuan hukum perkawinan bawah umur yang berlaku di Indonesia, yakni peran pemerintah dalam menciptakan peraturan, mensosialisasikan dan membudayakan perkawinan usia dewasa, penegak hukum dan masyarakat sebagai pelaksana hukum dan pembentuk budaya hukum.

# Kajian Terdahulu

Kajian terkait perkawinan bawah umur telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, Di antara penelitian dan kajian yang menjelaskan konsep perkawinan bawah umur diantaranya Penelitian Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN Bappenas tentang Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa ditunda, (2020), Mary E. John (2021), Ishita Pande (2020), Djamilah dan Reni Kartikawati (2014), Ahsanul Halik (2017), Sonny Dewi Judiasih dkk (2020).

Penelitian Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Unicef dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bekerjasama menerbitkan hasil kajian tentang “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa ditunda” pada tahun 2020. Kajian ini menyajikan data tentang prevalensi perkawinan anak dan dampaknya terhadap anak laki-aki dan perempuan terutama terhadap Pendidikan mereka.

Marry E. John (2021) menjelaskan bahwa perkawinan anak di India merupakan permasalahan kompleks terkait dengan permasalahan sosial dan feminist.21 Ishita Pande (2020) dalam kajiannya “Sex, Law and The Politic of Age” mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan perkawinan anak yang terjadi di India. Menurutnya Perkawinan anak yang terjadi di India terkait antara sex, hukum dan politik dalam perkawinan anak yang terjadi di India. Perkawinan anak menciptakan korban anak-anak tetapi secara struktural yangn bersifat hirarkis dan modern, walaupun pada tahun 2020 perkawinan anak menurun.22

21 John, *Child Marriage in An International Frame*.

22 Pande, *Sex, Law, Polit. Age*.

Ahsanul Halik (2017) dalam artikelnya “Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram” menjelaskan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman pelaku pernikahan bawah umur dan kondisi lingkungan keluarga di mana pelaku pernikahan bawah umur tinggal. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor agama, ekonomi, sosial dan budaya. Adapun dampaknya meliputi aspek agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan kehidupan dalam rumah tangga.23

Sonny Dewi Judiasih dkk (2020) dalam artikelnya “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir perkawinan Bawar Umur di Indonesia” menjelaskan adanya kontradiksi antara tujuan meminimalisir perkawinan anak dengan adanya dispensasi perkawinan yang semakin marak dilakukan.24

Djamilah dan Reni (2014) dalam artikelnya “Dampak perkawinan anak di Indonesia” menjelaskan dampak perkawinan anak terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya di delapan kota di Indonesia yakni DKI Jakarta, Banyuwangi, Semarang, Bandar Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sukabumi, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengetahuan tentang Pendidikan Kesehatan reproduksi merupakan hal paling dominan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak.25

Dari beberapa penelitian tersebut, tulisan ini berbeda karena akan menawarkan rekonstruksi system hukum

23 Ahsanul Halik, “Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram,” *Schemata* 6, no. 2 (2017).

24 SD.Judiasih and Susilowati S. Dajaan, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawindengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.”

25 Djamilah and Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.”

perkawinan anak di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi hukum yang ada baik peran negara, lebih spesifik peran dalam melakukan pembangunan hukum perkawinan terkait umur perkawinan baik yang terdapat dalam regulasi di Indonesia yakni UU No 16 Tahun 2019 sebagai amandemen dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta regulasi-regulasi terkait perkawinan anak yang terdapat di Indonesia khususnya di jawa Tengah dan jawa Barat.

Di samping itu perkawinan anak juga dilihat dari aspek pemahaman agama dan relasi kuasa yang terjadi dalam keluarga sehingga melahirkan praktek kekuasaan prilaku tidak taat hukum. Relasi kuasa dan pemahaman agama tersebut lebih lanjut bahkan menjadi budaya hukum, sehingga walaupun regulasi usia perkawinan sudah ideal, namun prilaku masyarakat dalam perkawinan anak lebih dominan.

# Kerangka Konseptual

1. **Perkawinan Anak**

Perkawinan anak atau perkawinan usia dini seringkali disebut dengan perkawinan bawah umur. Perkawinan bawah umur difahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang berumur kurang dari ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diamandemen yakni UU Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan dalam pasal 7 bahwa umur pempelai laki-laki dan perempuan sama-sama harus berumur 19 tahun. Dengan demikian perkawinan anak setelah tahun 2019 september dimana UU No 16 Tahun 2019 disahkan adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berumur

kurang dari 19 tahun baik mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan.

Regulasi di Indonesia mengatur beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua atau pasangan yang akan menikah ketika umur calon mempelai kurang dari batasan umur terrendah (19 tahun) tersebut; pertama, mengajukan dispensasi perkawinan. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 ayat (2), (3) dan

(4) “. Selain itu dalam aturan pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang bertujuan untuk: 1) menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan dan harkat dan martabat manusia,asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2) menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;

1. meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam ranngka pencegahan perkawinan; 4) mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5) mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Adapun administrasi yang harus dipenuhi oleh orang yang mengajukan dispensasi perkawinan adalah: 1) surat permohonan; 2) fotocopi KTP kedua orang tua/wali; 3) fotokopi Kartu Keluarga; 4) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak dan/ akta Kelahiran anak; 5) Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak dan/ akta kelahiran calon suami/istri; dan 6) Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Selain permohonan dispensasi kawin, hal lain yang mungkin dilakukan oleh orang tua atau pasangan yang

umurnya kurang dari 19 tahun adalah, mereka melakukan perkawinan bawah tangan, dan mereka mengajukan isbath nikah setelah umur minimal kawin terpenuhi. Isbat nikah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari’at agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Hal ini sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.

Isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan dengan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3): “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

:

* 1. “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  2. Hilangnya Akta Nikah;
  3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
  4. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang\_undang No. 1 Tahun 1974 dan;
  5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Thaun 1974.”

Perkawinan anak atau perkawinan bawah umur atau perkawinan dini, adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang dikategorikan sebagai anak yang belum baligh secara fisik, belum siap lahir maupun batin atau belum memiliki kesiapan mental maupun materi.26

26 Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999).

# Agama

Agama terdiri dari tiga cakupan yaitu iman, islam dan ihsan.27 Paradigma pemahaman seseorang tentang agama sangat menentukan pemahaman agama apakah pemahamannya tekstual ataukah kontekstual. Pemahaman agama tekstual berbasis pada makna secara harfiyah terhadap teks-teks agama baik al-Qur’an ataupun hadits. Sedangkan pemahaman kontekstual tidak terpaku pada makna harfiyah, tetapi merujuk pada hal-hal yang melatarbelakangi turunnya teks (*asbab al-nuzul* atau *asbab al-wurud*), kondisi sosial historis dimana teks tersebut turun, seperti *syiaq al-kalam,* pembacaan sesuai dengan konteks yang mengelilingi pembaca.28

Prilaku beragama seseorang tentang hukum islam khususnya tentang perkawinan anak dan kedewasaan sebagai syarat bagi mempelai laki-laki dan perempuan juga, menunjukan bagaimana seseorang memiliki pemahaman tentang agama tekstual ataukah kontekstual.

Bagi tekstualis melihat prilaku Nabi menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun dan bersama setelah 9 tahun menjadi rujukan syarat perkawinan hanya dilihat secara fisik. Sedangkan bagi aliran kontekstualis, prilaku menikah Nabi dengan Aisyah dilihat dari sisi budaya dan politik yang menganggap umur pernikahan pada waktu itu terbiasa terjadi di Mekkah dan itu sebagai upaya perlindungan agar perempuan tidak diganggu dan diperlakukan secara baik dalam masyarakat. Dengan demikian factor kedewasaan tidak saja dilihat dari umur atau kedewasaan fisik semata,

27 Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā Bin Muḥammad Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah* (Arab Saudi: Dār Ibn ‘Affān, 1997).

28 Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, *Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Al-Qur’an Dan Hadits*, 2017, <http://repository.dharmawangsa.ac.id/486/1/Pemahaman> Tekstual dan Kontekstual.pdf.

tetapi juga kedewasaan secara mental, psikis dan terdidik untuk bertanggung jawab.29

# Relasi Kuasa

Menurut Foucoult kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Dalam bahasan lain Foucoult mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah episteme, yakni pengetahuan yang dihasilkan oleh adanya otoritatif atau pengetahuan yang dimantapkan oleh situasi tertentu pada masa tertentu. Kekuasaan sebagai episteme bersifat dinamis sanat tergantung pada relitas yang selalu berkembang30

Dalam praktek perkawinan anak, relasi kuasa adalah relasi yang dibangun atas dasar kekuasaan. Dalam masyarakat patriarkhi, relasi kuasa dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak atau orang yang berada di bawah kekuasaannya. Namun demikian karena kekuasaan sebagaimana Foucault yang bersifat dinamis, maka kekuasaan yang menghasilkan sebuah konsep perkawinan anak yang terjadi di masyarakat juga bersifat dinamis. Artinya bisa saja kekuasaan dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya untuk menikah muda, atau bisa jadi justru keeinginan anak yang lebih kuat dalam memutuskan perkawinannya. Keadaan demikian berimplikasi pada lemahnya kekuatan bargaining, bahkan hak-hak asasinya pun terkadang dicerabut oleh yang

29 Fadli Andi Natsif, “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *Al-Qadau* 5, No. 2 (2018): 182.

30 Michael Foucoult, *Discipline & Punish*, *British Journal for the Philosophy of Science*, 1995; Larossa Bilquis and Nurul Hidayat, “Kekuasaan Dan Pengetahuan: Diskursus Mitos Maskulinitas Pada Seksualitas Pemuda,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* (2020).

berkuasa. Di samping itu relasi kuasa melahirkan subordinasi terhadap yang dikuasainya.

# Metode Penelitian

* 1. **Paradigma**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari permasalahan sosial ataupun kemanusiaan.31 Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan aspek peran negara yang substansi hukum dan peran politik hukum dalam pembuatan regulasi-regulasi turunan untuk mengatur dan memberi kebijakan perkawinan anak. Peran penegakkan hukum juga dilihat dalam penegakkan hukum dan budaya hukum. Disamping peran negara, masyarakat juga turut serta dalam membangun pemahaman agama dan budaya hukum serta relasi kuasa yang menjadi faktor yang berperan dalam kostruksi perkawinan anak dalam hukum di Indonesia.

Paradigma atau konstruksi berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme,32 yakni paradigm yang sifat ontologisnya realism, yakni kerangka ontology yang tidak lepas dari pengaruh realitas, atau realitas yang dikonstruksikan oleh pemerintah, penegak hukum ataupun pelaku hukum yang terkait dengan konstruksi hukum perkawinan anak ataupun kasus-kasus perkawinan anak yang ada di masyarakat. Adapun epistemologinya bersifat subjektif yakni pemahaman yang dibangun masyarakat bersifat subjektif. Demikian halnya peneliti berdasarkan pembacaan tentang konstruksi hukum

31 John W. Creswell, *Research Desaign Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, Ed. Ke 3. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4–5.

32 Norman K. and Denzin and Yvonna S. Lincoln, *HandBook of Qualitative Research* (London: Sage Publications, 1994), 99.

perkawinan anak serta implikasinya yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh pembacaan subjektif.33

# Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal, yakni bagaimana memahami hukum tentang perkawinan anak baik dalam tataran legal formal yang ada dalam perundang-undangan dan hukum tentang perkawinan anak yang terjadi di masyarakat.34 Adapun agama, peran negara dan relasi kuasa dalam hukum perkawinan anak dideskripsikan untuk mengkonstruksi bangunan hukum perkawinan anak di Indonesia. Dalam konteks ini peran negara dikonstruksi oleh peran pemerintah, penegak hukum dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan serta pemangku kebijakan hukum lainnya yang terkait dengan perkawinan anak. Adapun pemahaman agama dikonstruksi dalam pelaksanaan hukum dan budaya hukum perkawinan anak yang terjadi di masyarakat. Sedangkan relasi kuasa dikonstruksi dalam prilaku keluarga yang melakukan perkawinan anak. Ketiganya berkonstribusi dalam membentuk konstruksi perkawinan anak di Indonesia.35

Dengan demikian pendekatan deskriptif dilakukan tidak hanya dalam mengkonstruksikan hukum perkawinan anak dalam perundang-undangan dan masyarakat, tetapi menawarkan konstruksi baru untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di masyarakat.

33 Ibid., 110.

34 Sulistyowati & Shidarta (eds) Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011).

35 Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009); Tommy Hendra Purwaka, “Beberapa Pendekatan Untuk Memahami Hukum (Several Approaches for Understanding the Law),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (November 2015): 520.

# Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, sebagaimana pendapat Abdul Kadir Muhammad36 dan Sunggono.37 yakni penelitian hukum yang fokusnya pada masyarakat dalam melaksanakan hukum perkawinan anak yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan representasi daerah yang dipilih.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada *law in book yakni perundang-undangan dann peraturan turunannya.* Disamping itu juga fokus pada *law in action* terkait kasus-kasus perkawinan anak dan kebijakan yang dilakukan untuk menanganinya, baik di Jawa Tengah maupun Jawa Barat.

# Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh.38 Oleh karena itu, sumber data yang tepat sangat penting untuk mendukung validitas suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder dan tertier. Data primer merupakan data yang terkait langsung dengan data penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara tentang perkawinan anak, yakni data primer yang didapat dari hasil wawancara kepada para informan yang dipilih (*purposive sampling*) yang terkait dengan perkawinan anak yakni aparat pemerintah yang terkait dengan perkawinan anak,

36 Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

37 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 41–42.

38 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 11th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 114.

pemahaman agama serta relasi kuasa orang-orang yang terkait dengan perkawinan anak.

Adapun data sekunder lebih difokuskan pada data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.39 data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen terkait perubahan umur perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019, peraturan turunan terkait perkawinan anak, putusan dispensasi perkawinan anak di bawah umur serta kasus-kasus perkawinan anak yang dipublish dalam media-media elektronik. Dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini difokuskan pada data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.40

Sedangkan sumber Tersier adalah sumber yang berasal dari kamus terkait perkawinan anak.

# Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan.

* + 1. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih (*purposive sampling*) sesuai dengan kebutuhan data baik dari tokoh agama, pemerintah yang terdiri dari unsur BKKBN, DPRD dan DP3AKB, hakim yang menangani permasalahan permohonan dispensasi perkawinan, pihak KUA yang menangani perkawinan, serta orang tua dan anak yang melakukan perkawinan anak.
    2. Adapun data-data kepustakaan diperoleh dari undang- undang Nomor 16 tahun 2019 jo UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, penetapan dispensasi kawin, dokumen kebijakan perkawinan anak, buku-buku,

39 M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 1st ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

40 Ibid.

artikel ilmiah, hasil penelitian dan tulisan-tulisan yang mengcover tentang perkawinan anak. Disamping itu data-data juga didapat dari beberapa Video yang terkait dengan perkawinan anak. Di samping itu data pustaka diperoleh dari dokumen putusan yang terkait dengan dispensasi perkawinan bawah umur serta kasus-kasus perkawinan bawah umur yang terjadi di masyarakat yang didokumentasikan baik dalam bentuk artikel serta hasil penelitian serta dokumen-dokumen lain terkait kasus perkawinan bawah umur yang terjadi di masyarakat. Data-data tersebut dikonstruksi dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

# Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data dan informasi terkait perkawinan anak yang telah diperoleh dicek kebenarannya, agar validitas data/keabsahan data dari penelitian terjaga, dengan demikian data yang diperoleh adalah data yang sebenarnya. Teknik yang digunakan adalah *triangulasi*. Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama. 41 Dalam penelitian ini teknik trianggulasi dimaksudkan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dengan teknik pengambilan data yang berbeda, yakni wawancara dan dokumen, agar tingkat kepercayaan data terjamin. Teknik triangulasi yang digunakan adalah metode triangulasi dengan dua cara yaitu pengecekan penemuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan tingkat validitas dari beberapa sumber data terkait perkawinan anak dengan metode yang sama.

41 Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 37.

# Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni mendeskripsikan data-data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dengan tanpa melakukan generalisasi.42

Proses analisis dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, melakukan interpretasi dan pelaporan hasil penelitian secara menyeluruh.43 Adapun kerja analisis dalam penelitian ini dilakukan dari mengumpulkan data baik yang didapat dari hasil wawancara ataupun dokumen. Selanjutnya data dibaca secara keseluruhan, dilanjutkan pemilahan data terkait peran negara, pemahaman agama dan relasi kuasan yang melahirkan konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia.

Di samping itu analisis data juga dilakukan terhadap peran negara dalam melakukan politik hukum dalam memberi kebijakan penanganan perkawinan anak tanggapan terhadap perubahan perundang-undang terkait umur perkawinan, penetapan hakim terkait dispensasi perkawinan, serta kasus-kasus perkawinan bawah umur yang terdapat di Indonesia.

Proses kerja analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode interaktif,44 dengan proses: 1) pengumpulan data; 2) pemilahan data dengan proses reduksi data berdasarkan prioritas data terpenting dan terdekat dengan permasalahan yang diteliti dan dipilah-pilah berdasarkan tingkatan data; 3) penyajian dan kategorisasi data. Dalam tahap ini peneliti melakukan proses interaksi

42 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

43 Creswell, *Research Desaign Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, 247.

44 Sanapiah Faisal, *Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*

(Jakarta: Rajawali Press, 1995), 270.

terhadap data dan teori yang digunakan, sehingga memungkinkan munculnya penafsiran berdasarkan catatan lapangan.45 Adapun kategorisasi data merupakan hasil analisis berdasarkan masalah yang diteliti; 4) Verifikasi dan Pengambilan Kesimpulan, yakni data-data yang telah disajikan dan dianalisis, diverifikasi dengan melihat keteraturan (*regularities*) data dari beberapa kasus terkait yang diteliti. Setelah selesai proses vetifikasi, akhirnya disimpulkan sehingga menunculkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan.

# Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

Bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan batasan penelitian, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan Sistematika penulisan. Bab dua, terdiri dari kerangka teori yang memuat teori tentang konsep perkawinan bawah umur, Relasi Kuasa dan Pembangunan Hukum. Teori perkawinan bawah umur terdiri dari subbab pengertian perkawinan anak, dasar hukum perkawinan anak dalam hukum Islam, perkawinan anak dalam hukum di Indonesia, perkawinan anak di beberapa negara Islam. Data tentang relasi Kuasa memuat subbab tentang konsep relasi kuasa dalam hukum dan perspektif tentang relasi kuasa. Adapun data tentang teori pembangunan hukum memuat pengertian pembangunan hukum, unsur-

unsur system pembangunan hukum.

Bab Tiga terdiri dari data tentang konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia yang meliputi subbab peran negara dalam pembangunan hukum perkawinan anak di

45 Denzin and Lincoln, *HandBook of Qualitative Research*, 501–502.

Indonesia, agama dan peran-peran relasi kuasa dalam konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia.

Bab Empat terdiri dari Rekonstruksi yang memuat tiga subbab konstruksi, implikasi dan rekonstruksi hukum perkawinan anak dalam masyarakat dan budaya hukum serta Tawaran Rekonstruksi Hukum Perkawinan Anak di Indonesia

Bab Lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran

# BAB II

# PERKAWINAN ANAK, RELASI KUASA DAN SISTEM PEMBANGUNAN HUKUM

# Perkawinan Anak

* 1. **Pengertian Perkawinan anak**

Perkawinan anak terdiri dari dua kata perkawinan dan anak. Perkawinan dalam fiqih disebut pernikahan, yang berasal dari Bahasa Arab *nikah* dan *zawaj.* Dalam Al-Qur’an, kedua kata tersebut memiliki arti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Sementara itu, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di

dalam syariat dikenal dengan akad nikah, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susunan, dan keluarga.46 Pemaknaan tersebut selaras dengan definisi pernikahan menurut sebagian ulama, makna hakikat nikah adalah persetubuhan (*al-Wat’*), sedangkan arti kiasannya adalah akad (*al-‘Aqd*).

Namun demikian, nikah jika diartikan “akad”. Akad perkawinan sebagaimana diyakini dalam mazhab Syafi’i, akan menimbulkan hukum diakuinya keabsahan perkawinan dan serta diakui tidaknya kehamilan serta kelahiran anak. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka hukum halal terdapat pada perkawinan antara ‘anak haram’ dengan ibu kandungnya, begitupun sebaliknya, pezina hukumnya halal mengawini perempuan hasil perzinahannya.47 Oleh karenanya, menurut istrilah syara’ di kalangan Fuqaha lebih popular dengan definisi akad yang pada waktu akad diucapkan menggunakan kata *nikah* atau semacamnya yang menjadikan pasangan suami-isteri diperbolehkan melakukan persetubuhan. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang paling sempurna.48

Hukum di Indonesia memiliki definisi sendiri untuk memaknai perihal pernikahan ini, masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-

46 Wahbah Al-Ẓuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al- Fikr, 2010), 43.

47 Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya Al-Ansari, *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Minhaj Al-Tullab Juz II* (Semarang: Toha Putra, n.d.), 30.

48 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, n.d.), 374.

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.49

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.50 Merujuk pada pemahaman tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing- masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan bukan hanya sebuah ajang untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya.

Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Adapun batasan anak secara khusus (legal formal) dapat kita ketemukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, adalah: “anak

49 Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 43.

50 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika pressindo, 1992), 114.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) anak adalah yang belum dewasa dan dibatasi pada umur 21 tahun sebagaimana Pasal 330 yang menyebutkan: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”. Sedangkan dalam hukum pidana sebagaimana KUH Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karenanya, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya ia dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Berbeda dengan ketentuan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 98 Ayat (1) menentukan batas usia menyandang status “anak” yakni seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, juga dikatagorikan belum dewasa. Isi Pasal 98 ayat (1) KHI tersebut adalah “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupu mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Sedangkan anak dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuannya terdapat dalam pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun)”.

Berkaitan dengan perkawinan, pada tahun 1969, Bogue membuat klasifikasi konsep anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 atau 19 tahun. Hal ini sebagaimana klasifikasi Bogue sebagai berikut:51

* + 1. *Child Marriage,* yakni perkawinan yang dilakukan pada saat kedua pihak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
    2. *Early Marriage,* yakni perkawinan yang dilakukan pada saat kedua pihak berusia 18-19 tahun.
    3. *Marriage at Maturity,* yakni perkawinan yang dilakukan pada saat kedua pihak berada pada usia 20- 21 tahun.
    4. *Late Marriage,* yakni perkawinan yang dilakukan pada saat kedua pihak sudah menginjak usia 22 (dua puluh dua) tahun ke atas.

Usia anak sebagaimana terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*), yakni setiap anak manusia yang berusia di bawah

18 tahun.52 Berbeda lagi dengan makna anak dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), 19 tahun bagi laki-laki, sedang perempuan 16 tahun. Namun demikian ketentuan tersebut telah diganti dengan ketentuan dalam undang-undang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Artinya seseorang yang umur perkawinannya kurang dari 19 tahun dianggap sebagai belum dapat melakukan perkawinan karena dianggap

51 Dkk. Moh. Fauzi, *Sikap Organisasi Keagamaan Terhadap Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi,* (Semarang: Lawwana, 2021), 33.

52 “United Nations International Children’s Emergency Fun,” 2005.

belum dewasa (anak-anak) sehingga ia harus mengajukan izin dispensasi perkawinan. Bahkan jika mengacu pada pasal 16 ayat (2) Undang-undang perkawinan, bahwa salah satu syarat seseorang dapat mengajukan perkawinan tanpa seizin wali adalah jika seseorang telah mencapai umur 21 tahun. Oleh karenanya jika ia kurang dari 21 tahun, ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

Dengan demikian perkawinan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan pada saat kedua mempelai masih dalam usia anak-anak yakni usia dibawah 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1).

# Faktor-faktor perkawinan anak

Perkawinan anak tidak terjadi secara serta merta, namun didorong oleh adanya beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi berpengaruh besar pada pola pengasuhan anak. anak dari keluarga dengan taraf ekonomi yang rendah cenderung lebih banyak menikahkan anak perempuannya pada usia dini, karena dinilai dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Akibatnya, perempuan dari keluarga dalam kategori miskin sulit melanjutkan pendidikan dan mengekspresikan kebebasannya untuk tumbuh berkembang. Di samping itu, tidka dipungkiri laki-laki juga berpotensi mengalami hal yang sama dengan wanita. Hal tersebut juga didorong adanya desakan ekonomi orang tua karena pergaulan yang

menjerumuskan pada ketidakpedulian tingkat pendidikan.53

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan hal yang vital dalam mempersiapkan masa depan anak-anak. kurangnya pemahaman dan pengsuhan yang baik membuat anak rentan melakukan pergaulan bebas. Pada akhirnya, kurangnya pemahaman terhadap kesehatan reproduksi dari orang tua dan lingkungan keluarga memicu terjadinya perkawinan anak yang masif. Peristiwa tersebut banyak terjadi di lingkungan pedesaan, anak di pedesaan lebih rentan karena terbatasnya akses pengetahuan.

1. Faktor pendidikan

Pendidikan berpengaruh terhadap perspektif seseorang dalam menafsirkan suatu hal maupun kondisi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka potensi keterbukaan pemikirannya lebih besar karena memiliki alternatif yang lebih luas untuk mengekspresikan apa yang dikehendakinya. Pendidikan memberi gambaran tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang –terdapat di sekitarnya.54

Pendidikan juga menjadi cerminan rerata pendidikan orang tua. Terdapat faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Faktor ekonomi (kekurangan) berkelindan dengan kebutuhan pendidikan berupa biya. Hal tersebut

53 Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Jurnal pemikiran dan penelitian Sosial Keagamaan Yudisia* 7, no. 2 (2016): 390.

54 Ibid., 388.

pada galibnya menjadi kendala untuk keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak.

1. Faktor budaya sosial

Nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal di masyarakat tidak semuanya mendukung tumbuh kembang anak untuk dapat menjemput masa depan yang baik. Masih terdapat nilai-nilai sosial di masyarakat yang mendukung perkawinan anak.

1. Faktor penafsiran terhadap agama

Di samping nilai-nilai sosial budaya, penafsiran terhadap agama yang kurang tepat juga menjadi faktor yang krusial mempengaruhi perkawinan anak. Penafsiran yang tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan hadits, tanpa menelusuri konteks sosial, budaya, *asbab an-nuzul* atau *asbab al-wurud*, ilmu alat, serta komparasi penafsiran, dapat menimbulkan pemahaman agama yang kurang tepat atau bahkan keliru. salah satunya pemahaman bahwa lebih baik menikah dini dari pada terjerumus pada perzinaan.

# Tujuan Pembatasan umur perkawinan

* 1. **Kedewasaan fisik dan mental**

Dalam perspektif hukum Islam, Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Namun demikian Islam mengenal persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melangsungkan perkawinan. Beberapa syarat tersebut adalah; baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk.

Ketiga prasyarat tersebut dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Dalam Al-Qur`an memang tidak secara sepesifik membahas tentang usia perkawinan, melainkan hanya menetapkan dengan tanda- tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh

dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum tersebut akan diundangkan.55

Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. Namun secara umum, kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah memiliki nafsu seks.56

Adanya pembatasan umur perkawinan dalam konteks hukum di Indonesia difahami sebagaimana adanya asas-asas dalam hukum perkawinan yang membatasi usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia. Adapun asas-asas tersebut salah satunya mengacu pada ketentuan *the United Nations Charter* dan *Universal Declaration of Human Right.*

Pembukaan piagam PBB menyatakan bahwa tujuan PBB adalah untuk “memperkuat keyakinan tentang hak-hak asasi manusia, tentang kehormatan dan harga diri manusia, tentang samanya hak-hak laki-laki dan wanita.” Pasal 16 Deklarasi terutama setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1962 mengadopsi sebuah resolusi yang mengandung tiga

55 Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 44.

56 Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 53.

pokok supaya menjadi ciri hukum perkawinan di dunia, yaitu:

1. Persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dengan suatu perkawinan; Persetujuan yang penuh dan bebas dari pihak-pihak calon suami isteri di depan petugas yang berwenang mengakadkan dengan disaksikan oleh para saksi. Di samping itu, kehadiran masing-masing pihak untuk diketahui segala kelengkapannya dan didengar persetujuannya oleh petugas.
2. Usia minimum perkawinan; Pembatasan minimal usia perkawinan merupakan hal yang harus dilakukan, kecuali terdapat alasan yang cukup serius untuk mengawinkan seseorang di luar ketentuan tersebut.
3. Pencatatan perkawinan; Setiap perkawinan hendaknya dicatatkan kepada pihak yang berwenang.

Ketiga ketentuan diatas diwadahi oleh PBB sebagai kebijakan hukum perkawinan secara global pada tahun 1965 dengan penyempurnaan pasal sebagai berikut:

1. *That marriages may only be legally entered into with full and free consent of both parties;*
2. *That marriages by proxy may only be permitted with the full and freely expressed consent of both parties before witnesses;*
3. *That member states shall take legislative action to specify a minimum age for marriage i.e. not less than 15 years of age.*
4. *That all marriages shall be registered in an appropriate official register by the competent authority.”57*

Salah satu poin penting dalam ketentuan *United Nations General Assembly Resolution* PBB tersebut yakni pembatasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Usia calon-calon mempelai menjadi isu yang cukup penting. Dalam Undang-Undnag Perkawinan di Indonesia pra perubahan, usia calon- calon mempelai khususnya usia perempuan nampak berbeda dibanding ketentuan PBB di atas. Perkawinan hanya diizinkan jika para calon suami dan isteri sudah mencapai usia sembilan belas tahun. Perkawinan pada seseorang yang kurang dari usia 19 tahun tersebut hanya dapat dilangsungkan atas seizin wali dari para calon mempelai serta izin Pengadilan berdasarkan mekanisme dispensasi kawin. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa dalam konteks perkawinan, usia dibawah sembilan belas tahun dianggap sebagai usia anak-anak sehingga belum dianggap cakap untuk membina keluarga dalam bingkai perkawinan.

Dengan demikian syarat batas usia minimal tersebut dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Selain kedewasaan secara fisik, pertimbangan perubahan ketentuan umur perkawinan dari 16 tahun

57 “United Nations General Assembly Resolution 2018 XX 1-11-1965,” 2018.

menjadi 19 tahun bagi mempelai perempuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah agar kedua belah pihak benar- benar siap dan matang dari segi pisik dan mental untuk menjalani rumah tangga. Dengan perubahan tersebut, maka batas minimal umur perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dirubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

# b. Perlindungan Hak Anak

Pada hakekatnya, perlindungan terhadap anak merupakan amanah yang telah termaktub dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dimana Indonesia menjadi salah satu dari

192 negara yang turut meratifikasi.58 Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak, pemerintah wajib membuat instrument baik berupa regulasi maupun petunjuk operasional terpenuhinya hak tersebut. Amanah KHA yang telah diratifikasi dalam berbagai undang-undang di Indonesia mewajibkan Indonesia untuk memenuhi hak anak dalam hal:

* untuk didengar;
* terbebas dari diskriminasi;
* terbebas dari kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan;
* penghapusan eksploitasi yang dapat menghilangkan eksempatan anak atas kesehatan;
* tekanan fisik dan mental, pendidikan, maupun tekanan secara moral, spiritual, maupun sosialnya.

Anak di bawah umur terutama anak yang masih kecil, disamping belum memiliki fisik yang kuat, juga belum memiliki daya nalar yang sempurna, sehingga sangat rentan dengan penindasan, baik yang dilakukan oleh orang tuanya

58 Djamilah and Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” 1.

sendiri maupun orang lain. oleh karena itu, hukum Islam dalam pengejawantahan kerangka hukum nasional memberikan perlindungan hukum terhadap golongan usia anak-anak sampai mereka menginjak usia dewasa. Di antara serangkaian perlindungan terhadap anak, salah satunya adalah perlindungan untuk dapat berekspresi secara bebas di usia emasnya dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Mengingat anak-anak akan menjadi ornag dewasa yang berpotensi menduduki peran penting, bahkan di pundaknya tergantung tumpuan harapan generasi tua saat ini.59

Banyak hal yang dipertimbangkan, dimana di Indonesia terlalu banyak terjadi pernikahan di bawah umur, sehingga perlu untuk dinaikan kembali batas minimal perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu, apabila dilihat dari segi kesehatan, kondisi reproduksi wanita pada usia 16 tahun belum tergolong matang, sehingga demi kebaikan anak tersebut lebih baik untuk tidak melakukan perkawinan pada usia tersebut, mengingat resiko yang akan dihadapinya apabila ia mengalami kehamilan kemudian melahirkan dengan kondisi tubuh yang belum matang secara kesehatan itu akan membahayakan baik calon ibu dan si janin yang ada dalam kandungan.

Sesuai Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin yang ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2019 dan diundangkan tanggal 21 November 2019, dispensasi kawin bertujuan untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, (yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan

59 Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), 145.

di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

1. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
2. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
3. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
4. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Anak merupakan penerus generasi bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Dalam Pasal 91 Ayat (4) KUHP memberikan penjelasan tentang anak adalah orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan orang tuanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia

18 tahun, termasuk dalam anak yang masih dalam kandungan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang tersebut batas usia kedewasaan seseorang minimal adalah 18 tahun, sehingga anak yang masih di bawah usia 18 tahun dianggap masih belum dewasa, yang artinya belum memiliki kecakapan hukum, yang juga termasuk untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini semata- mata untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak sebagaimana layaknya yang sudah di atur dalam Undang- Undang Perlindungan Anak.60

60 Jakobus A. Raharajan dan Sarifa Niapele, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 26 Ayat (1) menegaskan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (di bawah 18 tahun)”. Sehingga larangan untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur tidak hanya tertera dalam Undang-Undang Perkawinan, namun juga didukung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

# c. Kemaslahatan keluarga

Tujuan pembatasan umur perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). ketentuan tersebut diejawantahkan di dalam Pasal 15 Ayat (1) bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.

1. **Ketentuan Perkawinan Anak dalam Hukum di Indonesia** Sebelum ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia umumnya diatur menurut hukum agama dan adat masing-masing.61 Setelah adanya Hukum Negara yang mengatur mengenai perkawinan, barulah masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai acuan dalam menjalankan perkawinan menurut hukum Indonesia. Pada tahun 2019 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Public Policy),” *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis (Public Policy)*

2, no. 1 (2021): 93.

61 Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 212.

tersebut, kemudian diamandemen dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Perubahan ini menyangkut batas minimal perkawinan, dimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 batas minimal untuk perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, dan untuk laki-laki adalah 19 tahun.

Selain ketentuan tersebut, ketentuan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan beberapa persyaratan bagi yang melakukan perkawinan, sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan

(4) pasal ini.

1. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Persyaratan persetujuan dari mempelai dan izin dari orang tua jika mempelai belum dewasa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 di atas, menitikberatkan pada izin silang orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua atau penggantinya. Pada ayat (2) secara implisit para calon mempelai yang berumur lebih dari sembilan belas tahun tidak memerlukan izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut bertujuan agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta meneysuaikan dengan hak asasi manusia sebagaimana secara eksplisit diterangkan di dalam penjelasan Pasal 6 UU Perkawinan, bahwa pernikahan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkwinan tersebut, tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun.

Apabila dicermati, undang-undang tersebut menyeimbangkan hak-hak orang tua dan hak-hak anak. Hal inilah yang tampaknya membedakan undang-undang Perkawinan di Indonesia dengan *United Nations Charter* tersebut. Orang tua yang akan mengawinkan anaknya harus meminta izin kepada anak yang akan kawin terlebih dahulu, baik laki-laki maupun perempuan. Calon-calon mempelai yang berusia kurang dari sembilan belas tahun harus meminta izin:

* Orang tua;
* Wali;
* Orang yang memelihara;
* Keluarga;
* Orang yang mempunyai hubungan arah dalam garis keturunan ke atas.62

Jika semua pihak yang disebutkan di atas tidak ada lagi, maka izin dapat diperoleh dari pengadilan setempat. Permberian izin kepada mempelai yang usianya kurang dari sembilan belas tahun pada praktiknya harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.63 Oleh karenanya, izin secara tertulis diperoleh dari orang tua atau penggantinya untuk kemudian diketahui dan diproses oleh Pengadilan Agama. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

“Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat “halangan perkawinan menurut undang- undang.”

Pegawai pencatat meneliti pula:

* 1. “Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
  2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
  3. Izin tertulis/ izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang,

62 Pasal 4 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

63 Lampiran Pedoman Pelaksanaan tentang PP No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur sembilan belas tahun.”

Selanjutnya, suatu perkawinan disyaratkan agar di antara calon-calon mempelai tidak ada faktor-faktor penghalang, baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara saja.64

Ketentuan keharusan memenuhi syarat dewasa dalam perkawinan dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan65 :

1. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

64 Abdul Hadi, *Fiqh Munakaha* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 82.

65 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dengan demikian menururt Undang-undang, perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur atau perkawinan orang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana Undang-undang perkawinan, dianggap telah melanggar ketentuan Undang-undang perkawinan jika dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja, sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Muslim. Namun ada pengecualian jika perkawinan di bawah umur ini dilakukan dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut dapat dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan sipil bagi yang beragama Non Muslim.

Dispensasi perkawinan sendiri tidak serta merta dapat dikabulkan oleh Hakim, karena harus ada alasan yang darurat dan memang sangat diperlukan dispensasi nikah itu, misalkan karena alasan “kemadaratannya lebih besar jika tidak dilangsungkan perkawinan” sebagaimana qaidah “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih*. Alasan tersebut bisa diajukan dalam permohonan dispensasi nikah, tentu dengan syarat-syarat lain yang memadai, seperti kesanggupan dari wali untuk dapat membantu ekonomi pasangan yang akan dinikahkan di bawah umur ini, mengingat anak di bawah umur dari segi finansial belum mapan untuk membina rumah tangga.

# Ketentuan Perkawinan Bawah Umur dan Akibat Hukumnya

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi

landasan untuk me nciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan akibat hukum suatu perkawinan.66

Hukum perkawinan di Indonesia bersandar pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada dasarnya, berdasar Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keprcayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam hukum privat, unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.67 Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, usia minimal seseorang boleh menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Hukum Islam (fiqh menurut para ulama klasih) tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan suatu perkawinan kecuali akil balig. Namun hal ini berbeda dengan hukum di Indonesia, dalam hukum positif di Indonesia, perkawinan anak di bawah umur ini dapat melanggar hak-hak anak. Contoh saja seperti hak anak untuk tumbuh dan berkembang, belajar, menikmati masa anak- anaknya. Karena secara psikologis usia anak-anak adalah usia dimana masih waktunya untuk bermain, belum waktunya untuk berumah tangga yang kemudian menjadi seorang Istri dan seorang Ibu.68

Menurut Hukum di Indonesia mengenai sahnya perkawinan tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

66 K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 3.

67 J. Satrio, *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almiah*, cet 2. (Jakarta: Grasindo, 1998), 12.

68 Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 213.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.69

Selanjutnya mengenai syarat perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 6 yaitu menerangkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan juga dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedau orang tua. Ini berarti salah satu syarat Sahnya perkawinan adalah Perintah mendapatkan izin kedua orang tua jika pasangan yang hendak kawin masih berumur dibawah 21 Tahun.

Dalam perspektif hukum positif, perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang tidak sah dikarenakan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait batas umur minimal yang membolehkan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali jika mendapatkan dispensasi perkawinan dari pengadilan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika para calon mempelai telah mencapai batas usia 19 (sembilan belas tahun)”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Apabila terdapat perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur, maka dalam hal ini pemerintah telah memiliki kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia

69 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang dalam undang-undang disebut dengan dispensasi.

Adanya mekanisme pemberian dispensasi nikah dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, agar kelak dapat terbina rumah tangga yang kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan keduanya, disamping itu juga berguna untuk menunjang program kependudukan.

Namun, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Sesuai dengan amanah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan anak dengan mengajukan dispensasi perkawinan apabila terdapat “penyimpangan.” Namun frase penyimpangan tidak disertai penjelasan dan cakupan makna yang lebih rigid sehingga menimbulkan implementasi beragam di masyarakat. Argumen terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan makna dari frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu Ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk

perkawinan dalam Undang-undang perkawinan.70 Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur.71

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi Pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 Ayat (1), bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *Jo* Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni kedua calon mempelai sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2), “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dianggap belum dewasa menurut hukum dalam ranah perkawinan.”

Saat ini, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan

70 CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 230.

71 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

bagi yang Beragama Islam. Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan telah memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut, “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Dengan demikian Pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Di samping itu, dalam konteks hak anak telah tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindaklanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.

Namun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut Pasal 60 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa: “Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.” Selanjutnya pasal 62, 63, dan 64 KHI menjel askan tentang Pencegahan perkawinan sebagai berikut:

Pasal 62 menjelaskan bahwa:

1. “Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.”
2. “Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak

kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.”

Pasal 63: “Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.”

Pasal 64: “Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.”

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, difahami bahwa orang yang dapat mencegah perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
2. Saudara
3. Wali nikah
4. Wali pengampu dari salah seorang calon mempelai
5. Suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami
6. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.

Dalam memutuskan perkara baik dispensasi kawin ataupun isbat nikah, hakim sebagai pihak penegak hukum, dituntut menerapkan hukum atau keputusan hukum sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syariat. Apabila penerapan suatu rumusan akan bertentangan dengan hasilnya dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum tersebut harus ditangguhkan. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan.

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggung-jawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap

keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat voluntair. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut beschikking dalam arti luas.72 Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Bunyi Pasal tersebut bermaksud agar agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan bila calon mempelai pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas).”

Maksud dari bunyi Pasal tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas- batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Dengan

72 Sudikno Mertokusumo and Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 12.

kata lain, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Demikian pula beberapa kemungkinan yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan dispensasi adalah karena terkait dengan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hamil di luar nikah, sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 *Juncto* UU No. 16 Tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Pasal 15 ayat (2) “ Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3),

(4) dan (5) UU Perkawinan.”

Adapaun tentang kemungkinan dikabulkannya dispensasi perkawinan adalah karena calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil sebagaimana ketentuan pasal 53 KHI sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”

Pasal 53 ayat (2) “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”

Pasal 53 ayat (3) “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan

perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, selain karena pertimbangan nikah hamil juga karena mempertimbangkan kemaslahatan sebagaimana tujuan dispensasi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

Dalam kaidah Fiqhiyah, Selain ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, hakim juga menggunakan dasar hukum lain yakni Kaidah Fiqhiyyah dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Hal ini sesuai karena dalam setiap penetapan dispensasi izin perkawinan selalu dicantumkan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: “Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan”

Hakim memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan dapat menghindari kerusakan maka dari itu harus segera dilakukan perkawinan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan nanti juga jelas. Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya.

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat

dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Selain permohonan dispensasi kawin, hal lain yang mungkin dilakukan oleh orang tua atau pasangan yang umurnya kurang dari 19 tahun adalah, mereka melakukan perkawinan bawah tangan, dan mereka mengajukan isbath nikah setelah umur minimal kawin terpenuhi. Isbat nikah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari’at agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Hal ini sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan diganti dengan perma tahun 2013.

Isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan dengan syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3): “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

* 1. “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  2. Hilangnya Akta Nikah;
  3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
  4. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang\_undang No. 1 Tahun 1974 dan;
  5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Thaun 1974.”

Selain hal tersebut isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oieh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

# Relasi Kuasa dan Pembangunan Hukum

1. **Relasi kuasa dan hukum perkawinan anak**

Foucoult membicarakan kekuasaan dalam konteks relasi antar manusia dalam berbudaya. Kuasa terkadang dapat menimbulkan sikap represif dan dominatif sehingga seseorang bisa menguasai orang lain. Namun demikian pola pikir dan tingkah laku seseorang bersifat dinamis, berkembang berhadapan dengan realitas yang juga berkembang dalam sejarah dan kebudayaan berfikir.73

Menurut Foucoult kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Dalam bahasan lain Foucoult mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah episteme, yakni pengetahuan yang dihasilkan oleh adanya otoritatif atau pengetahuan yang dimantapkan oleh situasi tertentu pada masa tertentu. Kekuasaan sebagai episteme

73 Michael Foucault, Discipline and Funish: The Birth of The Prison, sebagaimana dikutip Konrad Kebung, *Membaca Kuasa “Michael Foucault Dalam Kontek Kekuasaan Di Indonesia, Dalam Melintas, STFK Ledarero Moumere Indonesia* (STFK Ledarero Moumere Indonesia, n.d.), 38–39.

bersifat dinamis sangat tergantung pada relitas yang selalu berkembang74

Dalam praktek hukum perkawinan anak, relasi kuasa dapat tercermin dalam produk kekuasaan yakni perundang-undangan, peraturan turunan, kebijakan, putusan atau penetapan dan pemahaman masyarakat tentang perkawinan anak atau usia perkawinan.

Namun demikian karena kekuasaan sebagaimana Foucault yang bersifat dinamis, maka kekuasaan yang menghasilkan sebuah konsep perkawinan anak yang terjadi di masyarakat juga bersifat dinamis. Artinya bisa dilakukan oleh Negara dalam produk hukum yang dibuatnya, atau bisa juga dalam putusan penetapan dan kekuasaan orang-orang yang berrelasi dalam menentuakn perkawinan anak.

Relasi kuasa dalam hukum positif di Indonesia secara politik tercermin dalam sistem hukum atau perundang- undangan, termasuk di dalamnya UU Perkawinan.75 Adapun relasi kuasa dalam implementasi hukum atau penegakkan hukum (*law enforcement*) tercermin dalam produk hukum hakim, kebijakan pemerintah, tokoh agama serta masyarakat.

Hal demikian, karena menurut Jimly,76 law inforcement dapat dilihat dari perspektif subjek dan objeknya. Penegakkan hukum dari perspektif subjek dalam pengertian yang luas maknanya proses penegakkan hukum dilakukan setiap subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, yakni semua orang yang menjalankan aturan atau norma hukum yang berlaku, Adapun subjek dari

74 Foucoult, *Discipline & Punish*; Bilquis and Hidayat, “Kekuasaan Dan Pengetahuan: Diskursus Mitos Maskulinitas Pada Seksualitas Pemuda.”

75 Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, 19th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 44.

76 Jimly Asshiddiqie, “Penegakkan Hukum,” n.d., 1–4, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\_Hukum.pdf.](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

pelaksanaan dan penegakan hukum dalam arti sempit dimaknai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun dari sisi objeknya, hukum yang akan ditegakkan mencakup hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum formal hanya terkait dengan aturan perundang-undangan yang tertulis. Penegakkan hukum secara sempit dikaitkan dengan pelaksanaannya atau dapat pula disebut *‘court of law’* dalam arti pengadilan hukum, adapun penegakkan hukum secara luas menyangkut penegakkan hukum materiil atau penegakkan keadilan atau ‘*court of justice’*, hingga Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah ‘*Supreme Court of Justice*’.77

# Pembangunan Sistem (Budaya) Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu aspek dari sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman,78 terdiri dari tiga sub sistem, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). *Legal substance* yakni materi dan norma hukum yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. *Legal structure* yakni Lembaga pembuat hukum dan *legal culture* yakni prilaku hukum masyarakat. Ketiganya saling berpengaruh membentuk sistem hukum yang berjalan dengan baik.

77 Ibid.

78 Lawrence M. Friedman and Grant M. Hayden, *American Law An Introduction*, Third Edit. (New York: Oxford University Press, 2017), 126– 127.

Hal senada diungkapkan Soerjono Soekanto.79 Ia menjelaskan bahwa budaya merupakan salah satu dari lima hal penting yang mempengaruhi tegaknya hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: materi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya hukum masyarakat. Kelima faktor tersebut saling terkait untuk menentukan efektifitas penegakan hukum menuju kesadaran hukum.

Materi hukum dimaksud adalah undang-undang yang ada harus memuat ketentuan yang berpihak pada tegaknya hukum. Penegak hukum dimaksud seluruh pejabat sebagai pengambil kebijakan pelaksanaan hukum harus berkompeten dan berpihak pada tegaknya hukum. Sarana dan prasarana dimaksud seluruh peralatan, organisasi hukum, penganggaran dan sistem pendukung lainnya harus mendukung untuk terciptanya penegakan hukum. Masyarakat dimaksud sikap, kemauan dan kesadaran hukum masyarakat sangat mendukung tegaknya hukum untuk dan budaya masyarakat dimaksud kebiasaan hidup masyarakat yang dilakukan harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Demikian pula Johni Najwan,80 ia menyebut bahwa aspek sosiologis merupakan aspek yang menentukan terwujudnya sistem perundang-undangan. ia menjelaskan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan harus memuat tiga aspek, yakni filosofis, juridis dan sosiologis. *Pertama,* aspek filosofis, berkaitan dengan isi dari undang- undang tersebut ialah yang memuat nilai-nilai kebenaran dan keadilan. *Kedua,* aspek juridis diantaranya terkait

79 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

80 Johni Najwan, “Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1,” *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No, no. 1 (2013): 26.

dengan hal-hal sebagai berikut: 1. Harus dibuat oleh orang yang memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan. 2. harus sesuai antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau sederajat. 3. harus mengikuti tata cara tertentu. 4. tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Ketiga, Aspek sosiologis terkait dengan ajaran *Sociological jurisprudence*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum atau undang-undang akan memiliki legitimasi sosial, ketika hukum tersebut sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan, selain itu terdapat kesesuaian antara keinginan atau kebutuhan masyarakat dengan kehendak pembentuk undang-undang.

Posisi budaya hukum menurut Friedman merupakan hal yang lebih penting untuk menegakkan hukum yang adil dibanding struktur hukum dan substansi hukum. Apabila budaya hukum buruk, maka subtansi hukum juga akan buruk, begitu pula bila budaya hukum buruk maka akan menciptakan struktur hukum yang buruk. Namun demikian ketiganya sama-sama penting untuk menegakkan sistem pembangunan hukum.81

Adapun unsur budaya sebagaimana penjelasan Tylor adalah pengetahuan, seni, kepercayaan, moral, adat istiadat, hukum, dan kemampuan-kemampuan serta

81 Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan* 22, no. 1 (2019): 6.

kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai warga masyarakat.82

# BAB III

# KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA (KASUS DI (JAWA TENGAH DAN JAWA BARAT)

82 Anak Agung Gede Oka Parwata and dkk, *Memahami Hukum Dan Kebudayaan* (Denpasar Bali: Pustaka Ekspresi, 2016), 9.

# Jawa Tengah

Perkawinan anak di Indonesia dengan jumlah 10 angka tertinggi sebagaimana data Badan Pusat Statistik, tertinggi di Kalimantan Selatan sebanyak 12,52 persen, selanjutnya Jawa Barat sebanyak 11,48 persen, Jawa Timur 10,85 persen, Sulawesi Barat 10,05, Kalimantan Tengah sebanyak 9,85, Banten 9,11, Bengkulu 8,81, Jawa Tengah 8,71 dan Jambi 8,56.83 Dari data tersebut, penulis menganggap penting meneliti perkawinan anak di Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan pertimbangan bahwa kedua daerah tersebut merupakan daerah tertinggi kedua dan ke sembilan, sehingga hasil penelitian ini dapat merepresentasikan data perkawinan anak di Indonesia dan segala problematikanya yang terkait dengan relasi kuasa dan agama.

Sebenarnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 18 April 2022, dimana dalam pasal 5 dijelaskan ruang lingkup Perda ini adalah untuk pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak. Selanjutnya pada pasal 84 dijelaskan lebih detail sebagaimana berikut. Ayat (1) “Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak.” (2) “Pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia Anak bertujuan untuk:

* + 1. mewujudkan perlindungan Anak dan menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b. mewujudkan Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; c. mencegah

83 Badan Pusat Statistik, “10 Provinsi Dengan Perkawinan Wanita Di Usia 7-

15 Tahun Tertinggi (2020),” 2021, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan- pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020.

terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap Anak; d. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;

e. meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas kesehatan ibu dan Anak; f. menurunkan angka perceraian; g. menurunkan angka kematian ibu; h. menurunkan angka kematian bayi dan balita; i. menurunkan angka putus sekolah; dan j. menurunkan angka kemiskinan.”84

Namun demikian, data perkawinan anak di Jawa Tengah mengalami kemajuan terutama setelah masa pandemic, bahkan menduduki peringkat 9 secara nasional pada tahun 2020. Hal ini sebagaimana data Kementerian Agama Jawa Tengah, terdapat beberapa daerah yang peningkatannya signifikan seperti Kabupaten Brebes yang menjadi kabupaten tertinggi perkawinan anak tahun 2020. Namun ada juga daerah yang cukup tinggi baik sebelum adanya perubahan undang-undang perkawinan dengan setelah adanya perubahan Undang-undang perkawinan seperti Kabupaten Cilacap. Dan angkanya cukup rendah sejak sebelum ada perubahan undang-undang perkawinan hingga pasca perubahan undang-undang perkawinan seperti halnya Kota Semarang. Untuk itu mewakili variasi daerah tersebut, maka perkawinan anak di wilayah Jawa Tengah diwakili oleh tiga daerah tersebut. Adapun untuk wilayah Jawa Barat penulis meneliti lebih khusus di wilayah Kabupaten Indramayu dengan pertimbangan keunikan budaya Indramayu dalam perkawinan dan perceraian, bukan saja perkawinan anak yang banyak terjadi, namun juga perceraian anak banyak terjadi, bahkan dalam beberapa kasus perkawinan dan perceraiannya pun dilakukan secara sirri.

84 Gubernur Jawa Tengah, “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,” 2022.

Berikut angka perkawinan anak sebagaimana data dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan peringkat 5 daerah tertinggi perkawinan anak di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan bawah 16 tahun bagi perempuan pada tahun 2020:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kota/Kabupaten | lk- lk (-  19) | Pr (- 16 | Jml | lk-lk (19-  21) | Pr (16-  21 | jml |
| 1 | Kab. Brebes | 511 | 769 | 1280 | 1350 | 3622 | 4972 |
| 2 | Kab. Cilacap | 144 | 168 | 312 | 1668 | 3183 | 4851 |
| 3 | Kota Semarang | 59 | 93 | 152 | 793 | 1159 | 1952 |

Berikut adalah data perkawinan anak di Kabupaten di Jawa tengah yaitu Kabupaten Brebes sebagai kabupaten tertinggi perkawinan anak se jawa Tengah, Kabuaten Cilacap peringkat ke-4 tertinggi angka perkawinan anak dan Kota Semarang sebagai wilayah perkotaan yang cukup tinggi. Ketiga kabupaten kota tersebut dipilih sebagai sampel di Jawa Tengah dengan Pertimbangan representasi daerah terbanyak perkawinan anak dan daerah yang cukup banyak seperti Kota Semarang.

# Kabupaten Brebes

Data jumlah perkawinan anak sebagaimana data dari Kemeterian Agama Provinsi Jawa Tengah, bahwa setiap kabupaten kota berbeda dan setiap tahun mengalami jumlah fluktuatif. Adapun data yang mengalami kenaikan yang signifikasn di beberapa daerah, justru terjadi setelah adanya masa pandemi yang berbarengan dengan dikeluarkannya perubahan Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan data dari kementerian Agama Jawa Tengah bahwa jumlah angka perkawinan anak di Kabupatem Brebes dari tahun ke tahun justru mengalami kenaikan dan justru mendapat jumlah tertinggi pada tahun 2020. Pada tahun 2017 perkawinan anak berjumlah 46 laki-laki dan 44 perempuan, pada tahun 2018 berjumlah 28 laki-laki dan 29 perempuan,

pada tahun 2019 berjumlah 143 laki-laki dan 147 perempuan, dan puncaknya pada tahun 2020 berjumlah 511 laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun dan 769 perempuan yang berumur kurang dari 16 tahun. Adapun laki-laki yang menikah berumur 19-21 tahun sejumlah 1350 dan perempuan yang berusia antara 16-21 tahun berjumlah 3622 orang.85 Jumlah tersebut menjadi jumlah tertinggi di Jawa tengah pasca adanya amandemen Undang-undang perkawinan yang bersamaan dengan masa Pandemi Covid.

Tingginya jumlah angka perkawinan anak di Brebes disebabkan oleh beberapa hal seperti pemahaman agama, faktor ekonomi atau kemiskinan, salah pergaulan, pengaruh media online dan hamil di luar nikah. Menurut Hasim Ashari,86 kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung, di antara penyebab adanya pernihakan usia anak adalah faktor pemahaman masyarakat tentang umur dewasa menikah sehingga menikah di usia muda menjadi suatu kebiasaan, disamping itu juga disebabkan pergaulan karena hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah sangat dekat sehingga dikawatirkan akan terjadi perzinahan.

Terkait faktor pemahaman masyarakat tentang kedewasaan umur menikah, menurut Hasim, masyarakat yang beragama Islam masih memahami bahwa Islam tidak membatasi umur minimal 19 tahun, mereka masih memahami

85 Data perkawinan anak tahun 2020 dari Kementerian Agama Jawa Tengah

86 Wawancara dengan Hasim Ashari, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, pada tanggal 8 September 2022

bahwa syarat menikah adalah baligh (kedewasaan secara fisik). Hal tersebut menjadi pemahaman yang dominan di masyarakat santri atau yang lebih kental agamannya. Pemahaman ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka masih banyak yang menikah usia muda. Hasim menambahkan sementara ini masyarakat masih belum sepenuhnya menerima pemahaman tentang umur 19 tahun sebagai umur ideal, tapi Hasim meyakini bahwa semakin lama masyarakat akan memahami pentingnya memahami umur dewasa bukan hanya dewasa fisik, apalagi di beberapa wilayah sudah ada pabrik, dan perempuan banyak yang lulusan SMP dan SMA yang terlibat bekerja, menuntut mereka untuk menunda perkawinan pada usia anak. Menurut Hasim sebenarnya umur perkawinan 19 tahun ini ideal dan tidak bertentangan dengan syari’at (*la yukhâlifu syar’i*), sehingga perlu diupayakan agar masyarakat faham dan mengikuti aturan tersebut.

Keyakinan Hasyim juga beralasan karena menurutnya hingga saat ini, KUA sudah melaksanakan tiga program sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung. Pertama, sosialisasi kepada masyarakat melalui “Bimbingan Remaja Usia sekolah” walaupun hanya diadakan setahun sekali di satu tempat saja dan baru dimulai sejak tahun 2021. Kedua, KUA juga mengadakan program bimbingan perkawinan sebagai program Nasional di masing-masing kecamatan bimbingan dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun. Namun demikian, Hasim menyadari materi bimbingan perkawinan tidak sepenuhnya berisi tentang sosialisasi umur perkawinan. Ketiga, KUA juga memberikan pengetahuan kepada setiap orang yang mendaftar perkawinan tentang umur menikah menurut undang-undang perkawinan. Mereka yang mendaftar perkawinan harus hadir ke KUA, sehingga moment tersebut dijadikan salah satu sarana untuk

mensosialisasikan umur ideal menikah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang perkawinan.

Upaya pencegahan dengan sosialisasi juga dilakukan oleh DP3KB Kabupaten Brebes. Ibu Lilik Meidiawati87 (Kepala Sub Koordinasi Pemberdayaan Perempuan) menjeleskan bahwa program kerja terkait dengan pencegahan perkawinan anak yang dilakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi dimaksudkan karena disadari pentingnya umur perkawinan haruslah umur yang dewasa, bukan hanya secara fisik, tapi juga dewasa secara mental, sehingga umur 19 tahun perkawinan itu dapat dianggap ideal.

Beberapa program di DP3KB Kabupaten Brebes yang selama ini dilakukan adalah sosialisasi tentang bahaya usia perkawinan dini kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut diwadahi dalam beberapa kegiatan diantaranya kegiatan forum anak. Zulva88 sebagai psikolog yang terlibat dalam kegiatan pendampingan program di bidang perempuan dan anak juga menambahkan penjelasan bahwa program sosialisasi yang dilaksanakan untuk mengurangi angka perkawinan anak adalah; Pertama, menggaungkan kegiatan 2P (Pelapor dan Pelopor), yakni kelompok peer remaja yang menerima pelaporan tentang hal-hal yang terkait dengan kekerasan anak, perkawinan anak dan hal-hal terkait permasalahan anak di Kabupaten Brebes, disamping itu mereka juga menjadi pelopor dalam melakukan hal-hal positif terkait anak. Kedua, disamping itu mereka mensosialisasikan program “Jo Kawin Bocah”, yakni kegiatan sosialisasi yang berorientasi pada pencegahan perkawinan anak dengan buku panduan yang sudah disediakan oleh DP3AKB Provinsi Jawa

87 Wawancara dengan Ibu Lilik Meidiawati, Kepala Sub Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Brebes, pada tanggal 8 September 2022.

88 Wawancara dengan Zulva, psikolog di DP3KB Kabupaten Brebes, pada tanggal 8 September 2022

Tengah. Hal ini karena kegiatan sosialisasi *“Jo Kawin Bocah*” merupakan kegiatan turunan dari DP3A2KB Provinsi Jawa Tengah.

Adapun beberapa faktor maraknya perkawinan anak di Kabupaten Brebes sebagaimana dijelaskan Ibu Lilik dan Bapak Zulva adalah karena beberapa hal yaitu faktor ekonomi atau kemiskinan dan hamil di luar nikah itu nampaknya faktor yang paling mendukung meningkatnya perkawinan anak. Selain itu faktor hamil di luar nikah, tingkat pengetahuan, dan budaya juga menjadi faktor yang mendukung terjadi perkawinan anak di Kabupaten Brebes. Bagi masyarakat menengah ke bawah, menikahkan anaknya di usia muda merupakan salah satu hal yang dianggap dapat membantu ekonomi keluarga, terutama jika anaknya menikah dengan pasangan yang tingkat ekonominya mapan. Dengan demikian terbantunya perekonomian keluarga menjadi salah satu motivasi terjadinya perkawinan anak pada keluarga kurang mampu. Di samping itu faktor pengetahuan tentang umur menikah ideal juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang menikah di usia muda, baik yang disebabkan oleh pemahaman agama ataupun kurangnya pemahaman tentang pentingnya kedewasaan baik fisik maupun mental untuk menikah. Demikian juga tentang pergaulan yang cenderung bebas, bahkan hamil di luar nikah juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak. Mereka beranggapan dari pada malu karena hamil di luar nikah, lebih baik dinikahkan segera.

Zulva menambahkan bahwa walaupun selama ini sudah dilakukan upaya sosialisasi bahaya perkawinan dini kepada masyarakat. Namun demikian diperlukan penguatan pemahaman tentang hak-hak anak kepada masyarakat dan pergaulan yang semestinya dilakukan oleh anak. Dengan demikian budaya dan kebiasaan masyarakat melakukan perkawinan anak akan berkurang.

Keterangan yang hampir sama dijelaskan pula oleh Hakim Pengadilan Agama Brebes, H. Arif Mustaqim.89 Mustakim menjelaskan tentang syarat dewasa dalam perkawinan dan faktor-faktor perkawinan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Menurut Mustaqim bahwa syarat kedewasaan seorang yang akan melangsungkan perkawinan, merupakan syarat yang harus dipenuhi. Namun ukuran kedewasaan tidak hanya dilihat dari usia, tetapi juga kesewasaan fisik dan psikis, yakni kematangan baik secara fisik maupun secara mental. Kematangan secara fisik ditandai dengan keluarnya sperma bagi seorang laki-laki sebagai tanda bahwa ia sudah baligh. Adapun bagi perempuan adalah keluarnya darah haid. Namun demikian ukuran tersebut tidaklah mutlak, karena kedewasaan fisik menurut hukum Islam tersebut sesuai dengan ilmu kesehatan setiap bangsa yang mungkin berbeda antara satu dengan lainnya. Sedangkan kedewasaan psikis difahami sebagai kedewasaan mental yang baik, memiliki rasa tanggung jawab sebagai suami ataupun istri terutama kemampuan untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik dan terhormat.

Selain masalah kedewasaaan, syarat lain yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah beragama Islam untuk tujuan yaitu menjaga keturunan yang sah sesuai agama Islam dan tidak adanya larangan untuk menikah baik larangan karena mahrom, ikatan perkawinan, talak tiga, ihrom ataupun perzinahan.

Adapun dalam masalah perkawinan dini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Brebes, adalah mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan yang ajukan

89 Arif Mustaqim, “Perkawinan Usia Dini” (Brebes: Pengadilan Agama Brebes, 2020), last modified 2020, https://www.pa- brebes.go.id/en/publikasi/berita-peradilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh- drs-h-arif-mustaqim-mh. diakses tanggl 7 september 2022

oleh orang tua atau para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang- Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 yakni jika terjadi penyimpangan terhadap ayat 1, maka dapat minta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak baik pria maupun wanita. Kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama juga sebagaimana tercantun dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan salah satunya, dan yang termasuk bidang perkawinan adalah permohonan dispensasi kawin.

Mustaqim menegaskan bahwa Pengadilan Agama Brebes termasuk pengadilan yang tinggi permohonan dispensasi kawinnya, terlebih pasca perubahan Undang- undang perkawinan yang menaikkan umur perkawinan calon mempelai perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini ditunjukkaan dengan meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin sebagaimana data SIPP perkara yang masuk sampai akhir bulan Oktober 2020 mencapai 511 perkara.

Beberapa faktor yang menunjang naiknya angka perkawinan anak di Kabupaten Brebes adalah: pertama, ekonomi, perkawinan usia muda dilakukan kerena kondisi ekonomi orang tua berada di garis kemiskinan, sehingga perkawinan anak dianggap salah satu cara mengurangi beban ekonomi keluarga terutama jika perkawinan dilakukan antara orang yang kurang mampu dengan orang yang mampu; kedua, pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan menikahkan anaknya yang berumur di bawah umur; Ketiga, kekhawatiran orang tua mendapatkan aib jika anaknya berapacaran secara bebas dan sudah sangat dekat sehingga orang tua segera menikahkan anaknya; Keempat,

media massa yang mudah diekspos oleh anak-anak sehingga remaja semakin permisif terhadap prilaku seks. Kelima, adat dan budaya. Budaya, stereotype, ketakutan dan rasa malu disebut perawan tua, menjadikan orang tua sering menerima lamaran yang data untuk anaknya, walaupun anaknya masih dibawah umur. Bahkan mereka dibolehkan pergi dan tidur bersama sehingga akhirnya mereka hamil di luar nikah. Keenam, ”*perkawinan karena kecelakaan”* atau hamil di luar nikah. Alasan ini yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Brebes. Pengajukan dispensasi karena hamil di luar nikah biasanya dilakukan karena terpaksa, bukan karena kedasaran dan kesiapan menikah, menikah dianggap solusi agar dosa tidak dilakukan secara berkepanjangan, walaupun usianya masih belum cukup umur. Mustaqim juga menuturkan bahwa para hakim merasa dilema jika memutus permohonan dispensasi kawin, apakah di kabulkan atau ditolak. Dianggap dilema, karena mempertimbangkan apakah mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu betul-betul bentuk penyelamatan ataukah sebaliknya bentuk penjerumusan bagi calon mempelai karena mereka masih anak-anak dan mengkhawatirkan untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Oleh karenanya pertimbangan maslahat dan madarat merupakan pertimbangan dalam memutus dikabulkan tidaknya permohonan dispensasi kawin. Kecuali pagi pemohon yang tidak memenuhi syarat formil seperti permohonan dispensasi diajukan bukan oleh orang tua, tetapi pamannya di calon mempelai, maka pihak yang mengajukan diminta untuk mengganti dan mengajukan kembali

kelengkapan dokumennya.

Mustaqim menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya; perlunya dlakukan penyuluhan secara terpadu kepada masyarakat sampa ke tingkat desa dan

kelurahan mengenai batas usia nikah; peran tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu ditingkatnya dalam memberi pemahaman agama terkait akhlak; peran serta irang tua untuk membimbing anaknya agar anak-anak, terutama anak di bawah umut untuk menjauhi pergaulan negatif; orang tua juga perlu membatasi dan mengawasi penggunaan handpone bagi anak-anaknya; dan meningkatkan peran pemerintah dalam mengadvokasi dan memberi perlindunagn anak agar anak usia 15-17 tahun fokus pada pendidikannya.

Beberapa keterangan di atas nampaknya selaras dengan beberapa data tentang kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Brebes. Beberapa kasus perkawinan anak di Kabupaten Brebes dilakukan setelah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. Bahkan terkadang permohonan dispensasi diajukan oleh kedua keluarga calon suami dan istri secara bersamaam. Hal ini seperti permohonan dispensasi kawin yang diajukan Cslm (Inisial) dan Drsn (kedua orang tua) yang mengajukan permohonan dispenasi kawin untuk anak laki-laki mereka yang bernama Why yang baru berumur 18 tahun. Pihak keluarga calon istri pada kasus ini juga mengajukan permohonan dispensasi kawin yang akhirnya dikabulkan dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 353/P.dt.P/2022/PA. Bbs dijelaskan bahwa kedua orang tua calon mempelai perempuan yakni Rdn (ayah/ Inisial) dan Tnrh (Ibu/ Inisial) mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama Ec (Inisial) yang baru berumur 18 tahun 4 bulan.

Dikabulkannya permohonan dispensasi yang diajukan didasarkan pada karena sudah terpenuhi persyaratan formil dan materiil. Hakim mempertimbangan kemampuan calon suami dan istri secara lahir batin serta pertimbangan kemaslahatan bagi kedua mempelai dan keluarganya. Di samping memeriksa persyaratan administratif, majlis juga

meminta keterangan dari orang tua, calon pengantin dan dua orang saksi. Adapun administrasi yang diajukan meliputi fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduauk (KTP) pemohon, fotokopi KTP anak yang mau menikah, kutipan akta nikah orang tua, surat penolakan dari KUA untuk menikahkan anak, Foto kopi akta kelahiran, surat pernyataan belum menikah dari anak yang mau menikah, surat keterangan dokter, surat keterangan kelahiran calon menantu, surat keterangan belum menikah dari calon menantu, surat keterangan penghasilan calon mempelai pria, fotokopi KTP calon besan, fotokopi akta kutipan nikah calon besan dan fotokopi KK calon besan.

Pada persidangan hakim juga memberi nasihat untuk menunda perkawinan, namun karena syarat formil dan materiil sudah terpenuhi, maka dengan pertimbangan kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan seperti untuk menghindari perzinahan karena kedua mempelai sudah sangat dekat, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi yang diajukan pemohon.90 Angka perkainan anak di Kabupaten Brebes menempati urutan pertama pada tahun 2020 seiring dengan masa pandemi yang menimbulkan beberapa dampak diantaranya pergaulan anak yang tidak lepas dari handpone dan rendahnya pendidikan serta tarap ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah sebenarnya sudah melakukan upaya agar angka perkawinan anak dapat terus menurun. Misalnya pemerintah telah menrbitkan Perda Nomor 4 tahun 2014 atas inisiatif DPRD, namun hinga saat ini terus diupayakan proses-proses menuju kota layak anak. Namun demikian Zubaedah91 (anggota DPRD Kabupaten Brebes) menyadari anggaran yang dialokasikan untuk

90 Lihat salinan Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2022/PA. Bbs.

91 Wawancara dengan Zubaedah, anggota DPRD Kabupaten Brebes Praksi Golkar, pada tanggal 2 Agustus 2022.

kepentingan program yang mengarah kepada upaya meminimalisir perkawinan anak belum maksimal.

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa semua pihak menganggap peningkatan angka perkawinan anak terutama setelah adanya amandemen undang-undang perkawinan yang berbarengan dengan adanya penyebaran covid-19, merupakan fenomena yang terjadi di daerah manapun di Indonesia sebagaimana diketahui dari data Badan Pusat Statistik atauppun Kementerian Agama. Meningkatnya angka perkawinan anak tersebut tidak bisa lepas dari faktor-faktor yang saling terkait, baik pemahaman agama, pola relasi sosial, budaya dan politik yang ada di masing-masing daerah.

# Kabupaten Cilacap

Perkawinan anak di Kabupaten Cilacap sebagaimana data dari Kementerian Agama juga terjadi Fluktuatif, walaupun jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Tengah, jumlahnya stabil tingginya sejak sebelum adanya amandemen yang hampir bersamaan dengan masa pandemi maupun setelah amandemen. Pada tahun 2018 terdapat perkawinan anak dengan jumlah 115 laki-laki dan 58 perempuan, pada tahun 2019 terdapat 129 laki-laki dan 85 perempuan dan pada tahun 2020 terdapat 144 laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun dan 168 perempuan yang kurang dari 16 tahun. Adapun yang berumur antara 19-21 laki-laki berjumlah 1668, sedangkan dan erempuan yang berumur antara 16-21 tahun berjumlah 3183 orang. Dengan jumlah tersebut pada tahun 2020, Kabupaten Cilacap menempati urutan tertinggi ketiga setelah Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan dan ketiga Kabupaten Cilacap.

Mensikapi banyaknya kasus perkawinan anak di Kabupaten Cilacap, Bapak Tfq (Inisial)92 Kepala KUA Cilacap Selatan menjelaskan bahwa di KUA Cilacap Selatan angka perkawinan anak pada tahun 2021 terdapat 22 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini. Adapun tahun 2022 dari bulan Januari-Juli sudah terdapat 26 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini. Ketua KUA Kecamatan Cilacap Selatan sangat menyayangkan dengan tingginya angka pernikahan dini di Kota Cilacap khususnya di Kecamatan Cilacap Selatan, dikarenakan usia yang masih muda. Tfq menjelaskan, perkawinan anak tidaklah ideal karena secara kesehatan maupun mental belum benar-benar siap untuk melangsungkan pernikahan. Bagi si perempuan pun masih sangat rentan jika terjadi kehamilan, bahaya persalinan untuk anak di bawah umur juga sangat tinggi. Namun pernikahan dini ini tidak dapat dihindari karena di Kecamatan Cilacap Selatan pernikahan dini terjadi karena telah hamil terlebih dahulu. Hal ini menggambarkan bahwa pergaulan anak-anak disini sangat bebas. Mungkin dikarenakan dekat pesisir pantai juga mempengaruhi, karena baik ayah atau ibunya itu pergi bekerja dari pagi dan pulang malam, sehingga pengawasan pada anaknya kurang, sehingga si anak pun bebas dalam bergaul.

Tfq juga menjelaskan bahwa prosedur perkawinan anak yang terjadi di KUA sudah sesuai aturan, yakni untuk dapat menikah di bawah umur maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sehingga kami dari pihak KUA jika telah ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, kami akan menikahkan pasangan tersebut. Klausul perihal dispensasi nikah menurut Ketua KUA Kecamatan Cilacap

92 Wawancara dengan Tfq, Kepala KUA Cilacap Selatan pada tanggal 22 Agustus 2022

Selatan ini juga tepat, karena jika telah hamil terlebih dahulu dan tidak dapat dinikahkan, maka anak yang di dalam kandungan itu sangat kasihan nasibnya, karena tidak memiliki ayah yang jelas, ataupun jika tetap menikah siri pun hanya akan merugikan bagi si ibu dan anaknya. Jadi regulasi tersebut telah tepat, selain mereka yang menikah karena *kecelakaan,* orang-orang lain tetap menikah di umur yang sudah di atas Sembilan belas tahun.

Perubahan minimal usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi calon pengantin perempuan dianggap sangat tepat karena dari pembuat undang-undang pun sudah mempertimbangkan dengan sangat-sangat matang untuk membuat sebuah regulasi. Seperti yang awalnya untuk perempuan itu minimal enam belas tahun, diubah menjadi Sembilan belas tahun, itu juga dengan pertimbangan yang besar pastinya untuk perempuan, karena untuk umur enam belas tahun itu masih terlalu dini, organ reproduksinya juga belum sempurna, dan belum siap organ tubuhnya apabila terjadi kehamilan yang nantinya akan terjadi pula proses melahirkan. Mengenai dispensasi nikah juga itu bentuk kemanusiaan dari pemerintah, karena jika mereka yang telah hamil di luar nikah misalkan, tidak dapat dinikahkan, maka bagaimana nasib dari anak yang ada di kandungan, padahal seorang anak tersebut tidak memiliki salah apapun, yang salah adalah perbuatan kedua orang tuanya.

Adapun beberapa program KUA Kecamatan Cilacap Selatan untuk meminimalisir pernikahan dini, terdapat program berupa sosialisasi dari tim Penyuluh Keagamaan KUA Kecamatan Cilacap Selatan yang dilakukan di pengajian-pengajian warga. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan mengenai pernikahan dini kepada para orang tua dengan harapan bahwa orang tua akan memberikan pengetahuan itu kepada anak-anak mereka. Di samping itu program tersebut dapat menanamkan sikap

untuk tidak melakukan pernikahan dini dengan memberitahu apa saja dampak yang akan dialami jika melakukan pernikahan dini. Program tersebut masih berjalan sampai sekarang, bahkan respon masyarakat juga baik terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh.

Mengenai program sosialisasi ini, Ibu Kasmi, S.H.I93 selaku Koordinator Penyuluh Keagamaan di KUA Kecamatan Cilacap Selatan menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari evaluasi program yang telah dilaksanakan, Tim penyuluh membuat program lanjutan yang baru saja dimulai pada tanggal lima belas Agustus 2022 yaitu sosialisasi yang dilakukan satu bulan sekali untuk karang taruna, pemuda nelayan, anak-anak SMP dan SMA. Ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan pada anak-anak sehingga mereka lebih berhati-hati dalam pergaulan dan tidak melakukan pernikahan dini. Pada awal program tindak lanjut, sosialisasi diberikan kepada orang tua, namun selanjutnya sosialisasi diberikan kepada anak-anak agar mereka dapat menyerap informasi dan pengatahuan itu sendiri. Perubahan sasaran sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar informasi lebih tepat sasaran dan dikhawatirkan orang tua lupa tidak menyampaikan informasi tersebut kepada anaknya.

Kepala KUA Kecamatan Cilacap Selatan memberi mengharapkan agar warga Kecamatan Cilacap Selatan untuk tidak melakukan pernikahan dini, dan bagi anak-anak untuk lebih hati-hati dalam bergaul agar tidak terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, seperti hamil di luar nikah. Pesan lainnya adalah untuk lebih meningkatkan keimanannya, karena ketika kita memahami agama dengan

93 Wawancara dengan Ibu Kasmi, Koordinator Penyuluh Keagamaan di KUA Kecamatan Cilacap Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2022

baik, kemungkinan besar akan menghindari hal-hal yang dilarang agama, seperti berhubungan suami istri sebelum adanya perkawinan, sehingga menimbulkan pernikahan dini.

Permasalahn pernikahan anak yang marak di Kabupaten Cilacap juga mendapat tanggapan dari Tokoh agama. Wakil Ketua MUI Kabupaten Cilacap sekaligus sebagai Ketua MUI Kecamatan Cilacap Selatan (MMDZ/Inisial)94 mensikapi sama dengan Kepala KUA, bahwa banyaknya pernikahan anak yang di bawah umur 19 tahun, terutama yang terjadi di kabupaten Cilacap, sangat disayangkan, karena umur yang masih muda seharusnya masih bisa menikmati masa remajanya dan bermain bersama teman-teman sebaya. Belajar dan bermain di sekolahan itu merupakan hal yang hanya dapat dilakukan ketika masih muda. Asyiknya sekolah SMP dan SMA itu sangat sayang jika dilewatkan hanya untuk menikah. Karena pada dasarnya menikah itu dapat dilakukan Nanti ketika sudah benar-benar waktunya. Umur di bawah 19 tahun menurut Wakil Ketua MUI Kab. Cilacap itu masih belum waktunya untuk menikah. Oleh karenanya ketentuan umur menikah dalam amandemen undang-undang perkawinan sudah tepat.

Namun demikian, hingga saat ini MUI sendiri belum memiliki program apapun untuk menekan tingkat pernikahan anak di Kab. Cilacap. Selama ini kami sebagai MUI hanya dapat memberikan pengertian pengertian saja kepada jamaah ketika sedang melakukan pengajian, perihal perkawinan dan sebagainya. Jika program khusus mengenai perkawinan anak belum ada. Sementara ini MUI hanya melakukan tugasnya sesuai anjuran dari Kemenag. Namun

94 Wawancara dengan MMDZ Wakil Ketua MUI Kabupaten Cilacap, pada tanggal 22 Agustus 2022

sebagai tokoh masyarakat secara personal tentunya tetap saling mengingatkan sesama umat muslim untuk berperilaku baik dan menghindari segala hal yang dilarang agama, seperti berpacaran yang sampai terlalu jauh.

Lebih lanjut wakil Ketua MUI Kabupaten Cilacap menambahkan, bahwa dalam Islam tidak ada aturan minimal umur untuk menikah yang diterangkan secara rinci berapakah umur seharusnya seseorang melakukan pernikahan. Namun dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 221 yang artinya : "*Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya*". Kata ***mampu*** disini sering disalahartikan, dimana mereka terlalu sempit dalam mengartikan mampu. Ketika berpacaran ia merasa mampu, kemudian melakukan hubungan suami istri di luar nikah dan kemudian hamil, mereka merasa mampu ketika akan melangsungkan pernikahan. Mampu tidak hanya sekedar lisan bahwa ia mampu, tetapi kata mampu mencakup lahiriah dan batiniah bahwa ia memang benar-benar mampu. Mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya, mampu menafkahi lahir dan batin untuk istrinya dan anak-anaknya nanti. Dengan demikian, bagi mereka yang belum dewasa, maka mereka dianggap belum mampu bertanggungjawab untuk keluarganya sehingga tidak dianjurkan untuk menikah.

Lebih lanjut, MMDZ berpendapat bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral, sehingga harus dipertimbangkan secara matang, oleh karena itu anak di bawah umur masih belum bisa berfikir jauh mengenai bagaimana kehidupan pernikahan. Sifat-sifat kekanakan yang mementingkan kebahagiaan sejenak itulah yang membuat mereka akhirnya dengan percaya diri melakukan

hubungan yang dilarang oleh agama, dan menimbulkan kehamilan. Jika sudah pada kondisi tersebut, akan sangat kasihan si calon bayi ini jika orang tuanya tidak dinikahkan. Walaupun nantinya jika anak itu perempuan, si bapak biologisnya ini tidak dapat menjadi wali nikahnya, dikarenakan anak itu merupakan hasil dari hamil di luar pernikahan.

Sebagai Wakil Ketua MUI dan sebagai muslim, MMDZ merasa pentingnya memperhatikan masalah pernikahan anak di kabupaten Cilacap khususnya, terutama dalam kasus perkawinan anak yang disebabkan hamil di luar nikah. menurutnya karakter anak yang susah untuk diubah juga membuat pernikahan anak susah dikendalikan. Sebagai sesama umat muslim hanya bisa saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal buruk lainnya. Jika sudah terjadi maka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangganya dan mengurus anaknya dengan baik. Selalu perbaiki diri sendiri agar terhindar dari segala kemungkinan buruk lainnya.

Beberapa kasus perkawinan anak diantaranya dilakukan oleh Siti Darosatun,95 warga Jl. Bahari Rt 4 Rw 7, Tegalkamulyan. Siti menikah dengan suami yang bernama Hafis. Siti menikah pada Tanggal tujuh belas Juli 2022. Saat itu Siti masih berumur 17 tahun dan Hafis berumur 16 tahun. Pasangan ini telah menjalin asmara sejak satu tahun lalu sebelum dilangsungkan pernikahan. Karena keduanya tidak melanjutkan sekolah kemudian setelah Siti berumur 16 tahun dan Hafis berumur 15 tahun mereka melangsungkan pertunangan. Namun karena gaya pacaran yang terlalu ekstrim dan beranggapan bahwa mereka telah bertunangan maka akan menjadi suami istri, kemudian mereka

95 Wawancara dengan Siti, pelaku perkawinan Anak, tanggal 25 September 2022

melakukan hubungan suami istri sebelum adanya perkawinan dan menyebabkan kehamilan. Rasa saling percaya dan saling memiliki inilah yang membuat mereka berdua melakukan hubungan yang belum seharusnya dilakukan, walaupun telah ada ikatan pertunangan. Ketika perkawinan dilaksanakan usia kandungan Siti telah dua bulan. Di umur pernikahan yang masih dini ini karena baru menikah selama sekitar dua bulan, mereka belum merasakan dampak apapun, masih merasakan kebahagiaan seperti ketika mereka masih berpacaran. Namun mereka tidak luput juga dari gunjingan tetangga karena ia menikah akibat hamil terlebih dahulu.

Saudara Siti berharap untuk kedepannya tidak terjadi permasalahan yang berarti untuk keluarga kecilnya, berharap juga untuk suaminya bisa mendapatkan pekerjaan untuk menafkahinya dan buah hatinya kelak, karena saat ini mereka masih tin ggal bersama orang tua saudara Siti. Pernikahan yang ia lakukan tidak dirasa salah, namun tetap ia tidak membenarkan hamil di luar nikah. Semua proses untuk ke KUA, dan Pengadilan Agama untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dilakukan oleh kedua orang tua saudara Siti dan saudara Hafis. Rasa bersalah karena telah membuat orang tuanya malu atas perbuatannya juga masih terasa hingga sekarang. Namun ia juga sadar kalau itu tidak bisa diulang, ia hanya bisa meminta ampun kepada Tuhan dan berharap kelak anaknya tidak melakukan kesalahan yang sama.

Sebagai orang tua, Maryati96 (ibu dari Siti Darosatun) merasa bahwa pernikahan anaknya ini memberikan pukulan yang luar biasa, karena tidak menyangka anaknya dapat berbuat di luar batas seperti itu. Awal mengenai pertunangan yang memang tergolong masih dini memang disetujui oleh

96 Wawancara dengan Maryati, Ibu dari Siti tanggal 25 September 2022

kedua orang tua dari pihak perempuan dan laki-laki. Itupun karena permintaan dari anak-anak yang memang mengatakan sudah ingin menikah dan siap. Karena ditakutkan akan melakukan hal-hal di luar batas lainnya, maka disetujui untuk bertunangan terlebih dahulu. Karena memang pada saat mereka bertunangan belum boleh untuk dinikahkan, karena aturan minimal perkawinan itu, sehingga kami anjurkan juga pada anak-anak untuk menunda pernikahan hingga usia mereka mencukupi. Sebagai orang tua juga sudah memberikan pengertian kepada anaknya untuk menunggu hingga mereka sudah cukup umur, pertunangan itu hanya untuk mengikat saja.

Ibu Maryati tidak menyangka bahwa kedua anak tersebut tidak dapat menahan nafsu mereka, sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum pernikahan. Hal ini juga tidak luput dari kurangnya pengawasan dari orang tua, sebagai orang tua telah memberikan larangan untuk tidak sering keluar bersama apalagi sampai tengah malam, ataupun sering sekali berpacaran dirumah, namun karena kedua orang tua sibuk kerja, menjadi kurang dalam mengawasi anaknya. Ketika hal itu sudah terjadi maka orang tua pun tidak bisa apa apa selain mengupayakan yang terbaik untuk anaknya yaitu dengan cara menikahkannya walaupun masih di bawah umur. Sebagai orang tua juga yang mengurus segala keperluannya di Balai Desa, KUA dan Pengadilan Agama.

Sebagai orang tua pun tahu bahwa si suami belum bisa menafkahi istrinya secara lahir, oleh itu selama ini masih di bantu oleh orang tua untuk keperluan mereka. Baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan saling membantu keperluan anaknya. Hal ini juga dirasa miris bagi Ibu Maryati, karena seharusnya ketika sudah menikah dapat mandiri malah masih menjadi tanggungan orang tua. Inilah yang menjadi ketakutan bagi Ibu Maryati ketika

menikahkan anaknya di usia yang masih sangat dini, terlebih sang suami tidak memiliki pekerjaan. Jika tidak terjadi *kecelakaan,* Ibu Maryati tidak akan membiarkan anaknya untuk menikah di usia yang masih sangat muda. Omongan dari tetangga pun sangat menyakiti perasaan Ibu Maryati, beliau merasa gagal menjadi orang tua.

Karena semua peristiwa ini telah terjadi, maka tidak ada jalan lain selain ikhlas dan memohon ampun kepada Tuhan atas kelalaiannya menjaga anak. Harapan besar untuk anak dan menantunya untuk bisa membesarkan anaknya kelak dengan baik, dan mendidik anaknya menjadi anak yang baik sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama seperti orang tuanya. Berusaha untuk menerima keadaan adalah cara Ibu Maryati untuk tetap dapat hidup dengan anak dan menantunya, karena jika ia tidak menerima itu semua, akan sulit untuk dapat hidup bersama. Berusaha untuk mencarikan pekerjaan juga untuk menantunya agar dapat menghasilkan uang untuk persalinan istrinya nanti.

Pernikahan anakpun dilakukan oleh Elita Lairisky,97 warga Desa Binangun Dusun tambaksari rt 01 rw 08, Kecamatan Bantarsari menjelaskan, setelah lulus SMP, Elita bekerja di Jakarta dan bertemu dengan yang menjadi suaminya sekarang. Setelah menjalin hubungan pacaran, mereka memutuskan untuk kos bersama, karena selalu tidur di satu kos. Maka mereka beberapa kali melakukan hubungan suami istri yang akhirnya mengakibatkan Elita hamil. Saat itu usia Elita berumur belum genap 15 tahun, dan pacarnya telah berumur 19 tahun. Elita baru mengetahui ia hamil setelah masa kandungan 2 bulan, dikarenakan ketika kerja kesehatannya menurun, dan setelah di cek ternyata hamil. Saat itu dia kembali ke rumah dan

97 Wawancara dengan Elita, pelaku perkawinan anak tanggal 25 September 2022

memberikan kabar ke orang tuanya, ketika akan memberikan kabar pun ia merasa takut akan respon kedua orangtuanya. Akhirnya pacar Elita yang mau bertanggungjawab atas anak yang ada di kandungan Elita, mereka menikah pada Bulan Oktober 2018.

Elita menikah di umur 15 tahun. Karena menurut Undang-undang No 1 Tahun 1994 tentang perkawinan, batas usia menikah kala itu untuk perempuan adalah 16 tahun, maka Elita harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Proses permohonan itu diurus oleh ayah Elita. Saat menikah Elita berhenti bekerja sedangkan suaminya masih bekerja di tempat yang sama di sebuah PT di daerah Cikarang.

Elita mengatakan bahwa hubungan rumah tangganya baik baik saja hingga saat ini, walaupun terkadang ada masalah-masalah kecil perihal ekonomi, namun belum pernah ada masalah besar yang membuatnya merasa menyesali menikah muda. Hanya saja ia merasa kasihan dengan anaknya yang ketika lahir beratnya hanya 2,3 kg dan ia lahir prematur masih 8 bulanan. Sehingga setelah anaknya lahir memerlukan perawatan yang lebih di rumah sakit. Karena pernikahan yang ia lakukan itu dikarenakan hamil terlebih dahulu, menjadi bahan gosip tetangga sekitar, awalnya membuat Elita merasa stres, karena ia tahu bahwa ia salah namun gunjingan tetangga memberikan tekanan lebih kepadanya. Terlebih karena itu orangtuanya merasakan efek yang sangat besar, kebiasaan untuk berbaur dengan tetangga menjadi berkurang.

Elita berharap, masyarakat luar bisa berhenti untuk terus membicarakan soal pernikahannya yang dialkukan setelah hamil terlebih dahulu, terlebih kakak perempuannya yang sudah lama menikah belum dikaruniai anak. Di awal pernikahan banyak hal yang dipikirkan oleh Elita, permasalahan dengan orang tua kandungnya dan juga

mertuanya yang masih belum bisa menerima dengan ikhlas atas perbuatan Elita dan suaminya. Rasa malu yang tidak bisa dihilangkan dengan mudah juga menjadi permasalahan ketika awal pernikahan, Elita jarang keluar rumah, namun seiring berjalannya waktu Elita berusaha untuk hidup normal seperti dulu tanpa menghiraukan ucapan orang lain. Pernikahan elita bagi Nurhayati (Ibu Elita)98 warga Desa Binangun Dusun tambaksari rt 01 rw 08, Kecamatan Bantarsari menyisakan perasaan bersalah. Nurhayati merasa gagal dalam mendidik anaknya. Ketika Nurhayati mengetahui kalau anaknya hamil, ia sangat-sangat terkejut, kecewa, dan campur aduk tidak karuhan. Jujur saya ibu Nurhayati tidak mengetahui jika anaknya berpacaran dengan yang sekarang menjadi suaminya itu, karena Elita tidak pernah mengatakan apapun perihal hubungan asmaranya. Tidak ada niat sedikitpun untuk menikahkan

putrinya di usia muda kala itu.

Usaha ibu Nurhayati untuk membujuk anaknya melanjutkan sekolah pun sudah dirasa tidak kurang, namun karena anaknya yang memang tidak menginginkan melanjutkan sekolah, maka Nurhayati akhirnya mengikuti keinginan anaknya untuk setelah lulus SMP langsung bekerja di Jakarta. Nurhayati mengira memang anaknya fokus bekerja di sana, tidak ada kecurigaan bahwa anaknya akan berbuat yang aneh aneh di luaran sana, yang ia tahu putrinya adalah anak yang baik dan tidak bebas pergaulannya. Elita pun sempat dipondokan, karena SMP- nya adalah SMP berbasis pondok pesantren kala itu. Jadi ibu Elita menganggap bahwa putrinya setidaknya memiliki bekal agama yang cukup. Karena hal itulah rasa kecewa Bu Nurhayati lebih besar lagi. Nurhayati sebenarnya keras dalam menasehati Elita, ia melarang Elita berpacaran dan

98 Wawancara dengan Ibu dari Elita, 25 September 2022

tidak berteman dengan anak anak yang nakal sebagai bentuk rasa sayang dan juga tanggungjawabnya sebagai orang tua. Namun anaknya melalaikan semua nasihat dan pesan dari orang tuanya. Suami Bu Nurhayati merupakan orang yang sangat penyabar, dan selalu memberikan apapun yang putrinya minta asalkan mampu, kasih sayang yang diberikan kepada anaknya dirasa tidak kurang, perhatian dan lain-lainnya.

Ia menuturkan "Jarak yang jauh jadi halangan kami dalam mengawasi putri kami" begitu jelas Bu Nurhayati. Apa yang dilakukan anaknya di tempat kerja tidak diketahui oleh orang tua jika anaknya tidak memberi tahu sendiri. Rasa percaya yang hanya bisa diandalkan kala itu. Harapan Bu Nurhayati tidak banyak, beliau hanya berharap rumah tangga anaknya dapat langgeng, diberkahi oleh Allah SWT. Beliau juga berharap yang terbaik untuk anak, mantu dan cucunya.

Banyaknya kasus perkawinan anak di Kabupaten Cilacap, dijelaskan oleh Ahmad Wahib (Wahib),99 Hakim pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Menurutnya, Selama menjadi Hakim di Pengadila Agama Cilacap, Wahib telah menangani permohonan dispensasi nikah ratusan kali. Hal ini menggambarkan banyaknya pernikahan anak di Kota Cilacap. Menurut Wahib, sangat disayangkan jika anak yang masih sangat muda melangsungkan perkawinan. Hal ini tidak luput dari pergaulan anak-anak yang terlalu bebas, dampak teknologi yang semakin maju, sehingga jaman sekarang tidak susah mencari pasangan, dari aplikasi saja sekarang sudah bisa mendapatkan pasangan, namun kualitas pasangan yang seperti apa itu yang tidak dapat diketahui aslinya. Wahib menambahkan, bahwa pernikahan

99 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Tanggal 22 Oktober 2022

dini ini sebenarnya sangat bahaya bagi kesehatan, secara medis bagi perempuan organ reproduksinya belum siap untuk melakukan hubungan suami istri, dan apalagi hingga hamil dan melahirkan nantinya, angka kematian ibu yang masih di bawah umur juga sangat tinggi. Hal itu menyimpulkan bahwa kehamilan yang terjadi pada anak di bawah umur itu sangat berbahaya.

Perkawinan juga sudah di atur di Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam undang-undang tersebut telah diatur batas minimal perkawinan dimana sekarang baik perempuan maupun laki-laki batasnya adalah 19 tahun. Regulasi ini ada untuk memberikan aturan bagi masyarakat, yang mana harus ditaati, dengan harapan dapat terwujudnya masyarakat yang teratur dan tertib.

Menurut Wahib, regulasi mengenai batas minimal pernikahan ini sudah tepat, karena mengingat di umur 16 tahun itu masih tergolong sangat muda untuk melangsungkan pernikahan. Pastinya banyak faktor yang menjadikan minimal pernikahan menjadi 19 tahun, baik itu dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Karena jika minimal umur 19 tahun, itu berarti mereka telah selesai pendidikan SMA. Dimana dianggap juga telah beranjak dewasa dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibanding hanya lulusan SMP. Wahib yakin bahwa pembuat undang-undang pasti telah memperhatikan banyak aspek dalam membuat sebuah regulasi. Walaupun ketentuan tersebut menurutnya belum bisa dikatakan dapat menekan angka pernikahan dini. Hal ini karena dalam kenyataannya malah justru lebih banyak yang melakukan pernikahan dini ketika peraturan telah diubah menjadi batas minimal umur perkawinan itu 19 tahun. Kenapa demikian? Karena yang umurnya 16-18 pada saat sebelum Undang-undang No 16 Tahun 2019 diberlakukan pada bulan September, mereka masih bisa

melangsungkan pernikahan. Namun ketika telah diubah peraturannya di Undang-undang No 16 Tahun 2019 ini, mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan tanpa adanya dispensasi nikah. Hal ini menjadikan pernikahan dini melonjak tinggi.

Wahib juga menegaskan bahwa perihal dispensasi nikah ini juga perlu diperhatikan, mereka memang tidak diperbolehkan menikah sebelum umur 19 tahun, namun dapat sebuah keringanan dengan alasan-alasan yang jelas untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, berarti disini pemerintah memberikan solusi atas permasalahan masyarakatnya. Hal ini pun menjadikan pernikahan dini tidak dapat terkendali. Namun bagi Wahib, dispensasi nikah ini juga sekaligus menjadi perlindungan bagi anak yang terjadi sebelum pernikahan. Karena jika tidak ada dispensasi nikah, maka kemungkinan pasangan tersebut akan melangsungkan pernikahan siri, nasib anak tersebut akan sangat sangat kasihan. Karena ia tidak memiliki ayah yang legal secara negara. Walaupun jika dilakukan pernikahan yang sah secara Agama dan Negara, anak yang ada sebelum terjadi ikatan perkawinan, itu hanya dapet dinasabkan kepada ibunya. Dalam akta pun hanya tertulis nama ibunya saja, namun setidaknya dalam tumbuh kembangnya ia didampingi oleh seorang orang tua yang lengkap. Karena faktor kemanusiaan itulah menurut bapak Ahmad Wahib diadakannya dispensasi nikah.

Lebih lanjut, Wahib juga menegaskan bahwa pernikahan anak yang masih banyak juga dikarenakan kurang tegasnya dalam membuat sebuah peraturan, selain tadi sudah diadakan peraturan minimal perkawinan, namun masih ada dispensasi nikah, dengan segala pertimbangannya. Kemudian tidak ada hukuman bagi para pelaku pernikahan anak ini, sehingga memungkinkan tertanamnya *mindset,* tidak takut untuk melakukan

hubungan suami istri sebelum menikah yang kemudian menjadi dilakukannya pernikahan dini, karena tidak ada hukuman yang akan mereka dapatkan, kecuali hukuman sosial.

Menurutnya, perkawinan anak ini masih banyak terjadi di lapangan. Ia sebagai hakim yang sering menangani permohonan dispensasi nikah, seringkali mendengarkan alasan-alasan mereka yang mengajukan permohonan dispensasi nikah kebanyakan memang karena hamil terlebih dahulu, mendengarkan cerita bagaimana anak tersebut bisa hamil, sangat mengiris hati. Dimana beliau menceritakan bahwa ada seorang anak baru kelas 6 SD telah melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya yang juga sama-sama kelas 6 SD, lebih mirisnya lagi mereka melakukan itu di lingkungan sekolah yaitu di dalam kelas ketika sekolahan sudah sepi setelah jam pulang sekolah. Mendengar itu bapak Ahmad yang juga sebagai orang tua merasa miris, karena seorang anak yang masih sekitar 11-12 tahun namun pemikirannya sudah sampai ke arah perbuatan seperti itu, sudah jelas bahwa pergaulan, ataupun tontonan mereka tidak benar.

Karenanya kebanyakan permohonan dispensasi nikah akan dikabulkan jika itu telah memenuhi syarat formil, terlebih jika penyebabnya calon pengantin perempuan sudah mengandung, dengan alasan rasa kemanusiaan tidak akan bisa menolak permohonan tersebut. Dengan demikian, bagi Wahib, pertimbangan kemanusiaan dan te rpenuhinya syarat formil menjadi alasan dilabulkannya permohonan dispensasi perkawinan, kecuali jika ada syarat formil yang kurang, biasanya akan dicabut (tidak sampai ditolak), dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengajukan permohonan dispensasi nikah kembali. Biasanya permohonan dispensasi nikah yang dicabut itu misalkan syarat formilnya tidak jelas, seperti yang mengajukan

permohonan dispensasi nikah itu adalah paman dari si anak namun dari garis ibunya, sedangkan ayah dari si anak masih ada. Hal tersebut tidak diperbolehkan jika tidak ada surat kuasa dari si ayah kandung, terlebih jika paman ersebut dari garis ibu. Jikapun terpaksa harus pamannya yang mengajukan, maka harus paman dari garis ayah. Jika hal seperti itu terjadi biasanya Wahib meminta permohonan tersebut dicabut untuk diperbaiki oleh pemohon.

Menurut Wahib, dampak dari banyaknya dispensasi yang dikabulkan bisa saja menjadikan lebih banyak lagi permohonan dispensasi yang akan masuk ke pengadilan agama. Namun hal itu memang tidak bisa dihindari, karena daripada terjadi mudhorot yang lebih banyak, maka dengan itu lebih baik dikabulkan dispensasi nikahnya. Aspek kemanusiaan juga tidak dapat dihilangkan dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Bagi Wahib, harus ada upaya yang dilakukan agar tidak terjadi lagi banyak pengajuan dispensasi yang disebabkan hamil di luar nikah pada uasia anak adalah, memperbaiki agama dan akhlak mereka. Hal ini karena kebanyakan calon pengantin anak tersebut ketika ditanya tidak mengerjakan shalat. Dengan demikian menurut Ahmad, keimanan kepada Tuhan itu memang sangat penting untuk mencegah kita sebagai manusia melakukan hal-hal yang diluar anjuran Allah SWT. Realitas maraknya perkawinan anak di Kabupaten Cilacap menggugah Taufik Hidayat (Ketua DPRD Kabupaten Cilacap).100 Taufik prihatin dengan kenyataan bahwa di Cilacap angka pernikahan anak sangat tinggi, usia tidak hanya menentukan mampu tidaknya menjadi istri atau suami, namun banyak hal yang dipertimbangkan untuk menentukan batas usia minimal perkawinan. Kebanyakan

100 Wawancara dengan Taufiq Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 22 September 2022

pasti akan mengatakan faktor ekonomi itu sangat menentukan untuk kelangsungan kehidupan keluarganya kelak, anggapan seperti ini apakah dapat membenarkan mereka yang anak orang kaya, memiliki banyak warisan dibolehkan menikah di bawah umur? Tentu saja tidak. Menurutnya, Dalam perkawinan banyak yang harus dipertimbangkan, tidak hanya sebatas ekonomi, secara kesehatan dan mental pun harus diperhatikan. Mereka yang masih usia muda ini tubuh dan mentalnya belum mampu untuk melakukan perkawinan.

Taufik menegaskan bahwa pernikahan dini ini tidak jauh dari gaya pacaran jaman sekarang yang sangat ekstrim. Anak muda jaman sekarang sudah tidak lagi malu untuk bermesraan di tempat umum, bahkan banyak juga yang melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan. Pergaulan yang sangat bebas ini mau tidak mau akan mengakibatkan banyaknya terjadi hamil di luar nikah. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan karakter baik untuk anak maupun orang tuanya.

Faktor bebasnya penginapan seperti hotel ataupun kos juga sangat berperan penting dalam hal pernikahan anak, pengawasan pihak hotel yang sangat minim ini mengakibatkan tempat penginapan menjadi tempat mesum. Hal ini juga menjadi PR bagi kami sebagai masyarakat Kota Cilacap, khususnya saya sebagai ketua DPRD Cilacap. Budaya pacaran yang kebarat-baratan yang diterapkan anak muda jaman sekarang menjadi kalangkabut, karena tidak diimbangi dengan pengetahuan pengetahuan lainnya, seperti pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan semacamnya. Sehingga mereka dalam melakukan sex bebas banyak terjadi kebobolan yang akhirnya mau tidak mau harus melangsungkan pernikahan, padahal umur masih sangat muda. Namun yang menjadi pembeda adalah mereka yang berpacaran secara normal tetap aman. Berarti dapat

disimpulkan disini tergantung dengan karakter anaknya. Untuk itu perlu dibenahi karakter-karakter anak yang demikian.

Pernikahan dini juga tidak hanya persoalan hamil di luar nikah namun ada juga orang tua yang menjodohkan anaknya, ataupun memaksa anaknya untuk segera menikah. Untuk orang tua yang masih memiliki pemikiran seperti itu perlu juga dibenari karakternya untuk tidak mendukung anaknya melakukan pernikahan dini, perlu ditanamkan juga sifat malu jika anaknya melakukan pernikahan dini. Ketika anak-anak lain masih bahagia dengan kehidupan sekolahnya dan bermain dengan teman-temannya, mereka yang melakukan pernikahan dini ini akan terperangkap dengan kehidupan sebagai ibu rumah tangga, hal ini sama saja merenggut hak kebahagiaan remaja dari anak tersebut.

Pemerintah telah menaikan aturan mengenai batas usia anak, namun kurang tegas karena masiha ada celah untuk tetap melakukan pernikahan dini yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah, celah ini merupakan solusi atas permasalahan mereka yang mengalami situasi yang darurat dan harus melangsungkan pernikahan, seperti ketika telah terjadi kehamilan.

Anak-anak yang lahir dari orang tua yang mestinya belum saatnya untuk dibuahi ini ditakutkan tidak dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan tercukupi gizinya. Pemerintah mengeluarkan regulasi perihal batas minimal umur perkawinan ini dengan harapan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas ini tentu harus mereka yang sehat secara jasmani dan rohani, memiliki pendidikan yang tinggi, pemikiran kritis dan dapet bersaing dengan orang lain dalam dunia kerja nantinya. Itu adalah harapan negara untuk kita sebagai warga negara. Negara tidak mengharapkan anak-anak akan mengalami sunting, tidak tumbuh kembang dengan baik, namun jika

anak itu berasal dari mereka yang hamil di luar nikah dalam keadaan masih dibawah umur, kesehatan ibu yang mengandung akan mempengaruhi kesehatan anak di dalam kandungannya, jika anak tersebut lahir prematur karena mungkin kandungan ibunya yang tidak sehat, maka akan menciptakan anak yang kurang sehat pula. Hal inilah yang ingin dihindari oleh negara, maka dari itu dibuatlah regulasi demikian.

Taufik yang awalnya kurang memperhatikan mengenai pernikahan anak ini, akibat penelitian yang sedang dilakukan ini menjadi tertarik untuk mengusulkan Perda untuk mendukung regulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena belum ada aturan yang lebih merinci untuk warga Kota Cilacap. Dalam perda ini juga perlu mengatur baik itu dari Anak, ataupun orang tua. Perlu juga pendidikan karakter baik dari anak dan orang tua, ketika karakter telah dibentuk dengan baik, diharapkan dapat menjadi orang yang taat dan memiliki perilaku yang baik juga. Dengan itu dapat meminimalisir adanya perkawinan dini yang diakibatkan karena hamil di luar nikah, dan ketika orang tua juga dididik karakter yang baik maka dapat untuk mendidik dan mengawasi pergaulan anaknya lebih baik lagi, dan tidak ada lagi pemikiran jika tidak menikah-menikah itu akan membuat malu keluarga, sehingga sering kali terjadi pemaksaan untuk segera menikah. Bagi anak juga untuk dapat membatasi diri dan tahu bagaimana batasan- batasan lain dalam sebuah hubungan sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang di luar batas wajar.

Mengenai pernikahan anak ini juga perlu untuk mengawal dari bagian paling dasar yaitu RT, RW, Desa, dan KUA. Untuk saling mengingatkan kepada warganya. Jika memang nanti benar akan tercipta perda mengenai perkawinan dini ini, dapat mengatur mengenai kewajiban sebagai anak untuk tidak menikah di bawah umur, dan

mengatur juga orang disekitar untuk dapat membantu peraturan itu terlaksana dengan baik.

# Kota Semarang

Perkawinan anak di Kota Semarang meningkat signifikan sejak dikeluarkannya UU nomor 16 tahun 2019. Pada tahun 2017 berjumlah 57 kasus, tahun 2018 berjumlah

64 kasus, tahun 2019 menjadi 105 dan tahun 2020 meningkat menjadi 217 kasus. Adapun kasus tertinggi terjadi di Kecamatan Gunungpati berjumlah 27 kasus dan Kecamatan Ngaliyan berjumlah 25 kasus.

Pada tahun 2021, dari bulan Januari hingga Mei, Pengadilan Agama Semarang telah mengabulkan 92 permohonan dispensasi perkawinan dari 104 perkara yang diajukan101

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meminimalisir angka perkawinan anak sebagaimana dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota semarang. Kepala DP3A Mukhamad Khadik menjelaskan isu strategis yang dilakukan DP3A bekerjasama dengan PKK Kota Semarang yakni ketua PKK Krisseptiana Hendar Prihadi melakukan roadshow ke kelurahan-kelurahan. Adapun salah satu program untuk menekan angka perkawinan anak adalah melakukan proses pembentukan jaringan perlindungan perempuan dan anak.102

101 Radar Semarang, “Hingga Mei 2021 Sudah 104 Anak Di Semarang Ajukan Dispensasi Kawin,” last modified 2021, accessed March 2, 2022, https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/06/16/hing ga-mei-2021-sudah-104-anak-di-semarang-ajukan-dispensasi-kawin/.

102 Admin, “Ini Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Pernikahan Dini Di Kota Semarang” (Kota Semarang, n.d.), https://semarangkota.go.id/p/2309/ini\_upaya\_dp3a\_tekan\_angka\_kasus\_per nikahan\_dini\_di\_semarang.

Khadik menjelaskan beberapa alasan mengapa angka perkawinan anak meningkat adalah: pertama, perubahan pola hidup masa pandemic yang berpusat pada rumah; kedua, situasi ekonomi yang mengharuskan orang tua konsen mencari nafkah sehingga mengabaikan pengasuhan dan pengawasan terhadap anak sehingga anak bebas mengakses media online dengan konten pornografi dan seks bebas sehingga mereka hamil di luar nikah. Selanjutnya Khalik juga menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi tentang perkawinaan usia dewasa sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 16 tahun 2019 dimana batas usia menikah yakni 19 tahun.

Mengahadapi banyaknya kasus permohonan dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama, Drs. H. Munadi, MH,103 sebagai hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk menangani perkara perkawinan anak dengan proses permohonan dispensasi, menjelaskan banyak hal tentang dilemma dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan. Munadi mengawali penjelasan mengapa harus dia yang menangani masalah permohonan dispensasi. Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya, secara kompetensi semua Hakim berwenang untuk menangami permasalahan perkawinan anak, namun lebih tepat bila hakim yang menangani adalah hakim yang sudah mempunyai sertifikasi penanganan kasus anak, sehingga lebih berkompeten. Di Pengadilan Agama Semarang hingga saat ini, belum ada Hakim yang mempuntai sertifikat anak untuk itu, maka Ketua Pengadilan Agama menilai Hakim yang dirasa mempunyai kapasitas dan berkompeten mengani perkara dispensisasi anak salah satunya adalah dirinya.

103 Wawancara 13 September 2022 di Kantor Pengadilan Agama Semarang

Menurut Munadi, perkawinan anak signiifkan meningkat setelah adanya pandemic Covid-19. Dalam menangani perkara dispensisasi terhadap perkawinan anak berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, khusunya Pasal 1 butir 11 menyebutkan bahwa “Hakim adalah Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah. Dengan dasar hukum tersebut, maka hakim dalam mengani perkara permohonan dispensasi perkawinan anak diselenggarakan dengan hakim tunggal. Sehingga, pertimbangan yang diberikan Hakim dalam amar putusannya betul-betul ikhtiar mandiri berdasar keyakinannya dan fakta-fakta yang ada dalam siding pengadilan.

Selanjutnya Munadi mengatakan bahwa alasan mendasar diajukannya permohonan dispensasi perkawinan anak selama beliau sebagai Hakim terutama di Pengadilan Agama Semarang, hampir 99% alasannya adalah hamil diluar pernikahan. Alasan hamil diluar pernikahan dengan konteks perkara yang bervariasi, misal ***Pertama***, perkawinan anak yang usianya baik perempuan atau laki- laki yang tidak memenuhi persyaratan yaitu 19 tahun dikarenakan sudah hamil***, Kedua,*** permohonan dispensasi sekaligus pengajuan anak karena suami dan istrinya melakukan perselingkuhan dan melahirkan anak, ***Ketiga***, perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang salah satunya tidak memenuhi persyaratan usia perkawinan, namun belum melakukan hubungan suami istri.

Varian konteks perkawinan anak yang diajukan permohonan dispensasi yang berbeda-beda tersebut, membutuhkan penangan yang berbeda-beda juga. Menurutnya, pada kasus alasan yang ketiga tersebut, Hakim mengarahkan dan mempermudah proses persidangan sampai pada penetapannya. Hal ini, dilakukan agar tidak

terjadi hal yang lebih mudharat sehingga lebih mengutamakan kemaslahatan. Pada kasus atau alasan yang pertama dan kedua itu pun menjadi hal yang dilematis maka keputusan yang diambil tetap demi kemaslahatan. Kondisi yang dilematis ini menuntut Hakim tetap memberikan keputusan yang baik untuk kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang (sesuai Pasal 1 butir 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019). Menurut PERMA Nomor 5 tahun

2015, Pasal 1 butir 6 tersebut menegaskan “bahwa kepentingan terbaik anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak”.

Bagi Munadi yang hamper semuanya mengabulkan permohonan dispensasi, jika ada penetapan yang menolak permohonan dispensasi perkawinan, harus dihargai penolakan permohonan tersebut, mungkin tujuannya untuk memberikan pembelajaran atau terapi social bagi masyarakat agar tidak menjadikan alasan kehamilan untuk pemanfaatan hal-hal yang negative. Munadi berprinsip mengambil pertimbangan putusan berdasarkan pada kepentingan terbaik anak yaitu kepentingan “nasab” terhadap anak yang akan dilahirkan. Prioritas aspek kemanusiaan bagi anak dalam perkembangannya.

Dalam menangani kasus permohonan dispensasi, Pengadilan Agama Semarang memiliki MoU dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, sebagai wujud peran dan tugas Pemerintah sesuai kompetensinya dalam rangka menyelesaikan perkawinan anak. Peran tersebut, lebih bersifat represif daripada perventif meskipun secara implikasi tetap ada bagi masyarakat. Pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan sebelum para pihak melakukan pendaftaran.

Di samping permohonan dispensasi, upaya hukum lain yang dapat dilakukan dalam menangani kasus perkawinan anak adalah dengan cara Isbat nikah. Itsbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan siri atau bawah tangan yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilakukan secara sirri atau bawah tangan agar memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat dalam menyelesaiakan masalah perkawinan anak dikarenakan jika sudah menikah secara siri dan mempunyai anak. Menurut Munadi jika menangani Itsbat nikah, hakim harus menetapkan perkawinannya pada pernikahan yang pertama, sehingga anak yang lahir terlindungi secara hukum.

Bagi Munadi sebenarnya eksistensi undang-undang perkawinan seharusnya dapat menekankan angka perkawinan anak, namun yang lebih penting lagi pemerintah seharusnya mengeluarkan regulasi yang mengatur batas usia anak yang dapat menggunakan HP. Hal ini disebabkan banyaknya kasus permohonan dispensasi ini dipengaruhi oleh dampak negarif dari era digitalisasi pada pandemic covid 19, terutama adanya kebijkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis *online.* Sementara masyarakat terutama anak remaja tidak memahami dampak negatifnya, sehingga muncul penyimpangan perilaku seperti seks bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah.

Selain peran Hakim pengadilan agama dalam penanganan hukum yang terkait dengan perkawinan anak, peran lain dilakukan oleh pihak DP3AKB. Menurut Ardian, program-program di DP3AP2KB Jawa Tengah dalam menghadapi tingginya kasus perkawinan anak, tetap ada, meskipun tidak ada program khusus. DP3A2KB Jawa tengah memiliki progran Bersama “*Jo kawin Bocah*” dan kegiatannya lintas sektor untuk membuat gerakan *jo kawin bocah*. Adapun teknis kegiatannya dilounching akhir tahun

2020 setelah dikeluarkannya perubahan umur perkawinan dalam pasal 7 UUP 1974. Karena berbarengan dengan masa Pandemi, sosialisasi memang tidak berjalan maksimal, sehingga DP3AKB akhirnya membuat program “*Jo kawin Bocah”* adapun kegiatan yang dilakukan dalam menangani kasus perkawinan anak ini memang dilaksanakan secara lintas sectoral, sehingga implementasinya di lapangan banyak dilakukan oleh BKKBN.

Tidak hanya hakim, DP3A Kota Semarang dan DP3A2KB Provinsi, namun BKKBN juga banyak berperan dalam menangani permasalahan perkawinan anak terutaman di tingkat provonsi. Menurut Iwan, BKKBN mengupayakan program-program yang mendukung untuk menurunnya angka perkawinan anak.

Secara filosofis, menurut Iwan umur 19 tahun dalam perubahan UU NO 16 Tahun 2019, sebenarnya *nanggung*, mestinya pemerintah lebih tepat meningkatkan umur perkawinan menjadi 21 tahun karena umur kematangan fisik seperti tulang pinggul perempuan yang siap melahirkan adalah setelah berumur 21 tahun.

Iwan menjelaskan, secara nasional sebenarnya sudah mengeluarkan terutama UU No 52 tahun 2009 tentang ketahanan keluarga. Dan jawa tengah sudah mengeluarkan perda yang salah satunya berisi tentang keutuhan keluarga. Beberapa program telah dilaksanakan seperti Genre (Generasi Berencana) yang mensosialisasikan modul *Jo kawin bocah* dan modul lain yang mengarahkan remaja untuk berani berpendapat. Kegiatan Genre dilakukan ke sekolah-sekolah, kampus-kampus dan masyarakat jawa tengah. Adapun meteri yang diberikan adalah seks pra nikah, kespro yang mengajak remaja untuk menikah pada usia matang. Kegiatan lain adalah PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) yang sasarannya anak remaja SMP, SMA dan mahasiswa. Ada juga PIK (Pusat Informasi

Konseling) yang mengadakan kegiatan untuk remaja yang memberikan edukasi tentang kespro, bahaya nafza, life skill yang di jawa tengah digawangi oleh Niko dkk untuk mengkampanyekan usia pendewasaan perkawinan kepada teman-teman sebaya.

Dampaknya dari Genre juga diharapkan memberi materi pendewasaan usia perkawinan. Genre muncul pertama kali tahun 2006 atau 2007, mungkin hasilnya bisa dibandingkan dengan angka kelahiran usia remaja sebelum tahun 2006 dan setelah 2006 yang mungkin menurun. Walaupun naik lagi setelah adanya Pandemi covid-19. Memang BKKBN tidak melakukan monev keberkasilan program menurunan angka perkawinan anak, karena hal tersebut dilakukan oleh Lembaga eksternal yakni Lembaga SDKI (Survai Demografi Kesehatan Indonesia) yang diadakan oleh eksternal Bapennas, UNPA dan Lembaga survei lainnya.

Peran BKKBN adalah sebagai pelaksana program kegiatan yang mengarah pada terciptanya keluarga sejahtera, termasuk di dalamnya adalah program-program penurunan angka perkawinan anak. Diantara program- program yang dilakukan adalah Genre, PIKR dan PIK sebagaimana dijelskan di atas. Disamping itu ada juga dasar- dasar konseling, pemahaman gender diadakan bersinergi dengan BNN, dinas Kesehatan, Kominfo, ulama dan elemen-elemene masyarakat lainnya.

Beberapa kasus dalam menghadapi perkawinan anak memang belum maksimal karena factor-faktor lain yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh kasus di Jepara dimana banyak perkawinan anak dilakukan, ternyata karena ketentuan umur anak kurang disosialisasikan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat yang sudah mempersiapkan perkawinan anaknya tetap dilaksakan walaupun calon mempelai belum berusia 19 tahun. Mereka baru mengetahui

ada peningkatan umur perkawinan ketika mendaftar di KUA. Karena keluarga sudah mempersiapkan kelengkapan pernikahan, akhirnya mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Bagi Iwan, aturan tentang bolehnya dispensasi dan itsbat nikah bukanlah peluang yang mendukung meningkatnya perkawinan anak, karena ada syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Namun demikian bias saja terjadi upaya-upaya yang tidak sesuai ketentuan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sebagai contoh kasus di Jepara terjadi, seorang ibu yang menghendaki anaknya menikah walaupun usianya belum 19 tahun. Ia mengupayakan agar anaknya mendapat dispensasi dengan meminta urin ibu yang hamil agar anaknya mendapat surat keterangan hamil yang dijadikan syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, padahal anaknya tidak hamil.

Iwan menegaskan memang yang paling sulit mengupayakan keluarga ideal dan menurunnya angka perkawinan anak adalah merubah budaya, dari keluarga besar menjadi keluarga kecil. Sama halnya dengan merubah stereotype perawan tua bagi yang menikah di usia dewasa. Hal ini menjadi tantangan bagi kita dan pemerintah untuk merubah strereotype dengan mengupayakan kesadaran hukum dan pemahaman-pemahaman positif, agar stereotype tidak lagi difahami sebagai kebenaran. Adapun upaya yang efektif dilaksanakan adalah sosialisasi dan edukasi melalui medsos, karena era-nya adalah era teknologi.

Upaya lain yang dilakukan oleh eleman pemerintah adalah dilakukan oleh MUI, walaupun cenderung belum masimal dilakukan. Menurut Sri Suhandjati, anggota MUI Provinsi Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, menjelaskan bahwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah lembaga swadaya masyarakat yang menjadi media bagi

ulama, zuama, cendekiawan Islam Indonesia dalam berkhitmad kepada bangsa dan Negara Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Adapun tugas MUI adalah membimbing, membina dan mengayomi umat muslim di seluruh Indonesia.

Menurut Ketua MUI Pusat Prof. Noor Achmad, tugas MUI sebagai himayatul ummah (pelindung umat), khadimul ummah (pelayan umat) dan shodiqul hukumah (mitra pemerintah).104 MUI sebagai mitra pemerintah berupaya menciptakan sinergitas yang kuat dalam berbagai kegiatan yang strategis termasuk salah satunya dalam hal pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini (pernikahan yang tidak berdasarkan ketentuan usia yang ditentukan UUPerkawinan).

Selama ini Suhandjati menjabat sebagai Ketua 1 bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga. Adapun tugas bidang perempuan, remaja dan keluarga pada dasarnya sama dengan tugas MUI pada umumnya yaitu memberikan solusi (membimbing, membina dan mengayomi) dalam mengatasi problem yang dihadapi masyarakat terkait dengan persoalan agama dan kehidupan. Menurut Beliau, perkawinan anak atau lebih familiar dengan istilah pernikahan dini merupakan problem masyarakat (terutama di daerah pedesaan) yang tidak ada akhirnya hingga sekarang di era mileneal.

Suhanjati berpendapat bahwa, dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara kuantitatif, seakan-akan ada angka penurunan dalam perkawinan anak namun di beberapa daerah masih saja

104 [https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/semarang/pengurus-mui-](https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/semarang/pengurus-mui-jateng-periode-2021-2026-dilantik/) [jateng-periode-2021-2026-dilantik/,](https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/semarang/pengurus-mui-jateng-periode-2021-2026-dilantik/) 18 juli 2021

sering terjadi, setidaknya masih terjadi perkawinan dini dengan berbagai motivasinya.105

Selanjutnya, Suhandjati berpandangan terkait perkawinan anak yg kurang berumur dari 19 th bagi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain historis, sosial, budaya dan agama. Oleh karena, beliau representasi dari MUI bidang perempuan, remaja dan keluarga maka pendekatannya lebih kepada aspek agama. Berdasarkan surat An-Nur ayat 32 yang terjemahannya “Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Alloh akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Alloh Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui”. Inti dari ayat tersebut secara kontekstual adalah perintah untuk menikahkan orang yang membujang dan layak menikah, sebagai salah satu cara memelihara kesuciaan nasab, agar hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bahkan mendatangkan keberkahan.Dari surat tersebut, secara tekstual sama sekali tidak ada *statemen* atau tanpa adanya batas umur. Terlebih melihat tujuan pernikahan menurut agama Islam yang tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*).” Dan, salah satu tujuan pernikahan untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan.

105 Wawancara dengan Prof.Sri Suhandjati,MAg, tg 2 September 2022 jam 11.00

Secara historis dan agama, Rosul menikah dengan Aisyah saat berumur 6 tahun, namun demikian beliau hidup bersama pada saat Aisyah berumur 9 tahun .Umur tersebut secara medis sudah menstruasi, kondisi saat itu, menentukan status baligh seseorang perempuan dengan keluarnya haid atau menstruasi dan seorang laki-laki dengan mimpi basah (ihtilam). Islam mendasarkan usia kematangan seseorang untuk menikah yaitu melalui kedewasaan fisik dan mental, kondisi itulah yang menunjukkan ukuran kedewasaan dan mempunyai kemampuan untuk berreproduksi secara medis. Bahkan beberapa ulama fiqh, seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baliq bagi seorang laki-laki adalah berusia 19 tahun sedangkan perempuan 17 tahun. Berbeda lagi dengan ulama besar Imam Syafii yang mengatakan bahwa baik untuk laki-laki maupun perempuan sama-sama 15 tahun.

Dengan kondisi demikian, Suhandjati menegaskan ada perbedaan dalam memahami usia pernikahan, sehingga perlu adanya ijtihad untuk memahami kondisi dan konteks “baliq” di masa sekarang dan pada masa Rosul. Keberadan teknologi- informasi dan era digitalisasi yang secara massif memberikan pengaruh terhadap kematangan biologis seseorang, bahkan pendapat ulama fiqh mengatakan “semakin muda masa baliqnya kematangan biologisnya semakin muda”. Kemudian Beliau mengatakan, ketika pengaruh negative semakin banyak maka semakin berdampak buruk pada perkembangan anak terutama dalam menerima tanggungjawabnya.

Pada dasarnya, Suhanjati sependapat dengan aturan atau regulasi tentang perkawinan anak yang diamandemen menjadi 19 tahun untuk perempuan, sehingga ketentuan usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama

19 tahun. Ketentuan tersebut termuat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudan mencapai usia 19 Tahun (sembilan belas tahun)”. Dan, di dalam ayat 2 disebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana disebut pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Namun, menurut Suhanjati, tetap harus ada terobosan dari Pemerintah untuk memfasilitasi bagi seseorang yang mengalami kondisi tertentu misalnya menikah siri atau dibawah tangan, *married by accident* (kehamilan diluar nikah) dan sudah terfasilitasi dengan Pasl 7 ayat 2 UU Perkawinan tersebut di atas. Hal ini dikarenakan didaerah tertentu yang masih kuat budayanya terutama relasi kuasa (orang tua dan anak) memandang anak yang usianya belum 19 th dan belum menikah rata-rata orang tuanya gelisah, mereka lebih kuat mengacu pada agama yang tidak berbasis batasan usia perkawinan maka regulasi tersebut harus menyedikan terobosan yaitu dispensasi dengan respon yang positif artinya tetap ada persyaratan dalam implementasinya. Sehingga tidak menjadi kemudahan dalam penyimpangan norma-norma dalam undang-undang perkawinan. Dengan tetap mensosialisasikan eksistensi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Lebih lanjut, Suhanjati mengatakan secara tekstual pemerintah sudah tepat berupaya meningkatkan usia perkawinan, namun dibutuhkan kajian secara komprehensif untuk meminimalisir derasnya pengaruh digitalisasi (video, foto porno). Sehingga tidak terjadi kontroversial satu sisi pemerintah mencegah pernikahan dini dengan aturan tetapi

sisi lain pemerintah membiarkan derasnya pengaruh buruk dari informasi dan teknologi merusak alam pemikiran anak yang belum dewasa kondisi fisik dan mentalnya. Untuk itu harus ada sinergitas kebijkan pemerintah di masing-masing institusi missal DPR dan Kominfo. Derasnya teknologi informasi di era digitalisasi ini, Pemerintah harus responsive dan bijaksana tidak hanya melihat umur tanpa melihat keberadaan social budaya yang sudah bergeser mengikuti perkembangan jaman. Para remaja harus diberikan penguatan dari sisi teknis dan etika berbudaya digital yang postif dalam menghadapi era milineal yang serba digitalisasi, ini juga merupakan tugas pemerintah selain keluraga sebagai benteng yang utama. Sinergitas Pemerintah melalui DPR, kominfo dan lembaga terkaita lainya harus mendasarkan pada studi komparatif dalam mengatasi problem batas usia perkawinan.

Program yang dimiliki MUI khususnya bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga antara lain program sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dengan *stakeholders* ketua komisi perempuan, remaja dan keluarga di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah misal perkawinan muda ditinjau dari aspek agama , ekonomi dan kesehatan. Bahkan pada saat pandemic dilakukan secara online, dengan tag land MUI “ikhlas memberikan tenaga dan pikiran untuk membantu program pemerintah”. Sedangkan mitra MUI bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga abtara lain BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, PKK. Dalam pelaksanaanya sosialisasi dapat secara bersama- sama dengan lembaga terkait atau sendiri,

Menurut penilaian Prof.Sri Suhandjati yang didasarkan pada pengamatan bukan penelitian, aspek social budaya masih cukup kuat mendominasi problem pernikahan dini atau pernikahan anak. Aspek –aspek tersebut antara lain peran agama, relasi kuasa, ekonomi, era digitalisasi dan

peran pemerintah yang kurang komprehensif dalam merespon problem tersebut. kondisi tersebut, memunculkan pernikahan dibawah tangan, pernikahan siri, pernikahan *married by accident* (hamilan diluar nikah), dan bahkan mungkin terjadi perkawinan kontrak dll.

Program yang dilakukan MUI bidang Perempuan, remaja dan keluarga bersifat koordinatif dan normative (pemberian substansi dari materi hukum dan terutama agama), sedangkan MUI Kabupaten/Kota bersifat teknis jadi yang melakukan evaluasi MUI Kabupaten/Kota dan yang mempunyai alokasi anggaran cukup memadai secara teknis dan administrative.

Secara tegas Beliau mengemukakan, bahwa program tersebut direspon secara positif di Kabupaten /Kota. Adapun, dampak program yang dilakukan dapat dikategorikan dalam dampak positif dan negative, dampak positif program tersebut, memberikan pemahaman hukum tentang aturan undang-undang perkawinan kepada masyarakat kabupaten/kota khususnya perubahan batas usia pernikahan menurut UU Perkawinan. Sedangkan dampak negatifnya menimbulkan pemahaman yang kontroversial antara-aturan pemerintah dan budaya yang masih kental di masyarakat (karena perubahan usia menikah dari 16 th menjadi 19 th), misal muncul kawin siri atau kawin dibawah tangan karena sudah usia lanjut menurut lingkungan sekitar, kawin kontrak, *married by accident*. Dan ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program, karena belum terwujud secara maksimal. Terlebih adanya pemahaman formulasi hukum dalam Pasal 7 ayat 2 dan konstruksi agama serta budaya di masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini MUI Kabupaten/Kota sangat responsive menerima dan mendesiminasikan kelingkungannya baik secara formal maupun tidak dalam berbagai pertemuan. Dan bahkan, harapan MUI sosialisasi

tersebut dapat menjadi virus porsitif tidak hanya untuk orang tua saja tetapi juga madrasah, pesanteren dan sekalah- sekolah umum (SMA dan SMP) melalui desiminasi berbagai pihak.

Upaya yang dilakukan MUI bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga secara internal melakukan diskusi terkait perkawinan anak, secara eksternal melakukan koordinasi MUI memberikan masukan-masukan (sharing pengalaman) kepada MUI Kabupaten/Kota. Upaya ini menjadi ikhtiar dan sumbangsih MUI bidang perempuan, remaja dan keluarga sebagai lembaga maupun manusia yang hidup di Negara Indonesia tercinta.

# Perkawinan anak di Jawa Barat (Kabupaten Indramayu)

Perkawinana anak di Jawa Barat pada tahun 2020, menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia, dengan jumlah perkawinan anak sebanyak 11,48 persen. Keadaan tersebut menstimulus pemerintah Jawa Barat untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak yang disahkan tanggal 10 Februari Tahun 2021.

Dalam hal yang terkait perkawinan anak dijelaskan dalam pasal 41 huruf e,f,g yang berbunyi bahwa pemerintah wajibmelakukan: (e) “pencegahan terjadinya perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;” (f). “pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi Anak yang mengalami perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;” (g). “advokasi penanganan perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak.”

Perkawinan anak di Jawa Barat yang dalam penelitian ini diwakili oleh sampel Kabupaten Indramayu, adalah

karena fenomena menarik terjadi di Indramayu. Indramayu merupakan daerah yang tidak hanya dikenal dengan realitas maraknya perkawinan anak, tetapi juga perceraian anak.

Di Kabupaten Indramayu, seperti halnya di Kecamatan Cikedung, yang berada di tengah-tengah antara Indramayu bagian Barat dan bagian Timur, fenomena perkawinan anak marak terjadi. Letaknya yang strategis dan di tengah-tengah membuat kecamatan Cikedung memiliki warna budaya yang tidak condong ke Indramayu bagian Barat maupun Timur. Indramayu sendiri memiliki corak masyarakat yang cukup unik, berada diantara akulturasi budaya Sunda dan Jawa. Dengan keunikannya yang menarik untuk diteliti, Indramayu justru terkenal dengan sebutan RCTI (Rangda Cilik Turunan Indramayu), yang jika diterjemahkan secara bebas kedalam Bahasa Indonesia artinya Janda Muda Ke turunan Indramayu. Sebutan tersebut muncul dikarenakan kebiasaan menikah muda dan juga angka perceraian yang tinggi di Indramayu.

Menurut Mustamid (Kepala Kantor Urusan Agama Cikedung), fenomena perkawinan anak d merupakan hal yang tidak asing di daerah Indramayu. Oleh karena itu, adanya revisi terhadap batas usia minimum untuk dapat melakuakan pernikahan yang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kemudian menjadi

19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu pembaharuan hukum yang tepat.106 Adanya penambahan usia sebagai batas minimum untuk dapat melakukan perkawinan dapat memberikan ruang bagi

106 Wawancara dengan Mustamid, tanggal 18 Agustus 2022.

masyarakat untuk memilih melangsungkan perkawinan di usia yang ideal.

Namun, menurut Mustamid S.Ag., masyarakat di Indramayu sendiri belum sepenuhnya dapat menerima adanya revisi undang-undang tersebut. Pemikiran masyarakat yang sebagian masih kolot kerap menganggap bahwa batas minimum usia pernikahan khususnya bagi perempuan yang saat ini 19 tahun dinilai terlalu lama. Hal tersebut disebabkan karena fenomena menikah muda bagi masyarakat Indramayu telah mengakar, sehingga kebanyakan masyarakat baik itu orang tua maupun dari sisi sang anak masih berkeinginan menikah di usia muda. Sehingga adanya revisi terhadap undang-undang perkawinan mengenai batas usia minimum untuk menikah dinilai menjadi kendala tersendiri untuk dapat mewujudkan itikad baik tersebut. Sebab, masyarakat yang awam masih beranggapan bahwa tidak ada batas usia minimal untuk dapat menikah. Sebagaimana dalam syari’at Islam, sepanjang kedua calon mempelai sudah baligh maka keduanya diperbolehkan untuk menikah, yang mana perempuan dinilai sudah baligh ketika mnginjak usia 9 tahun sementara bagi laki-laki 15 tahun.

Dalam merespon permohonan pencatatan nikah bagi masyarakat yang usianya belum memenuhi batas minimum usia perkawinan, pihak KUA tidak lantas menutup rapat akses dan tidak melayani permohonan tersebut. Melainkan permohonan tersebut tetap dilayani dengan prosedur sebagai berikut:

1. Masyarakat yang berkehendak untuk menikah menyampaikan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempet dengan melampirkan identitas terkait, seperti akta kelahiran, ijazah, Kartu Keluarga (KK), dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Berdasarkan data identitas tersebut, pihak KUA akan mengidentifikasi apakah calon pengntin telah memenuhi batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Apabila kedua mempelai telah memenuhi prasyarat tersebut, maka perkawinan diizinkan dan dilanjutkan dengan proses pembuatan Buku Nikah. Namun, jika salah satu atau kedua calon pengantin belum memenuhi persyaratan batas usia minimum untuk menikah, maka KUA akan memberikan surat penolakan melangsungkan pernikahan;
3. Orang tua atau wali dari Calon Pengantin yang usianya belum memenuhi prasyarat menikah menyampaikan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama daerah setempat berdasarkan surat penolakan dari KUA. Terkait dengan pemohon dispensasi kawin yang kurang memahami prosedur permohonan hingga tahap sidang, biasanya akan dibantu oleh perangkat desa setempat untuk berperkara di Pengadilan;

4. Apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan, maka calon pengantin tersebut dapat meneruskan kehendaknya untuk menikah setelah menyertakan surat pengabulan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama kepada Kantor Urusan Agama. Namun, jika permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan dan harus menunggu usianya cukup untuk dapat melakukan pernikahan.107

Adanya prosedur untuk melakukan dispensasi kawin tidak lantas menyurutkan keinginan masyarakat untuk melakukan perkawinan anak. Prosedur dispensasi kawin yang harus dilalui untuk mendapat izin menikah justru

107 Wawancara dengan Mustamid, S. Ag (Kepala KUA Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu), 18 Agustus 2022.

menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indramayu, karena telah patuh dalam mengikuti mekanisme yang dianjurkan, dan pada akhirnya pernikahan tersebut dapat dicatatkan secara legal oleh negara. Menurut Ani108 (Pejabat Pengawas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, hal tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa masyarakat Indramayu telah berangsur sadar hukum. Sehingga, segala tindakan hukum yang dilakukan selalu diupayakan untuk memperoleh legalitas dari negara. Merujuk pada ungkapan Ani, S.Pd. tersebut, maka tak ayal jika Kabupaten Indramayu mendapat titel sebagai daerah dengan angka perkawinan anak dan angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Sebab, tindakan hukum baik perkawinan maupun perceraian tersebut selalu diupayakan untuk dicatatkan di negara.

Namun demikian, tidak semua perkawinan anak yang dilakukan telah melalui proses dispensasi di Pengadilan Agama, sehingga perkawinan tersebut dapat segera dicatatkan. Sebagian masyarakat juga ada yang memilih melakukan pernikahan di bawah tangan untuk dikemudian hari melakukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama. Alasan dipilihnya itsbah nikah tersebut beragam, menurut Drs. Djahidin dalam salah satu artikelnya yang dipublish dalam badilagmahkamahagung.go.id, beberapa alasan dilakukan itsbath nikah adalah sebagai berikut:

1. Karena kelalaian dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ditugaskan di tingkat Kelurahan atau Kenagarian, yang tidak melaporkan perkawinan yang mereka laksanakan ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, walaupun mereka (calon

108 Wawancara dengan Ani, S.Pd (Pejabat Pengawas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung), tanggal 18 Agustus 2022

pengantin) telah memenuhi persyaratan Administrasinya;

1. Saat sepasang calon mempelai bersama walinya, karena sesuatu dan lain hal memaksakan diri untuk dinikahkan oleh/di hadapan seorang Ulam atau seorang mantan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang sekarang tidak bertugas lagi;
2. Saat sepasang calon Mempelai bersama Wali nikahnya telah mendaftarkan diri ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun karena kekurangan syarat Administrasi bagi salah seorang calon mempelai perkawinan, sehingga Pegawai Pencacat Nikah pada Kantor Urusan Agama tidak mau menikahkan terlebih mengeluarkan Buku Nikah sehingga kedua mempelai tetap menghadap ke Ulama untuk menikahkannya meskipun tidak memperoleh Buku Nikah.109

Kendati perkawinan anak merupakan fenomena yang lazim ditemui di Indramayu, namun pihak KUA juga menyadari bahwa fenomena tersebut merupakan hal yang perlu dicegah untuk menghindari dampak buruk pasangan yang belum siap untuk berumah tangga dikemudian hari. Oleh karenanya, KUA Cikedung memiliki strategi tersendiri untuk menekan tingginya angka perkawinan anak di Indramayu umumnya, dan di kecamatan Cikedung khususnya. Strategi tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi secara tertutup kepada masyarakat di berbagai kalangan. Sosialisasi tertutup dilakukan dengan menyampaikan pemahaman tentang arti penting pernikahan

109 Drs. Djahidin*, Itsbat Nikah dan Permasalahannya*, diakses melalui [https://badilag.mahkamahagung.go.id/,](https://badilag.mahkamahagung.go.id/) h. 1, diakses pada 22 Agustus 2022.

dan perlunya persiapan yang matang untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan kekal. Penyampaian tersebut dilakukan oleh Penyuluh yang ditugaskan oleh Kantor KUA Cikedung, baik penyuluh PNS maupun penyuluh non PNS. Untuk penyuluh non PNS sendiri, kepala KUA Cikedung telah bekerja sama dengan tokoh agama setempat baik Ustad, Kyai, Guru Agama, maupun Lebe (Amil) dari perangkat desa yang kerap mengisi acara-acara keagamaan tertentu. Dalam acara keagamaan yang biasanya berbentuk Majelis Ta’lim, Pengajian, Kegiatan rutin tempat ibadah, maupun kegiatan kemasyarakatan yang mendatangkan banyak masa seperti Adat Istiadat Desa dan Hajatan terutama dalam rangka perkawinan, para penyuluh tersebut akan memberikan ceramah yang didalamnya mengandung substansi untuk melangsungkan pernikahan di usia yang ideal.110

Mustamid, bersumsi bahwa sosialisasi secara tertutup tersebut efektif untuk menekan angka perkwinan anak di Indramayu. Sebab, jika dilihat dari budaya masyarakat yang masih kaku dalam menerima pengetahuan yang kurang selaras dengan pandangan yang dimiliki, maka penyampaian melalui kegiatan agama dan kemasyarakatan cenderung lebih mudah diterima. Selain itu, sosialisasi secara tertutup juga dipilih karena tidak memakan terlalu banyak biaya. Sebab, menurut Mustamid, anggaran yang dialokasikan kepada Kantor Urusan Agama tidak cukup untuk melaksanakan program-program sosialisasi secara terbuka dengan acara yang terkonsep sedemikian rupa. Adanya benturan terhadap anggaran tersebut membuat KUA harus dapat menyampaikan pencegahan perkawinan anak dengan cara yang lebih fleksibel dan tidak memerlukan dana yang besar.

110 Wawancara dengan Mustamid, 18 Agustus 2022.

Hal senada diungkapkan Susianti. selaku Kepala Sie. Perlindungan Anak DISDUK-P3A Indramayu.111 Menurutnya, perkawinan anak merupakan fenomena yang sejatinya bertentangan dengan pemenuhan hak perlindungan bagi anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 6 menyatakan bahwa, “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.” Pengejawantahan dari amanah undang-undang tersebut seyogyanya diwujudkan dengan memberikan akses pendidikan yang terbaik bagi anak sehingga terhindar dari perkawinan dini di usia anak-anak yang disebabkan oleh minimnya akses pengetahuan bagi anak.112

Bertitik tolak pada bunyi pasal tersebut, Susianti, selaku Kepala Sie. Perlindungan Anak DISDUK-P3A Indramayu sangat mengapresiasi adanya revisi terhadap batas usia minimum untuk melakukan perkawinan yang sebelumnya 16 tahun bagi perempuan, kemudian diubah menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Kendati menyetujui, menurut Susianti, batas usia minimum tersebut masih terlalu dini untuk seseorang melakukan perkawinan. Sebab, ditinjau dari kesiapan organ reproduksi manusia terutama perempuan yang akan melakukan tindakan-tindakan vital seperti hamil dan melahirkan, belumlah siap pada usia 19 tahun. Menurut Agung Aliwijaya, S.Ked., pada usia 12-20 tahun, organ reproduksi wanita masih berkembang dan diharapkan ketika sel-sel pada leher rahim ini sedang aktif, tidak ada benda asing yang masuk ke dalam liang vagina, misalnya penetrasi

111 Wawancara dengan Susianti, S.Psi., M.Psi. selaku Kepala Sie. Perlindungan Anak DISDUK-P3A Indramayu, tanggal 19 Agustus 2022

112 Wawancara dengan Susianti, S.Psi., M.Psi., 19 Agustus 2022.

penis. Penetrasi benda asing seperti penis berpotensi menyebabkan virus bisa masuk ke dalam liang vagina.113

Sementara itu, proses reproduksi yang terjadi melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 20 tahun sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi yang meliputi kesehatan seksual yang menuju pada peningkatan kualitas hidup dan relasi antar individu. Dalam konteks pengembangan manusia, pelayanan kesehatan reproduksi merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan kesehatan reproduksi berdampak pada kualitas hidup seseorang pada generasi berikutnya. Seseorang bisa menjalankan peranan serta proses reproduksi secara aman dan sehat bisa terlihat dari bagaimana kondisi kesehatan selama siklus hidupnya, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga masa pasca usia reproduksi.114 Belum matangnya organ reproduksi dan juga kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga akan berpengaruh terhadap resiko jika seorang remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Kemungkinan kecacatan pada anak, ibu mati saat melahirkan dan resiko lainnya juga sangat besar ketika perkawinan usia dini terjadi. Selain itu, leher rahim seorang remaja perempuan juga masih sensitif. Oleh karena itu, jika dipaksakan untuk hamil, berisiko mengalami kanker leher rahim di kemudian hari, bahkan lebih parahnya ialah peluang resiko kematian saat melahirkan juga menjadi besar pada usia muda. Hal lain yang dapat terjadi ketika remaja perempuan hamil, adalah remaja perempuan akan lebih mudah tersebut menderita anemia selama masa kehamildan dan saat melahirkan. Minimnya pengetahuan mengenai resiko yang

113 Agung Aliwijaya, “Kesiapan Reproduksi Wanita Bagi Yang Ingin Menikah Muda,” *Skata*, 2018, https://skata.info/article/detail/190/kesiapan- reproduksi-wanita-bagi-yang-ingin-menikah-muda. diakses tanggal 22 Agustus 2022

114 Sarwono, 2001

ada dan bisa terjadi saat seorang anak dengan usia yang belum siap ketika melakukan hubungan badan, mengandung dan juga melahirkan yang menjadi salah satu faktor pula tingginya angka pernikahan usia dini.115

Kondisi sebagian masyarakat yang berangkat dari latar belakang ekonomi dan jenjang pendidikan yang rendah kerap menjadi pemicu utama terjadinya perkawinan di usia anak- anak. Pada umumnya, kondisi lingkungan menyebabkan kematangan mental dan emosional seseorang menjadi berbeda-beda. Sehingga, pencegahan perkawinan anak di Indramayu pun tidak dapat dipukul rata. Pada kondisi-kondisi tertentu, seseorang diharuskan menikah padahal belum siap dari banyak aspek, penyebab yang paling sering dijumpai adalah sebab hamil di luar nikah. Apabila peristiwa tersebut terjadi, maka baik orang tua maupun pelaku lazimnya segera menempuh jalan dengan menikah. Maka, dalam kondisi darurat seperti demikian, kematangan mental dan emosional kerap kali diacuhkan. Oleh karenanya, terdapat program Pelatihan bagi Catin (Calon Pengantin) di Kabupaten Indramayu untuk melatih kesiapan pasangan dalam menghadapi pernikahan.

Dalam rangka meminimalisir tindak pelanggaran dan kejahatan terhadap anak, DISDUK-P3A menginisiasi program yang bernama PATBM yang merupakan kependekan dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di tingkat desa. Program tersebut berisi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Undang- Undang Perlindungan Anak, penghentian kekerasan pada anak, pencegahan pernikahan dini, pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, serta hal-hal lainnya yang

115 Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 43.

berksangkutan dengan anak. Program tersebut merupakan program DISDUK-P3A yang setiap tahun senantiasa diperbaharui dan dievaluasi. Pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan sistem *rolling.* Apabila pada tahun tertentu DISDUK-P3A telah melakukan program pembinaan terhadap beberapa desa, maka tahun berikutnya program tersebut diselenggarakan pada beberapa desa lainnya yang berbeda. Sistem pergantian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang memang dialokasikan untuk pemebuhan hak-hak anak pada DISDUK-P3A.

Program PATBM dilaksanakan dengan memberikan pengarahan secara terpadu kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Indramayu, program tersebut juga dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan khususnya SMA sederajat karena sangat rawan terjadi pelanggaran dan kejahatan baik sesama anak maupun dari orang tua dan orang dewasa kepada anak. Tujuan dari adanya program PATBM yakni diharapkan Pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha, dan media massa, termasuk kelompok anak melakukan berbagai upaya dalam membangun pemahaman yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, dengan memastikan bahwa:116

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

116 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM),” last modified 2016, h.2 https[://www.](http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/98dff-pedoman-patbm.pdf)kem[enpppa.go.id/lib/uploads/slider/98dff-pedoman-patbm.pdf](http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/98dff-pedoman-patbm.pdf) . Diakses tanggal 24 Agustus 2022

1. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Berdasarkan tujuan tersebut, program PATBM memiliki beberapa payung hukum, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Merujuk pada payung hukum tersebut, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mendefinisikan PATBM sebagai sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru.

Adanya program PATBM yang diselenggarakan oleh DISDUK-P3A di Indramayu juga berdampak baik untuk pencegahan perkawinan anak. Susianti, S.P.Psi., M.Psi. menyampaikan bahwa penyelenggaraan program PATBM di Indramayu juga dilengkapi dengan adanya Tim Lapangan. Mekanisme kerja Tim Lapangan tersebut adalah merespon adanya aduan dari masyarakat yang memang *urgent* dan perlu penanganan segera. Maka, Tim Lapangan akan secepatnya menuju lokasi peristiwa. Adanya Tim Lapangan membuat jangkauan DISDUK-P3A menjadi lebih luas untuk menangani aduan dari masyarakat. Luasnya kabupaten Indramayu tidak menjadi kendala untuk mewujudkan perlindungan yang terpadu terhadap anak. Menurut penuturan dari Susianti, S.P.Psi., M.Psi., dalam merespon perkawinan dini di Indramayu, DISDUK-P3A sempat melakukan pencegahan di salah satu daerah yang ada di Indramayu, sebab menerima aduan dari tetangga sang anak yang akan dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya. Pencegahan tersebut dilakukan tidak secara represif, namun melalui penyampaian yang dapat membuka pemahaman orang tua dan juga keluarga sang anak, bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan kedua pihak, dan seyogyanya dilakukan pada saat usia sang anak telah memenuhi prasyarat dari Undang-Undang.

Berdasarkan gambaran tersebut, maka efektifitas dari adanya program PATBM yang diselenggarakan oleh DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu sangat dirasakan manfaatnya. Dengan adanya penjangkauan terhadap masyarakat oleh DISDUK-P3A, masyarakat mulai berangsur berani mengadukan adanya tindak pelanggaran maupun kejahatan yang menimpa anak-anak kepada DISDUK-P3A. Dengan demikian, DISDUK-P3A menjadi lebih maksimal dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak-anak di Indramayu berdasarkan amanah Undang-Undang

Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut juga termasuk menghindarkan anak-anak di Indramayu dari tindakan diskriminatif yang membuat anak-anak tersebut harus menikah di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga pengejawantahan dari undang-undang Perlindungan Anak untuk mewujudkan hak berekspresi dan mengembangkan minat serta bakatnya sesuai dengan usianya dapat diwujudkan.

Sejatinya perkawinan merupakan sakralisasi hubungan antar manusia yang dikokohkan tidak hanya oleh keyakinan sepasang insan, namun juga kondisi lingkungan yang melingkupinya. Hal ini sebagaimana diungkapkan Tokoh agama Kabupaten Indramayu, Edi Fauzi.117 Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal tersebut membutuhkan persiapan yang matang sebelum dilakukannya perkawinan. Menurut Edi Fauzi, S.IP., selaku tokoh agama yang menaungi organisasi Gerakan Pemuda Ansor di Indramayu, persiapan tersebut salah satunya adalah dengan memanfaatkan masa muda dengan efisien.118 Masa muda merupakan saat yang tepat bagi seseorang untuk mengeksplorasi dirinya sesuai minat dan bakat yang didambakannya sebelum menginjak jenjang pernikahan.

Regulasi mengenai batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diakomodir oleh

117 Wawancara dengan Edi Fauzi, Tokoh Ansor Kabupaten Indramayu, tanggal 22 Agustus 2022.

118 Wawancara dengan Edi Fauzi, S.IP., 22 Agustus 2022.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang telah merevisi batas usia tersebut sehingga menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu langkah yang tepat. Apabila dilihat dari perspektif masyarakat Indramayu, yang mana peristiwa perkawinan anak telah banyak terjadi, maka adanya revisi terhadap batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut diharapkan dapat melerai masifnya angka perkawinan anak di Indramayu.

Fenomena perkawinan anak di Indramayu dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu:

1. Taraf pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah.

Indramayu merupakan daerah yang terkenal sebagai lumbung padi nasional. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat Indramayu berprofesi sebagi petani maupun buruh tani, yang mana rata-rata masyarakat Indramayu memiliki ladang sawah sebagai sumber pendapatan. Fenomena tersebut membuaat sebagian masyarakat di Indramayu tidak terlalu mementingkat jenjang pendidikan. Mayoritas masyarakat di Indramayu hanya menganggap pendidikan hanya sebatas mampu melakukan kegiatan membaca, menulis, dan menghitung. Padahal, lebih jauh dari pada itu, pendidikan diperlukan sebagai pembuka cakrawala untuk dapat menjangkau ilmu pengetahuan yang sangat luas dan kompleks. Urgensi pendidikan tidak hanya untuk menjadikan seseorang memiliki gelar maupun penghargaan, lebih penting dari itu, pendidikan merupakan langkah paling strategis untuk dapat memanusiakan manusia.119

119 Dwi Wijayanti, “Pendidikan Yang Memanusiakan Manusia (Konsep Karakter Warga Negara Ideal Ki Hadjar Dewantara),” in *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-II: Penguatan Kajian Isu-Isu Aktual Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Dan Non Pendidikan* (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, 2017), 8,

Taraf pendidikan di Indramayu yang tergolong rendah membuat masyarakatnya tidak terbuka untuk menerima pemahaman bahwa pernikahan harus disiapkan pada usia yang ideal. Sehingga selama ini angka perkawinan anak di Indramayu relatif meningkat.

1. Tingkat perekonomian masyarakat yang rendah.

Ekonomi menjadi faktor yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk dalam hal perkawinan. Tingkat perekonomian yang rendah menjadikan masyarakat beranggapan bahwa anak perempuan merupakan aset yang dapat menghasilkan harta, oleh karenanya tidak sedikit anak perempuan di Indramayu yang dinikahkan oleh orang tuanya tanpa dilandasi keinginan dari diri sang anak itu sendiri.

Di samping itu, rendahnya taraf perekonomian juga mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan bagi masyarakat. Perekonomian yang rendah menjadikan efek domino dalam beberapa aspek kehidupan, sehingga peningkatan taraf perekonomian juga perlu diperhatikan sebagai langkah untuk mencegah peningkatan angka perkawinan anak.

1. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi

Kesadaran hukum masyarakat Indramayu yang relatif tinggi justru menjadi salah satu faktor pendorong tingginya angka perkawinan anak di Indramayu. Hal tersebut dikarenakan setiap perkawinan yang dilakukan baik oleh masyarakat yang usianya telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang maupun yang belum memenuhi selalu diupayakan untuk dicatatkan secara resmi kepada negara. Oleh karenanya, menurut data yang tercatat

https://journal.ustjogja.ac.id/pendidikan-yang-memanusiakan-manusia- konsep-karakter-warga-negara-ideal-ki-hadjar-dewantara/.

baik di Kantor Urusan Agama maupun di Disdukcapil, angka perkawinan anak di Indramayu tergolong tinggi.

Faktor kesadaran hukum masyarakat Indramayu yang tinggi tidak lantas membenarkan tindakan menikah dini. Menurut Edi Fauzi, terdapat beberapa dampak buruk dari segi sosial atas dilakukannya tindakan perkawinan anak, dampak tersebut yakni:120

1. Mengurangi tingkat keharmonisan dalam keluarga Tingkat harmonisasi diantara anggota keluarga dapat berkurang karena perkawinan dilakukan pada saat emosi dan mentals seseorang belum stabil. Hal tersebut seiring dengan kurangnya kesuapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-isteri tersebut. Kesiapan masing- masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang parempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
2. Kurang berkembangnya kualitas diri seseorang

Usia anak-anak merupakan masa perkembangan intelektualitas dan emosianal yang sangat aktif. Apabila pada usia tersebut anak-anak dihadapkan pada perkawinan, maka itu akan berpengaruh pada perkembangan kualitas dirinya. Perkembangan kualitas diri sangat tepat jika didukung dengan lingkungan yang suportif. Sementara itu, dalam hubungan perkawinan banyak problematika yang hadir, seringkali persoalan tersebut merupakan persoalan yang seyogyanya dihadapi oleh orang yang telah berusia dewasa. Sehingga,

120 Wawancara dengan Edi Fauzi, S.IP., 22 Agustus 2022.

timbulnya peroblematika tersebut akan menghambat perkembangan diri seseorang.

1. Berpotensi menimbulkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Perkawinan pada usia anak-anak pada umumnya terjadi tanpa persiapan yang matang selama masa pra- perkawinan. Akibatnya, pasangan yang menikah pada usia dini belum siap untuk menghadapi persoalan yang muncul setelah menikah, termasuk mengatur tingkat emosionalnya. Hal tersebut pada galibnya akan memicu terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini umumnya terjadi kepada istri dan juga anak yang lahir hasil perkawinan tersebut. Untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, pasangan suami istri harus dapat meredakan amarah yang terpacu pada saat menghadapi peristiw tertentu. Oleh karenany, persiapan yang matang sebelum menikah menjadi urgensi yang perlu dimaksimalkan.

Dalam mencegah terjadinya perkawinan anak yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan dampak buruk sebagaimana disebutkan di atas, maka tokoh agama Indramayu yang meliputi tokoh agama Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan Gerakan Pemuda Ansor menginisiasi adanya program sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. Sosialisasi tersebut sedianya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seminar yang mendatangkan ahli-ahli baik dari tokoh agama maupun ahli kesehatan. Dalam hal ini, sosialisasi tersebut menitikberatkan pada pemahaman mengenai dampak sosial serta dampak fisik yang akan terjadi akibat dilakukannya perkawinan anak.

Adanya program sosialisasi dalam bentuk seminar tersebut dinilai efektif, sebab menurut Edi Fauzi S.IP., program yang memang ditargetkan terhadap para generasi muda tersebut sangat informatif. Bahwa para peserta yang mengikuti seminar tersebut diharapkan akan menyebarluaskan informasi yang diperolehnya dari kegiatan seminar. Sehingga, para peserta seminar akan menajdi kader pencegahan perkawinan dini di Indramayu serta menjadi contoh pemuda yang menghindari perkawinan dini.121

Perkawinan anak yang terjadi di Indramayu bagi hakim pengadilan Agama Indramayu, Moh. Suhadak, memang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. menurutnya, dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Indaramayu cukup tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingkat kesadaran hukum yang juga cukup tinggi. Kesadaran hukum masyarakat Indramayu juga menjadi hal yang disadari oleh para Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Indramayu. Hakim Pengadilan Agama Indramayu, Drs. H. Moh. Suhadak, M.H., menginformasikan bahwa persentase dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu adalah 90 persen, yang mana berarti masih terdapat potensi bahwa permohonan dispensasi nikah dapat ditolak, yakni sebesar 10 persen.122 Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal pokok yang menjadi alasan dapat diterima maupun ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah, yaitu:

1. Menghindari mudharat

Mudharat dapat diartikan sebagai sesuatu yang merugikan maupun membahayakan. Dalam konteks permohonan dispenasasi nikah, menghindari mudharat

121 Wawancara dengan Edi Fauzi, S.IP., 22 Agustus 2022.

122 Wawancara dengan Drs. Moh. Suhadak, M.H., 25 Agustus 2022.

yang dimaksud adalah menghindari hal-hal yang akan mendatangkan kerugian maupun membahayakan kedua calon mempelai apabila tidak segara dinikahkan. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan mudharat tersebut antara lain kondisi calon pengantin wanita yang sudah dalam keadaan hamil, apabila tidak segera dinikahkan maka tanggung jawab sang bapak terhadap janin yang sedang dalam kandungan tersebut akan sulit untuk dilegalkan. Selain itu, kondisi dimana sepasang calon pengantin yang masih dibawah umur tersebut sudah sangat dekat secara fisik, sehingga apabila dibiarkan tanpa ikatan perkawinan akan menjerumuskannya kepada perzinahan. Oleh karenanya, penghindaran terhadap mudharat menjadi urgensi untuk mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah.

1. Mendahulukan mafsadat

Mafsadat dapat dimaknai sebagai sesuatu yang menyakitkan. Terdapat tiga tolak ukur mafsadat, yaitu: *Pertama,* mafsadat yang dasarnya telah dikukuhkan oleh syara’, sehingga segala sesuatu yang sejenis dengannya dapat pula dipandang sebagai mafsadat. *Kedua,* mafsadat yang dibatalkan oleh syara’. *Ketiga,* mafsadat yang tidak dikukuhkan atau dibatalkan oleh syara’.

Selain mudharat dan mafsadat yang dipertimbangkan dalam pengajuan dispensasi nikah, juga perlu mempertimbangkan kemaslahatannya. Maslahat merupakan segala hal yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan dan kesukaran. Maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni:

1. Maslahat *al-dharuriyah,* yaitu perkara yang menjadi tegaknya manusia, yang apabila ditinggalkan maka kerusakan akan timbul. Maslahat ini terdapat unsur memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta.
2. Maslahat *al-hajiyah,* yaitu perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan.
3. Maslahat *al-tahsiniyah*, yaitu perkara penyempurnaan yang dikembalikan pada harga diri, kemuliaan, akhlak mulia, dan kebaikan adat istiadat.123

Maslahat menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengabulan dispensasi nikah, maslahat yang dimaksud dalam hal ini antara lain adalah sikap kedewasaan dan kemampuan secara fisik dan materi serta persiapan psikologis kedua calon mempelai yang telah matang dapat menjadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah serta kekal sebagaimana tujuan perkawinan menurut undang-undang. Oleh karenanya, persentase ditolaknya perkawinan dapat didasarkan pada ketidakhadiran pihak laki-laki dalam sidang permohonan dispensasi nikah. Hal tersebut menyebabkan keterangan dari pihak laki-laki tidak dapat didengar oleh hakim. Sehingga, hakim tidak dapat mengabulkan begitu saja. Sebab, dikhawatirkan kemaslahatan yang didambakan tidak dapat terwujud, dan justru malah menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Penolakan dispensasi nikah oleh Majelis Hakim juga dapat terjadi walaupun calon pengantin wanita sudah hamil di luar nikah. Namun, angka penolakan tersebut sangat kecil sekali mengingat situasi yang mendesak agar kedua calon pengantin dapat dinikahkan. Adapun yang menjadi alasan ditolaknya permohonan dispensasi nikah tersebut didasarkan pada nasihat hakim dalam persidangan. Apabila nasihat tersebut menghendaki agar tanggung jawabnya dikembalikan

123 Mukaromah, *Pertimbangan Maslahat-Mafsadat dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2004,* Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2007, h. 1.

pada kedua orang tua masing-masing pihak, maka permohonan dispensasi nikah tidak dapat dikabulkan.

Dalam hal pengajuan dispensasi nikah maka mengacu pada bunyi ayat pertama Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yakni mengenai batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Batas usia minimum tersebut kini menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Moh. Suhadak, 124 hal tersebut merupakan langkah yang sudah tepat. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa di Indramayu, tingkat kesadaran hukum masyarakat sudah cukup tinggi. Sehingga, masyarakat akan cenderung mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk dapat memperoleh pengakuan dari negara mengenai perkawinan yang dilakukan. Tolak ukur asumsi bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indramayu tinggi adalah dilihat dari permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut mencerminkan keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk dapat memperoleh pengakuan yang legal dari negara menganai perkawinan yang dilakukan, meskipun harus melalui proses yang sedemikian rupa.

Kendati merepresentasikan tingginya angka kesadaran hukum masyarakat Indramayu, perkawinan anak tetap memiliki dampak buruk yang tidak dapat ditepis. Diantaranya adalah banyaknya anak muda yang sudah memiliki anak dan harus bertanggung jawwab terhadap keluarga. Padahal, di usia yang masih muda, anak-anak seyogyanya memiliki masa dan kondisi lingkungan yang cukup untuk mendukung mereka dalam mengembangkan kepribadianya, sebagaimana amanah Undang-Undang Perlindungan Anak. Di samping itu, angka perceraian pun cenderung meningkat, yang mana

pelakunya masih relatif muda. Tingginya angka perceraian tersebut juga merupakan efek domino dari fenomene perkawinan anak yang masif.

Berbagai dampak negatif yang muncul menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak perlu dicegah agar angkanya dapat diminimalisir. Dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Moh. Suhadak, selaku Hakim di Pengadilan Agama Indramayu menyampaikan perlunya sebuah wadah untuk dapat membumikan nasihat dan pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini. Nasihat tersebut akan lebih efektif apabila disampaikan oleh orang yang memiliki wewenang terhadap sang anak, yakni orang tua dan pihak keluarga. Oleh karenanya, diperlukan juga sosialisasi kepada para orang tua mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh tokoh agama dan dinas terkait lainnya.125

Perkawinan anak di Kabupaten Indramayu bukanlah persoalan yang tabu. Peristiwa perkawinan anak sudah sering dilakukan di berbagai kecamatan di kabupaten Indramayu, termasuk kecamatan Cikedung. Terdapat 5 (lima) pelaku perkawinan anak yang Peneliti temui di Kecamatan Cikedung, yang mana datanya sudah dicocokkan dengan catatan di Kantor Urusan Agama (Kecamatan Cikedung). Beberapa pelaku perkawinan anak tersebut tidak keberatan jika identitasnya disebutkan, namun sebagian lainnya menghendaki agar identitasnya tidak dilampirkan.

Kelima narasumber yang merupakan pelaku perkawinan anak di Kabupaten Indramayu memiliki kisah masing-masing yang berbeda dengan lainnya. Namun secara umum, perkawinan yang terjadi didominasi berlatar belakang atas kehendak sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak orang tua atau keluarga. Beberapa narasumber menyatakan bahwa

perkawinan anak di Indramayu memang menjadi hal yang sudah lumrah dan banyak dilakukan. Sehingga, ketika para narasumber tersebut melakukan hal yang sama, tidak terbesit rasa keberatan atau merasa takut karena akan mendapat perlakuan yang berbeda dari sisi sosial.126

Salah satunya adalah Leli Kalista, seorang isteri yang perkawinannya dilakukan pada saat ia berusia 16 tahun. Kertika Peneliti meminta pendapatnya mengenai perkawinan anak, ia dengan gamblang menyampaikan bahwa hal tersebut bukan merupakan hal tabu yang perlu ditutup-tutupi. Bahkan, perkawinan yang dilakukannya dirasa tidak terlalu mengubah hidupnya. Sebab, perkawinan tersebut dilakukan atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada ganjalan seperti jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Justru ia lebih memilih menikah dari pada melanjutkan sekolah.

*“Pernikahan tersebut terjadi karena saya sudah lelah dipaksa terus untuk sekolah dan dikekang oleh orang tua, terutama ibu saya. Padahal, saya tidak sekolah pun saya baik-baik saja. Pernikahan tersebut terjadi Bulan Desember tahun 2020 lalu. Setelah saya menjalani hari- hari sebagai seorang istri, saya tidak terlalu keberatan karena suami saya tidak banyak menuntut. Bahkan pekerjaan rumah dilakuakn oleh pembantu, untuk urusan mencuci saya melaundry pada tetangga yang juga masih saudara. Pada saat saya menyadari saya hamil. Saya belum mengerti apa yang harus saya lakukan, mungkin kegiatan saya yang salah sehingga membuat saya keguguran. Saat ini saya masih ingin diberikan kepercayaan untuk memiliki anak lagi.”127*

Perkawinan anak yang dilakukan oleh Leli Kalista dan suaminya yang saat itu sudah cukup umur untuk menikah

126 Wawancara dengan Leli Kalista, 18 Agustus 2022.

127 Wawancara dengan Leli Kalista, 18 Agustus 2022.

ternyata menepis anggapan bahwa perkawinan anak terjadi karena faktor ekonomi yang rendah dari pihak keluarga. Sebab, Leli sendiri berasal dari keluarga yang perekonomiannya tergolong tinggi. Namun, dalam hal ini faktor pendidikan menjadi salah satu persoalan yang krusial. Sebab, pendidikan yang rendah menjadikan seseorang tidak memiliki arah pandang yang luas dalam memandang kehidupan. Sehingga, keinginan untuk menikah tersebut terjadi tanpa memiliki bekal ilmu yang cukup untuk berumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan pendapat orang tua Leli, yakni Warsih, yang menyatakan ketidaksetujuan atas perkawinan anak yang dilakukan oleh Leli. Warsih berpendapat bahwa perkawinan anak memberikan tekanan secara mental dan emosional. Merespon fenomena tersebut, Warsih sudah berusaha memberikan akses pendidikan yang baik dan cukup bagi Leli. Namun, visi yang Warsih tanamkan tidak sejalan dengan keinginan yang Leli miliki.

*“Saya sudah berusaha agar anak saya memiliki masa depan yang cemerlang dan tidak buru-buru menikah. Salah satunya dengan menyekolahkannya di salah satu pondok pesantren terbaik di Indramayu. Namun, baru satu hari setelah diantarkan, besoknya anak saya langsung memaksa minta pulang, dan hingga saat ini enggan melanjutkan pendidikannya. Padahal, keluarga kami terbilang cukup terpandang di Desa dan memiliki dana yang cukup untuk membiayai pendidikannya. Akhirnya ia menikah dengan laki-laki yang sudah berumur 20 tahunan lebih. Alhamdulillahnya lelaki tersebut berasal dari keluarga yang berkecukupan kendati ia sendiri belum mapan. Mungkin karena ia terlalu muda pada saat menikah, akhirnya ia keguguran pada saat mengandung anaknya yang pertama. Kini, hubungan saya dengannya*

*kerap cekcok karena ia sangat sulit dinasihati untuk beberapa hal.”128*

Hal yang disampaikan oleh Warsih menunjukkan bahwa salah satu dampak dari perkawinan anak yang dilakukan tanpa persiapan yang matang akan sangat berpengaruh bagi rumah tangganya di waktu mendatang. Bahkan, hal tersebut akan berpengaruh pada hubungan sosial antara pelaku perkawinan anak dengan lingkungan di sekitarnya tanpa disadari.

Selain Leli Kalista, Peneliti juga menyempatkan waktu untuk menggali informasi terhadap dua pasang orang tua dan pelaku perkawinan anak lainnya yang identitasnya tidak dapat disebutkan atas permintaan narasumber. Kedua pelaku perkawinan anak tersebut sama-sama melakukan perkawinan di usia yang masih cukup belia, yakni pada usia 16 dan 17 tahun. Hal yang membedakan kedua perkawinan tersebut selain usia, adalah latar belakang terjadinya perkawinan. Dimana salah satu pelaku perkawinan mengaku melakukan perkawinan di usia anak karena telah hamil di luar nikah, sedangkan satu lainnya melakukan perkawinan anak dengan tujuan agar tidak terjerumus kepada perzinahan.

Pelaku perkawinan anak (Ll /inisial) melakukan perkawinan baik pertama dan kedua secara sirri. Ll melakukan perkawinan pertama di usia 16 tahun merupakan warga desa Jambak yang mana calon suaminya saat itu juga merupakan laki-laki dari desa yang sama. Namun, umur calon mempelai laki-laki saat itu sudah lebih dari 19 tahun. Sehingga, tidak memerlukan izin dispensasi menikah dari Pengadilan Agama Indramayu. Namun, setelah melahirkan anak dari suaminya yang pertama, rumah tangga mereka akhirnya kandas pada saat sang isteri berusia 17 tahun. Akhirnya, pada tahun 2022 dimana usianya sudah menginjak

128 Wawancara dengan Warsih, 18 Agustus 2022.

18 tahun, ia menikah untuk kedua kalinya dengan lelaki yang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perkawinannya yang pertama sebetulnya tidak direstui oleh orang tua.

*“Anak perempuan saya menikah pada saat saat sekolah SMKnya belum tamat di usia 16 tahun, hal itu yang saya sesalkan. Padahal, saya sudah berusaha menyekolahkannya hingga ke jenjang SMK agar setelah lulus ia dapat segera bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Setelah anaknya lahir, selang beberapa bulan saya meminta mereka untuk bercerai, karena laki-laki tersebut tidak bisa diharapkan. Ia tidak bekerja dan lebih banyak bermalas-malsan. Akhirnya, cucu saya sering saya yang merwatnya, dan kini anak saya telah menikah lagi di usianya yang ke 18 tahun. Saya harap, saat ini ia lebih siap karena suaminya yang sekarang pun jauh lebih dewasa dan terbiasa bekerja.”129*

Penyesalan yang sama juga dirasakan oleh sang anak (Lsy/inisial) yang berusia 16 tahun terpaksa menikah muda karena telah hamil di luar nikah, padahal pada saat itu Ls masih duduk di bangku SMK sehingga terpaksa ia keluar dari sekolah. Baik orang tua maupun anak, sama-sama memiliki kehendak agar sang anak memiliki masa depan yang cemerlang. Namun, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah pergaulan bebas yang tidak sehat. Sehingga, anak harus menanggung resiko atas sesuatu yang telah dilakukannya. Perkawinan anak berpotensi merenggut masa depan anak. Sebab, ruang bagi sang anak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya menjadi

129 Wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan anak dari Desa Jambak, 18 Agustus 2022.

terhambat karena harus berjibaku dengan persoalan rumah tangga, termasuk merawat bayi yang telah dilahirkannya.

*“Hal yang saya rasakan setelah menikah yang pertama adalah kesedihan yang sangat dalam, karena kebodohan saya akhirnya saya terpaksa menggadaikan masa depan saya. Sebetulnya saat itu saya lebih baik memilih untuk menggugurkan kandungan saya, namun karena terlanjur diketahui keluarga, akhirnya saya malah dinikahkan. Saya merasa kehilangan masa depan, saya merasa iri dengan teman-teman saya yang masih bebasa kesana kemari merajut masa depan. Sedangkan saya mau tidak mau harus merawat anak saya, dan saat ini juga harus mengurusi suami kedua saya. Saya hanya berharap kedepannya saya selalu diberikan kekuatan, dan kalau diizinkan, saya masih ingin menggapai masa depan saya.”130*

Menjalani kehidupan rumah tangga untuk kedua kalinya di usia 18 tahun merupakan tantangan yang sangat sulit bagi salah satu warga Desa Jambak tersebut. Perkawinan seyogyanya dilakukan setelah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Narasumber lainnya yang juga melakukan perkawinan anak adalah salah satu warga Desa Amis yang menikah pada saat usianya 17 tahun. Perkawinan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri karena calon suaminya telah memiliki pekerjaan yang penghasilannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saat itu, ia dan suami terpaut usia 5 (lima) tahun. Dimana sang suami berusia 22 tahun sementara dirinya berusia 17 tahun. Ia berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukannya telah

130 Wawancara dengan Lsy, pelaku perkawinan anak dari Desa Jambak, 18

diiringi dengan persiapan yang matang secara fisik, mental, dan finansial.

*“Setelah pernikahan dilangsungkan, tidak lama saya dinyatakan hamil. Kini, saya menjalani hari-hari sebagai seorang isteri dan ibu untuk anak saya. kehidupan berumah tangga merupakan hal yang baru bagi saya, sehingga saya menjalaninya dengan penuh rasa antusias. Meski kadang saya merasa lelah dan ingin kembali pada masa lajang, namun dukungan dari keluarga dan juga suami kembali menguatkan saya. Kini saya berharap usaha dan pekerjaan suami saya selalu lancar dan semakin berkembang, sehingga saya tidak perlu mengkhawatirkan masa depan anak saya.”131*

Ketika orang tua dari pihak perempuan tersebut dimintai pendapat mengenai perkawinan anak, ia menyampaikan bahwa di Indramayu hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Ia pun tidak menyesalkan keputusan anaknya untuk menikah di usia dini. Sebab, calon suaminya telah memiliki bekal yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya.

*“Anak perempuan saya menikah pada saat setelah lulus SMA ketika usianya 17 tahun. Dia menikah melangkahi kakak laki-laki semata wayangnya yang telah lulus kuliah. Saya tidak memaksa maupun melarang, karena lelaki yang menikahinya pun lebih dewasa dan sudah terbilang mapan, ia telah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup untuk menafkahi anak saya. Harapan saya, kedepannay mereka dapat membina keluarga yang harmonis dan selalu dikaurniai rezeki yang berlimpah.”132*

131 Wawancara dengan pelaku perkawinan anak dari Desa Amis, 18 Agustus 2022.

132 Wawancara dengan orang tua pelaku perkawinan anak dari Desa Amis, 18

Fenomena tersebut menunjukan bahwa ekonomi menjadi salah satu faktor untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Oleh karenanya, kesiapan ekonomi dari kedua belah pihak menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk pengabulan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Ketiga pelaku perkawinan anak di atas telah melakukan prosedur dispensasi nikah sebagaimana mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dapat memperoleh pengakuan dari negara. Namun, terdapat 2 (dua) narasumber yang melakukan perkawinan di usia anak tetapi tidak melakukan prosedur dispensasi nikah. Kedua narasumber tersebut adalah Daryi yang menikah pada saat usia 17 tahun dan Suniah yang menikah pada saat usianya 15 tahun. Keduanya kini telah berusia di atas 35 tahun.

Daryi menikah pada saat usianya 17 tahun dengan seorang lelaki yang berbeda kabupaten dengannya. Pernikahan tersebut terjadi karena mereka telah saling mengenal dan sama-sama bekerja di sebuah pabrik. Ditambah lagi, Daryi yang saat itu berusia 17 tahun telah hamil di luar nikah dengan calon suaminya. Sehingga, perkawinan tersebut harus dilaksanakan, kendati saat itu calon suaminya masih berstatus sebagai suami perempuan lain. Rasem selaku Ibu dari Daryi menyampaikan bahwa kendati dirinya memaklumi fenomena perkawinan anak di Indramayu. Namun, ia ingin agar anak-anaknya memiliki masa depan yang baik dan tidak terburu-buru menikah. Akan tetapi, kondisinya yang ditinggal suami karena meninggal mengharuskan anaknya untuk membantu mencari nafkah untuk keluarga. Sehingga, pergaulan sang anak kurang dapat ia perhatikan karena jauh dari jangkauannya.

*“Saya rasa menikah di umur segitu (17 tahun) adalah hal yang wajar dan memang tidak ada batas usia minimum untuk dapat menikah. Karena setahu saya, kalau*

*perempuan sudah menstruasi, maka sudah wajar baginya untuk melangsungkan pernikahan. Upaya untuk menikahkan anak di usia dewasa sudah saya lakukan dengan berusaha menyekolahkan dia setinggi-tingginya di lingkungan yang lebih baik (perkotaan), apalagi saat ayahnya masih hidup. Namun, hanya sampai jenjang MTS, setelah itu ayahnya meninggal, sehingga kondisi perekonomian kami semakin sulit. Kemudian secara sukarela anak saya turun tangan membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di Pabrik Garmen di luar kota. Hingga setelah 2 tahun ia bertemu dengan lelaki pilihannya.”133*

Adanya peristiwa tersebut merupakan salah satu gambaran bahwa kondisi lingkungan terutama keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Orang tua memiliki kewajiban yang besar untuk memenuhi kebutuhan dan memperhatikan tumbuh kembang sang anak hingga menjemput impiannya. Daryi yang terlanjur memiliki hubungan dengan pria yang masih berstatus sebagai suami orang merupakan hal yang seyogyanya dapat dihindari. Dukungan serta pemenuhan kebutuhan yang baik dari lingkungan keluaga menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan emosional anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Namun, dalam hal ini, Daryi menyampaikan bahwa dirinya telah menerima peristiwa yang menimpanya.

Dampak nyata yang dialami oleh Daryi setelah perkawinan di usainya yang masih sangat muda berlangsung adalah ketidakharmonisan dalam keluarga besarnya. Apalagi saat itu sang ibu belum merestui perkawinannya dengan sang suami. Selain itu, ia juga dihadapkan pada masalah-masalah

133 Wawancara dengan Rasem, 20 Agustus 2022.

rumah tangga yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Ironisnya, berbagai persoalan tersebut muncul seiring dengan kondisinya yang sedang mengandung buah hati. Namun, saat ini dan seterusnya ia lebih memilih untuk memerhatikan tumbuh kembang sang anak agar memiliki masa depan yang gemilang dari pada meratapi masa lalu yang sudah terjadi.

*“Masa paling berat adalah ketika saya hamil tua dan kemudian melahirkan, saya tidak mendapat dukungan baik moril maupun materiil dari siapapun. Kesulitan demi kesulitan kami hadapi berdua. Namun, kini kami telah belajar banyak setelah perkawinan berlangsung selama 20 tahun.”134*

Perkawinan di usai muda karena terjadi kehamilan seaperti yang terjadi pada Daryi juga dialami oleh Suniah. Sebelum usianya menginjak 19 tahun, Suniah sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan laki-laki yang berbeda. Perkawinan pertamanya juga tidak direstui oleh sang ibu dikarenakan Rantis, ibu dari Suniah berpendapat bahwa calon suaminya tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi anak dan calon cucunya kelak. Namun, perkawinan tersebut tetap dilaksanakan oleh Suniah secara dibawah tangan karena ingin anak yang dikandungnya kelak ada yang menanggungjawabi.

*“Seteleh pernikahan pertama terajdi, orang tua saya tidak merestui, sehingga saya harus mengurus semuanya seorang diri, mulai dari sebelum pernikahan hingga menjalani masa-masa berkeluarga. Naasnya, saat itu suami saya yang pertama malah meninggalkan saya setelah saya melahirkan, padahal saat itu saya bertempat tinggal di desanya dan tidak mengenal siapa-siapa. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pulang ke rumah*

*orang tua, Alhamdulillahnya orang tua saya masih mau menerima saya, kemudiaan setelah anak saya berusia 2 tahun 3 bulanan, saya merasa harus membantu perekonomian keluarga, sehingga saya bertemu lagi dengan laki-laki yang sekarang menajdi suami saya.”135*

Suniah merasakan bahwa perkawinan di usia muda timabah menyandang status sebagai orang tua muda merupakan hal yang sangat berat. Perkawinan seyogyanya dilakukan pada saat kedua calon pengantin telah siap secara mental dan emosional. Bagi Suniah, memilih calon pasangan yang tepat merupakan salah satu langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan atmosfer rumah tangga yang harmonis.

Saat menikah di usia yang belum mencukupi persyaratan batas usia minimal untuk menikah, Suniah dan Daryi tidak melakukan prosedur dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut terjadi karena keduanya mengaku tidak mengetahui adanya prosedur tersebut sekaligus tidak memahami bagaimana mekanisme yang perlu dilakukan dalam rangka permohonan izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga, selama bertahun-tahun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara legal kepad Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, setelah kurang lebih sepuluh tahun, keduanya menyadari bahwa untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah dan mengurus surat-surat lainnya diperlukan adanya Buku Nikah. Sehingga, kedua pasang suami isteri tersebut melakukan prosedur isbath nikah ke Pengadilan Agama Indramayu.

“*Setelah menjalani perkawinan apalagi ketika anak saya semakin tumbuh dewasa, saya mulai sadar bahwa apapun yang dilakukan anak saya membutuhkan banyak surat- surat, seperti akta kelahiran untuk mendaftar sekolah, dan*

135 Wawancara dengan Suniah, 20 Agustus 2022.

*lain sebagainya, oleh karenanya, pada tahun 2010 saya melakukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama Indramayu dan dikabulkan.”*

Setelah menggali informasi dari Daryi dan Suniah, serta berbincang dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikedung Kabupaten Indaramayu. Peneliti menyimpulkan adanya beberapa alasan yang menyebabkan seseorang lebih memilih prosedur isbath nikah dari pada dispensasi nikah. Adapun alasan tersebut diantaranya, yaitu:

136

1. Keterbatasan biaya para Pemohon sehingga tidak mencatatkan Perkawinannya;
2. Kurangnya pemahaman para Pemohon tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan sehingga para Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah tangan;
3. Luputnya pemantauan Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Desa-Desa atau Kampung;
4. Masalah adat antara keluarga para Pemohon (mempelai wanita dan mempelai pria) sehingga para Pemohon tetap melangsungkan perkawinan di bawah tangan;
5. Sulitnya medan yang harus ditempuh para Pemohon untuk datang mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Urusan Agama.

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Indramayu lebih pada faktor budaya hukum masyarakat yang menjadikan prilaku perkawinan anak sebagai prilaku hukum yang dianggap sah-sah saja dilakukan, padahal sejatinya prilaku tersebut dalam beberapa kasus dilakukan dengan cara sirri

136 Wawancara dengan pelaku perkawinan anak, 20 Agustus 2022.

atau tidak dicatatkan karena tidak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

# BAB IV

# REKONSRUKSI HUKUM PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

# Perkawinan Anak: Antara Peran Negara, Konstruksi Pemahaman Agama dan Relasi Kuasa

Konstruksi hukum perkawinan anak di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tiga hal: pertama, peran negara; kedua, konstruksi pemahaman; dan Ketiga, relasi kuasa.

# Peran Negara

Peran Negara yang terkait dengan perkawinan anak terkonstruksi dalam tiga peran, yakni; a. peran pembentukan; b. peran penegakkan hukum; dan c. peran pembinaan hukum. Ketiga peran tersebut tercakup dalam tiga elemen system hukum sebagaimana pendapat Friedman yakni adanya hukum perkawinan anak (legal substante), para penegak hukum yang menegakkan aturan-aturan hukum (legal structure) dan budaya hukum yang tumbuh dimasyarakat (legal culture).137 Agak berbeda dengan Soerjono Soekanto,138 yang membagi system hukum dipengaruhi oleh lima hal penting, yaitu: *pertama*, materi hukum yakni undang-undang yang ada harus memuat ketentuan yang berpihak pada tegaknya hukum, *Kedua,* penegak hukum yang berkompeten dan berpihak pada tegaknya hukum; *Ketiga*, sarana dan prasarana, yakni seluruh peralatan, organisasi hukum, penganggaran dan sistem pendukung lainnya harus mendukung untuk terciptanya penegakan hukum; *Keempat*, masyarakat. yakni sikap, kemauan dan kesadaran hukum masyarakat sangat

137 Friedman and Hayden, *American Law An Introduction*, 126–127.

138 Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

mendukung tegaknya hukum; dan *Kelima,* budaya masyarakat. Kelima faktor tersebut saling terkait untuk menentukan efektifitas penegakan hukum menuju kesadaran hukum.

Peran Negara dalam konteks struktur hukum berarti bagaimana peran Negara dalam melakukan pembentukan hukum, menegakkan hukum dan membina hukum. Adapun peran culture hukum berarti bagaimana budaya hukum dibangun dan diimplementasikan dalam praktek-praktek hukum.

* + 1. Peran pembentukan hukum

peran negara dalam pembentukan hukum sesungguhnya mencerminkan peran struktur hukum dalam membentukan hukum perkawinan anak di Indonesia. Peran Negara. Peran pembentukan hukum Nampak bagaimana Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 diajukan dan diundangkan, demikian pula aturan- aturan turunan yang diberlakukan pada masing-masing daerah.

Dalam membentuk hukum yang mencegah perkawinan anak, Negara telah merubah ketentuan umur perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 7 Undang- Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah dalam ketentuan pasala 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian ketentuan peningkatan umur perkawinan tersebut dianggap menimbulkan permasalahan substansi hukum: pertama, adanya ketentuan dispensasi kawin membolehkan upaya hukum perkawinan bagi anak yang belum mencapai 19 tahun; Kedua, adanya ketentuan hukum itsbat nikah untuk mengabsahkan perkawinan yang telah dilakukan secara sirri atau tidak dicatatkan oleh KUA dan dianggap

sebagai alternative solusi bagi perkawinan anak yang ditolak permohonan dispensasinya atau ingin lebih cepat dan mudah untuk melangsungkan perkawinan; ketiga, tidak adanya ketentuan sanksi bagi keluarga ataupun pelaku perkawinan anak.

Pertama, adanya ketentuan hukum dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, menunjukkan bahwa ketentuan umur 19 tahun usia minimal perkawinan bukanlah hal mutlak, karena dalam pasal tersebut terdapat ketentuan diperbolehkannya para pihak atau orang tua calon mempelai melakukan upaya hukum pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama,139 bahkan mekanismenya diatur dalam Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Ketentuan hukum lain juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 Ayat 2 bahwa calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun disyaratkan untuk memperoleh izin sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 140. Pada gilirannya, dispensasi usia perkawinan semacam itu berimbas pada angka pernikahan anak-anak di Indonesia yang semakin tinggi 141. Dengan demikian Negara sebenarnya tidak secara tegas menentukan usia perkawinan dewasa di

139 Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Persfektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (2020): 50.

140 Fatum Abubakar, “Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* (2019): 98.

141 Sonny Dewi Judiasih et al., “Woman, Law and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia,” *Notariil: Jurnal Kenotariatan* (2018): 47.

Indonesia, karena Negara menawarkan hukum alternative bagi pelaku perkawinan anak sehingga seolah-olah melonggarkan ketentuan hukum batas minimal umur perkawinan.

Kedua, kebolehan itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan itsbat nikah salah satunya berlaku bagi perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau sering disebut nikah sirri dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta tidak terdapat larangan perkawinan, termasuk perkawinan sirri yang dilakukan oleh pengantin di bawah umur. Adapun syarat itsbat nikah adalah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat

1. huruf (e) “terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nimor 1 Tahun 1974” termasuk nikah sirri. Disamping itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 142. Bahkan nikah sirri bagi masyarakat tertentu diyakini sebagai perkawinan yang sah sekalipun sudah ada Undang- Undang Perkawinan di Indonesia 143. Selain itu itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dilakukan sesuai pedoman pengajuan perkara Itsbat nikah dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang buku Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

142 Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang- Undangan Di Indonesia,” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 139.

143 Al farabi, “BUDAYA ‘ KAWIN KYAI ’ Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon,” *Al- Ahwal,* IV, no. 01 (2011): 21.

Buku II edisi Revisi tahun 2013. Di samping itu pemerintah juga tidak membuat regulasi yang jelas tentang perkawinan sirri bahkan membiarkan perkawinan sirri seolah dianggap menjadi solusi perkawinan anak yang tidak dikabulkan permohonan dispensasinya. Dengan demikian kelonggaran aturan dan solusi hukum dalam mengatur perkawinan anak dengan itsbat nikah, merupakan salah satu yang mengakibatkan kurang tegasnya Pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak.

Ketiga, Tidak adanya aturan hukum yang memuat sanksi hukum bagi orang tua atau wali yang tidak melaksanakan kewajiban pendidikan atau pendampiangan hingga usia anak siap menikah. Demikian pula tidak ada ketentua hukum yang memberi sanksi bagi pelaku nikah sirri dan otang tua yang menikahkan anak bawah umur secara sirri sebagai upaya Negara dalam menekan angka perkawinan anak. Dengan demikian tidak adanya aturan sanksi dalam undang- undang atau turunannya merupakan salah satu alasan tidak adanya upaya tegas Pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak

sebenarnya permasalahan dalam substansi dari pembentukan hukum yang dibuat Negara tersebut, cukup tereliminir ketika melihat beberapa daerah yang telah berupaya membentuk perda-perda yang menunjang upaya meminimalisir perkawinan anak. Di jawa tengah misalnya telah disahkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Tentu Perda sebagai aturan turunan tersebut bertujuan sebagaimana undang-undang perkawinan, yakni agar perkawinan anak dapat diminimalisir. Namun dibandingkan dengan daerah lain, sebenarnya perda Nomor 4 tahun 2022 tersebut, cukup lambat. Gubernur

Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur misalnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 474.14/810/109.5/2021 tertanggal 18 Januari 2021 tentang Pencegahan Perkawinan anak yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota Se Jawa Timur.

Demikian pula di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak yang disahkan tanggal 10 Februari Tahun 2021. Dalam pasal 41 dijelaskan pada huruf e,f,g sebagai berikut : e. “pencegahan terjadinya perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;” f. “pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi Anak yang mengalami perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;” g. “advokasi penanganan perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak.”

Peraturan Daerah tersebut, bahkan sudah diturunkan dalam aturan turunan di beberapa kabupaten. Namun memang disayangkan karena masih banyak pimpinan daerah yang belum menyadari pentingnya perda tersebut. Misalnya Ketua DPRD Kabupaten Cilacap baru menyadari pentingnya aturan untuk meminimalisir perkawinan anak, justru setelah peneliti mewawancarai penelitian ini dan akan segera mengagendakan dibuatnya Perda turunan yang mengatur perlindungan anak, termasuk di dalamnya perkawinan anak.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, tentu apa yang dibuat oleh pemerintah di Jawa Tengah dan Jawa Barat kalah cepat. Gubernur Sulawesi Barat misalnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang ”Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak,” dan Tahun 2020 mengeluarkan

aturan tentang “Sistem Perlindungan Anak.” Respon cepat ini dilakukan karena pada tahun 2020, Provinsi Sulawesi Barat menduduki peringkat keempat tertinggi angka perkawinan anak di Indonesia. Bahkan sebagaimana penjelasan Sahari Bulan, kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Mamuju yang membuat Pokja Program Pencegahan Perkawinan Usia Anak (P3UA).144. Demikian pula di Jawa Barat, Gubernur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan perlindungan Anak.”

Demikian pula di Jawa Timur, yang menempati peringkat ketiga angka tertinggi perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2020, Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 474.14/810/109.5/2021 tertanggal 18 Januari 2021 tentang Pencegahan Perkawinan anak yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota Se Jawa Timur. Bahkan Pemerintah di Wilayah Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak (Dinas PPPA), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama (Dinas PPKB) dan Kantor Peradilan Agama menandatangani kerja sama dalam penanggulangan perkawinan anak pada tanggal 28 Juni 2021.

Permasalahannya adalah bagaimana hukum yang sudah dibentuk tersebut di lapangan diimplementasikan, ini menjadi PR bersama dari pada struktur hukum dalam menegakkan hukum yang terkait perkawinan anak.

144 Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju, “Spirit Pencegahan Nikah Dini Di Hari Anak Nasional Sulbar 2021,” 2021, [http://mamujukab.go.id/spirit-pencegahan-nikah-dini-di-han-sulbar-2021/.](http://mamujukab.go.id/spirit-pencegahan-nikah-dini-di-han-sulbar-2021/)

* + 1. Peran Penegakkan hukum

Peran Negara dalam melakukan penegakkan hukum yang terkait dengan perkawinan anak dilihat dari peran hakim, dalam mengeliminir perkawinan anak.

Peran hakim dalam penegakkan hukum perkawinan anak terlihat dalam penanganan permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama. Namun demikian dari beberapa data yang ada sebagaimana disajikan dalam bab III, nampaknya masih terdapat masalah dalam penetapan hakim. Hakim lebih mempertimbangkan asas kepastian hukum atau terpenuhinya syarat materil dan formil, serta kriteria darurat dalam pertimbangan hakim cenderung bersifat “subjektif,” sehingga dikabulkan tidaknya permohonan dispensasi perkawinan, tergantung perspektif hakim dalam memaknai teks dan konteks kasus yang ditangani.

Sebelum masa pandemic yakni tahun 2017, kasus dispensasi perkawinan di Indonesia berjumlah 11.819 kasus, meningkat pada tahun 2018 menjadi 12.504 kasus, meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 14.462 145. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang sangat pesat pada tahun 2020, setelah masa pandemic covid dan setelah dikeluarkannya revisi Undang-undang Perkawinan yang berkaitan dengan pasal 7 ayat (1) tentang usia calon mempelai perempuan dari batas minimal 16 tahun menjadi 19 tahun. Dari Bulan Januari hingga Juni 2020, permohonan dispensasi perkawinan berjumlah 34.413 dan sebanyak 33.664 (97.8 persen)

145 Ellyvon Pranita, “Peringkat Ke-2 Di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Kompas*, last modified 2021, https[://www.](http://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-)kom[pas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-](http://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-) di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all.

perkara dikabulkan oleh pengadilan 146. Pada tahun 2021, dari bulan Januari hingga Mei, Pengadilan Agama Semarang telah mengabulkan 92 permohonan dispensasi perkawinan dari 104 perkara yang diajukan.147

Permohonan dispensasi perkawinan tersebut, hampir semuanya dikabulkan jika sudah memenuhi syarat formil, yakni syarat administratif, dan syarat materiil yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan serta tidak adanya larangan perkawinan (*mawani’ al-nikah*). Adapun penolakan dilakukan jika syarat formil belum terpenuhi dan pihak Pengadilan Agama meminta kepada pihak yang mengajukan untuk melengkapi syarat formil yang belum terpenuhi. Hal ini sebagaimana dijelaskan Wahib, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, Munadi, Hakim pengadilan Agama Semarang dan Moh Suhadak, hakim Pengadilan Agama Indramayu.

Selain terpenuhinya syarat formil dan materil, Hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan bila dianggap memenuhi kriteria darurat sebagai syarat pengajuan permohonan dispensasi, yang cenderung “subjektif.” PA Semarang sebagaimana Penetapan Nomor../Pdt.P/2022/PA.Smg (Nomor perkara tidak dipublish sebagaimana permohonan PA Semarang), dimana anak pemohon seorang gadis dengan NIK 3374115708080004 yang masih berusia 13 tahun dan calon pengantin laki-laki dengan NIK 3374111604040001 yang berusia 17 tahun dikabulkan karena calon pengantian perempuan hamil.

146 Rasta Kurniawan Br et.al Pinem, “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak,” *Maslahah* 2, no. 3 (2021): 140,

[http://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Maslahah/article/view/174/230.](http://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Maslahah/article/view/174/230)

147 Radar Semarang, “Hingga Mei 2021 Sudah 104 Anak Di Semarang Ajukan Dispensasi Kawin.”

Permohonan dispensasi perkawinan di PA Searang tersebut, nampaknya sama jika dibandingkan dengan di PA Gorontalo, dimana permohonan dispensasi diajukan oleh calon pengantin perempuan sudah hamil terlebih dahulu dikabulkan jika sudah memenuhi syarat formil dan materiil.148 Hal yang sama juga terjadi di PA Demak.149

Namun penetapan tersebut berbeda dengan penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2017/Bjn yang menolak permohonan dispensasi yang diajukan Pemohon orang tua calon pengantin laki- laki yang berumur 17 tahun dan perempuannya berumur

19 tahun, padahal calon pengantin perempuan dalam keadaan hamil. Adapun penolakan dilakukan dengan alasan fisik dan pikiran anak pemohon sebagai calon pengantin laki-laki belum matang baik fisik maupun pikirannya.

Perbedaan penetapan juga terjadi dengan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 531/Pdt.P/2021/ PA. Pati tertanggal 10 September 2021. Hakim menolak permohonan Dispensasi perkawinan karena tidak ada unsur darurat yakni calon mempelai tidak hamil. Pada saat itu, calon mempelai perempuan pada 22 Desember 2022 berumur 18 Tahun 9 Bulan dan pihak calon pengantin laki-laki berumur 20 Tahun 5 Bulan dan tidak terdapat syarat yang menghalangi perkawinan. Berbeda dengan Penetapan Nomor../Pdt.P/2022/PA.Smg (Nomor perkara tidak dipublish sebagaimana permohonan PA

148 Sastro Mustapa Wantu et al., “Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo,” *Samarah* 5, no. 2 (2021): 780.

149 Nita Fatmawati, Yunanto, and Marjo, “DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan

Agama Demak) Nita,” *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1.

Semarang), dimana calon pengantin perempuan berusia 17 tahun 9 bulan dan calon pengantin laki-laki berusia 25 tahun 9 bulan, dikabulkan dengan alasan karena calon pengantin perempuan dan calon suaminya telah kuat keinginannya untuk menikah dan sering pergi berdua, maka untuk menghindari fitnah, hakim mengabulakan permohonan dispensasi dengan berpedoman pada kaidah “*jalb al-masâlih wa dar’u al-mafâsid”* (mencari kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan). Dengan demikian terdapat perbedaan dalam menentukan alasan darurat sebagai syarat dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan, sehingga sifatnya cenderung subjektif. Di samping itu pertimbangan hakim cenderung tidak mengembalikan permasalahan anak kepada kewajiban orang tua yang memiliki tanggung jawab pendidikan dan pendampingan terhadap anak-anaknya hingga dewasa.

* + 1. Peran Pembinaan Hukum

Peran pembinaan hukum dalapat dilihat dari upaya- upaya yang dilakukan oleh KUA, DP3AKB, BKKBN dan peran-peran seluruh elemen dalam melakukan pembinaan hukum baik dalam kegiatan sosialisasi ataupun peran pembentukan kesadaran hukum masyarakat, bahkan peran membangunan budaya hukum masyarakat dalam meminimalisir angka perkawinan anak.

Sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, program sosialisasi untuk meminimalisir angka perkawinan anak telah banyak dilakukan oleh masing-masing pemerintah dan dinas- dinas terkait, hal ini sebagaimana penjelasan Ardian dari DP3AKB bahwa di Jawa Tengah telah dilakukan oleh DP3AKB. NamunBKKBN sangat disayangkan,

sosialisasi yang terprogram dengan buku panduan, baru dimulai akhir tahun 2020 yakni sosialisasi buku saku “*Jo Kawin Bocah*” kepada remaja usia SMP dan SMA. Demikian pula diakui Ardian, sasaran sosialisasi belum menyeluruh dan sangat tergantung kader-kader di lapangan.

Begitu pula BKKBN Jawa Tengah, Iwan menjelaskan bahwa BKKBN telah melakukan sosialisasi bahaya perkawinan anak dalam program PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) dan Genre (Generasi berencana), namun program yang dijalankan belum ke tahap hasil (output) dan luaran (outcome) yang jelas. Hal sama dilakukan oleh lembaga yang mendapat bantuan dari Badan pembinaan Hukum Nasional (BPHN via Kemenkumham. Menurut Santi dari Kemenkumham, bahwa Kemenkumham hanya menganjurkan lembaga penerima bantuan untuk memilih tema penyuluhan hukum yang salah satunya bisa tentang tema problematika perkawinan anak.

Demikian pula KUA telah melakukan sosialisasi pentingnya perkawinan dewasa, namun sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor urusan Agama juga nampaknya kurang tepat sasaran. KUA melakukan sosialisasi dengan program “Kursus Calon pengantin (*Suscatin*)” kepada calon pengantin yang sudah mendaftar pekawinan ke KUA. Temanya juga tidak spesifik tentang bahaya perkawinan anak, namun lebih ke arah tema “keluarga sakinah”. Bahkan penyuluh KUA-pun ketika melakukan penyuluhan tidak pasti mengangkat tema terkait perkawinan anak, walaupun salah satunya bisa tentang tema perkawinan anak. Pihak KUA biasanya menjelaskan tentang umur perkawinan ketika calon pengantin datang ke KUA menanyakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Darun Khasanah, Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan Hasim Ashari, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.

Selain sosialisasi, peran pembinaan hukum yang dilakukan Pemerintah adalah monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah di lakukan, namun monitoring dan evalusi yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal dilakukan. Menurut Iwan Dwi Antoro, BKKBN Jawa Tengah, monitoring dan evaluasi secara nasional dilakukan pihak eksternasl seperti Bappenas dan juga NGO, namun pihak BKKBN hanya monitoring dan evaluasi program tahunan saja dan yang lebih ditekankan adalah terlaksananya program di lapangan. Demikian pula Kemenkumham misalnya ketika bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk melakukan bantuan hukum yang sifatnya non litigasi seperti “penyuluhan hukum,” Kemenkumham tidak menentukan monev terhadap tema hukum yang akan disosialisasikan, sehingga temanya tergantung pada tingkat pemahaman dan literasi pelaksana penyuluhan di lapangan. Disamping itu sebagaimana penjelasan Santi dari Kemenkumham bahwa monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sekali dalam setahun, tidak berbasis pada tindak lanjut hasil dan perbaikan tema-tema penyuluhan hukum, tetapi lebih pada terlaksananya program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosialisasi dan monitoring serta evaluasi lebih memfokuskan pada terlaksananya program dan belum sampai pada tataran hasil perubahan persepsi masyarakat ataupun kesadaran hukum masyarakat dan berbasis pada kinerja pembinaan hukum untuk meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia

Problem pembinaan hukum juga dapat dilihat dari sejauh mana anggaran yang menunjang kegiatan- kegiatan sosialisasi dilakukan pemerintah. Masing- masing daerah telah menganggarkan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi dan kegiatan-kegiatan pencegahan perkawinan anak, namun tidak secara khusus penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan meminimalisir angka perkawinan anak seperti sosialisasi bahaya dan dampak negatif perkawinan anak, melainkan diserahkan kepada masing-masing SKPD untuk menentukan kegiatannya. Hal tersebut sebagaimana penjelasan Richadl, anggota DPRD Jawa Tengah dan Zubaedah, anggota DPRD Kabupaten Brebes, bahwa DPRD tidak secara khusus menganggarkan dana untuk sosialisasi tentang tema-tema terkait perkawinan anak kepada usia remaja, karena jenis program dan implementasinya diserahkan kepada dinas-dinas terkait.

# Pemahaman Agama

Pemahaman agama seseorang memiliki peran dalam praktek perkawinan anak. Bahkan pemahaman menjadikan dasar dalam melakukan perbuatan hukum yang iddasari kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum masyakat merupakan salah satu yang membentuk kebiasaan berprilaku atau dapat disebut budaya hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan Jimly bahwa kultur hukum atau budaya hukum masyarakat, dibuat dalam dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang dalam kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang salah satu bentuknya dapat berupa hukum adat (*the people’s law*).150

150 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*

(Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 4.

Prilaku masyarakat dalam perkawinan anak yang dipengaruhi pemahaman agama Nampak dalam dua hal: pertama, dalam masyarakat pedesaan misalnya budaya hukum Islam tentang umur perkawinan yang dibatasi oleh konsep akil balig; kedua, Masih maraknya pemahaman keabsahan perkawinan agama atau sering juga disebut perkawinan sirri walaupun tidak tepat terminologinya, sehingga pemahaman tersebut masih menjadi budaya hukum terutama pada masyarakat pedesaan; Ketiga, budaya gadget yang memicu pengetahuan sexs bebas dan lebih lanjut prilaku sex bebas sehingga banyaknya kasus hamil di luar nikah yang menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan banyak diajukan ke Pengadilan Agama.

Pertama, mengakarnya hukum Islam yang membatasi umur perkawinan dengan aqil baligh terjadi karena sebelum diberlakukan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan yang digunakan di Indonesia adalah hukum agama dan hukum adat. Dalam hukum Islam sendiri usia perkawinan diperbolehkan selagi calon mempelai sudah akil balig yang ditandai oleh haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.151 Hal ini kebanyakan terjadi pada masyarakat pedesaan sebagaimana dijelaskan Hasim Ashari, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Menurutnya masih banyaknya perkawinan anak di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, sebagai Kabupaten dengan angka usia tertinggi di Jawa Tengah, adalah karena masih mengakarnya budaya dan pemahaman hukum Islam yang mereka

151 Siskawati Thaib, “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Lex Privatum* (2017): 48.

terima dari Pendidikan agama yang diajarkan dalam kitab-kitab fiqh dan menjadi pemahaman dan budaya yang turun temurun.

Kedua, Budaya perkawinan sirri, ini terjadi di beberapa daerah seperti seperti di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.152 Budaya yang sama juga terjadi pada Kasus Li, perempuan warga Desa Jambak Indramayu yang menikah sirri pada umur 16 tahun, bercerai pada usia 17 tahun dan menikah kedua pada umur 18 tahun pada tahun 2022. Dengan demikian perkawinan anak karena pemahaman akil balig sebagai batasan dewasa dan syarat perkawinan serta budaya hukum nikah sirri yang terjadi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan cerminan bagaimana pemahaman agama sangat berpengaruh dalam terjadinya perkawinan anak. Hal tersebut sekaligus menjadi problem yang harus dirubah. Perubahan tentu harus dengan memberikan pemahaman-pemahaman agama yang lebih tepat dan menunjang pemahaman pentingnya perkawinan dilakukan ketika seseorang sudah dewasa, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental, social dan ekonomi. Demikian pula budaya nikah sirri menjadi masalah karena pemahaman keabsahan perkawinan masih dipengaruhi pemahaman agama yang normative, tanpa pemahaman agama yang lebih komprehensif yang mendukung tertibnya masyarakat dalam sebuah negara, yakni pencatatan perkawinan.

Ketiga, Budaya gadget. Faktor lain adalah budaya gadget yang dipegang anak sekolah terutama pada pandemic, dimana anak sekolah dapat dengan bebas mengakses informasi dan tontonan sex bebas.

152 Al farabi, “BUDAYA ‘ KAWIN KYAI ’ Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.”

Pengetahuan tersebut memicu prilaku sex bebas dan pergaulan bebas, sehingga mereka hamil di luar nikah. Menurut Arif Mustaqim, Hakim pengadilan Agama Kabupaten Brebes.153 Beberapa kasus meningkatnya angka perkawinan anak di Kabupaten Brebes disebabkan karena budaya gadget yang memcu prilaku sex bebas. Hal uama juga diungkapkan Taufik, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, bahwa sex bebas dipengaruhi oleh budaya gadget yang menyebabkan maraknya anak bawah umur hamil di luar nikah.

Oleh karenanya Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA) bersama Bapennas dan Unicef “menyadari” perlunya upaya rekayasa sosial dengan menjadikan kesadaran budaya untuk menangani tingginya prevalensi angka perkawinan anak di berbagai wilayah. Dalam siaran persnya kementerian PPPA tanggal 16 Februari 2022 menjelaskan bahwa “merupakan tuntutan yang harus dilakukan segera dan tidak bisa ditunda lagi, dengan menanamkan pola pikir baru, yaitu membangun semangat, inisiatif dan kreativitas berkarya kepada anak perempuan dan orangtuanya sebagai bekal hidup sebelum menikah.”154

# Relasi Kuasa

Relasi kuasa dalam perkawinan anak seringkali terjadi. Penyebabnya dapat diklasifikasikan kepada dua hal; pertama, relasi kuasa yang disebabkan karena

153 Mustaqim, “Perkawinan Usia Dini.”

154 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Https://Www.Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Page/Read/29/3001/Cegah- Perkawinan-Anak-Lakukan-Rekayasa-Budaya-Segera.”

kekuasaan ekonomi; dan kedua, reasi kuasa social; dan ketiga kuasa Agama.

Beberapa praktek perkawinan anak yang terjadi karena masalah ekonomi terjadi sebagaimana dijelaskan Hasim Ashari, kepala KUA tanjung bahwa seringkali orng tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena adanya keterbatasan ekonomi. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua calon mempelai perempuan yang menikahkan anak perempuannya sekapun di bawah umur karena motivasi ekonomi. Orang tua beranggapan bahwa beban perekomian keluarga akan berkurang jika anaknya perempuan menikah, apalagi jika menikahnya dengan laki-laki yang ekonominya mapan.

Kedua, relasi kuasa dalam perkawinan anak juga disebabkan oleh kuasa sosial. Pada Kasus Li warga Jambak Indramayu yang menikah secara siri di usia 16 tahun, yang menikah dengan calon suaminya yang berumur 19 tahun, nampaknya memiliki kekuasaan memaksa orang tuanya, sekalipun orang tuanya tidak menyetujui perkawinannya. Walaupun akhirnya terjadi perceraian dan Ll melakukan perkawinan kedua pada saat umurnya 17 tahun setelah memiliki 1 orang anak. Perceraian tersebut terjadi dikarenakan perkawinannya yang pertama sebetulnya tidak direstui oleh orang tua. Hal ini menadakan adanya relasi kuasa yang juga menyebabkan perkawinan Ll tidak langgeng dan kemudian pada tahun 2022 di saat usianya sudah menginjak 18 tahun, ia menikah untuk kedua kalinya dengan lelaki yang berbeda.

Ketiga, kekuasaan agama dengan dalih daripada melanggar aturan agama, seringkali menjadi alasan orang tua menyetujui anaknya segera ditunagkan walaupun anaknya yang masih di bawah umur. Pada kasus Siti yang berumur 16 tahun dan suaminya Hafis

yang berumur 15 tahun, di Cilacap misalnya, kekuasaan atas nama agama akhirnya menyebabkan orang tua melaksanakan pertunangan anaknya dengan cepat, dan akhirnya karena mereka sudah bertunangan, mereka semakin dekat dan melakukan hubungan layaknya suami istri hingga akhirnya mereka menikah di bawah umur.

Kekuasan dalam perkawinan anak yang terjadi baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat disebabkan oleh adanya pengetahuan dan konteks social, budaya dan agama yang melingkupinya. Hal tersebut sebagaimana pendapat Foucoult, bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Dalam bahasan lain Foucoult mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah episteme, yakni pengetahuan yang dihasilkan oleh adanya otoritatif atau pengetahuan yang dimantapkan oleh situasi tertentu pada masa tertentu. Kekuasaan sebagai episteme bersifat dinamis sangat tergantung pada relitas yang selalu berkembang155

# Implikasi Hukum

Implikasi praktek perkawinan anak yang dibentuk oleh adanya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum tersebut, melahirkan permasalahan-permasalahan hukum baik permasalahan substantif, struktur hukum maupun kultur hukum.

# Implikasi substansi hukum

Permasalahan substansi hukum perkawinan anak sebagaimana dijelaskan pada sub A, dapat diklasifikasikan pada permasalahan substansi hukum yang terkait dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan anak,

155 Foucoult, *Discipline & Punish*; Bilquis and Hidayat, “Kekuasaan Dan Pengetahuan: Diskursus Mitos Maskulinitas Pada Seksualitas Pemuda.”

yaitu ketentuan hukum tentang kebolehan mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana pasal 7 ayat (2- 4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan aturan turunannya yakni adanya Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, yang bertujuan untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, (yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Pertanyaannya, apakah penetapan-penetapan dikabulkan tidaknya permohonan dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut. Penulis melihat subjektifitas yang ada baik dalam kasus yang menerima ataupun yang menolak permohonan dispensasi padahal calon mempelai perempuan sedang hamil. Apakah ketika mengabulkan betul-betul mempertimbangkan tujuan kesetaraan gender, melindungi hak anak dan meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak. Akan hal ini tentu harus ada penelitian lebih lanjut. Namun demikian, hemat penulis penting adanya standarisasi atau panduan tentang kategorisasi dari poin-poin dalam tujuan petunjuk teknis permohonan

dispensasi, sekalipun memang hakim diberi kewenangan berijtihad berdasarkan rasa keadilan yang dimilikinya.

Permasalahan berikutnya adalah belum adanya sanksi bagi orang yang melakukan pemaksaan perkawinan anak. Hal ini memacu meningkatnya angka perkawinan anak. Ketentuan pidana dalam Rancangan undang-undang pidana dalam rumah tangga (RUU PKDRT) semestinya segera disahkan, karena instrument hukum tersebut dibutuhkan untuk menunjang tegaknya hukum di satu sisi dan upaya menekan angka perkawinan anak di sisi lain. Pentingnya upaya preventif penting dilakukan agar prilaku perkawinan anak tidak meningkat atau bahkan bias dieliminir dan menjadi budaya pernikahan dewasa.

Permasalahan lain dari sisi substansi hukum adalah lain adalah, adanya kebijakan-kebijakan yang tidak menyeluruh dari hulu ke hilir, dari kebijakan di tingkat provinsi hingga tingkat desa kelurahan. Di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah walaupun perdanya cukup terlambat disahkan, namun secara preventif sangat menunjang untuk menekan angka perkawinan anak, walaupun implementasinya masih terus dikawal agar efektif dilaksanakan. Perda-perda tersebut mestinya ditindaklanjuti oleh peraturan turunan di masing- masing kabupaten kota, bahkan hingga kelurahan.

# Implikasi struktur Hukum

Peran para penegak hukum dalam mengeluarkan produk kebijakan dan produk hukum sangat menentukan berhasil tidaknya upaya menekan angka perkawinan anak. Beberapa upaya yang dianggap memiliki implikasi penting dalam penegakkan hukum. Sepefahaman hakim dalam memahami tujuan-tujuan dikabulkan tidaknya permohonan dispensasi menjadi PR Bersama bagi para hakim. Hal tersebut penting agar penafsiran dan

implementasinya tidak terlalu jumping dengen tetap memperhatikan tujuan penegakkan hukum.

Begitu pula program-program yang dilaksanakan baik oleh Kementerian Agama dalam hal ini para penyuluh dan KUA, BKKBN, Dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pejabat di tingkat kelurahan seperti modin, semuanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, namun demikian data menunjukkan bahwa program kerja belum focus output (hasil) dan Outcome (luaran) dari program yang dilakukan. Kondisi demikian berimplikasi pada tidak diketahuinya angka penurunan dengan cepat, sehingga upaya perbaikan dari monev tidak secara cepat dalam dilakukan.

# Implikasi Kultur Hukum

Permasalahan budaya hukum adalah permasalahan sangat penting yang menentukan berjalan tidaknya suatu hukum. Hal tersebut sebagaimana penjelasan Johni Najwan.156 Demikian pula pendapat Friedman, bahwa aspek sosiologis merupakan aspek yang menentukan terwujudnya sistem perundang-undangan. Posisi budaya hukum menurut Friedman merupakan hal yang lebih penting untuk menegakkan hukum yang adil dibanding struktur hukum dan substansi hukum. Apabila budaya hukum buruk, maka subtansi hukum juga akan buruk, begitu pula bila budaya hukum buruk maka akan menciptakan struktur hukum yang buruk. Namun

156 Najwan, “Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1,” 26.

demikian ketiganya sama-sama penting untuk menegakkan sistem pembangunan hukum.157

Terkait dengan hukum perkawinan anak yang masih marak di lapangan, bahkan meningkat pada masa pandemi, menandakan bahwa perkawinan anak merupakan budaya yang masih melekat pada masyarakat Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, sebagai daerah dengan perkawinan anak tertinggi ketiga dan kesembilan di Indonesia.

Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, budaya perkawinan anak marak terjadi di daerah-daerah pedesaan, daerah yang kental dengan pemahaman agama dan adat yang membolehkan perkawinan sebelum berumur 19 tahun, karena baik adat maupun agama membatasi kedewasaan sebagaimana teks-teks agama dan adat para leluhurnya, yakni kedewasaan secara fisik yang ditandai oleh haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Hal ini sebagaimana penjelasan Hasim Ashari, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Brebes. Hal tersebut karena unsur sebagaimana konsep Tylor budaya sebagaimana penjelasan Tylor terdiri dari unsur pengetahuan, seni, kepercayaan, moral, adat istiadat, hukum, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan- kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai warga masyarakat.158

Hal tersebut menandakan bahwa budaya perkawinan anak sesungguhnya merepresentasikan pengetahuan, nilai, norma, moralitas dan kepercayaan mereka tentang perkawinan dan usia kematangannya.

157 Anajeng Esri Edhi Mahanani, Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, Vol 22 Nomor 1 Juli 2019, 6.

158 Parwata and dkk, *Memahami Hukum Dan Kebudayaan*, 9.

Namun demikian budaya tersebut berimplikasi secara negatif terutama secara social karena budaya perkawinan anak melahirkan generasi yang lemah, demikian juga kesehatan mereka terkendala, bahkan di beberapa daerah perkawinan anak melahirkan stunting. Anak tidak sehat karena pertumbuhannya terhalang disebabkan asupan gizi dan pengetahuan orang tua akan gizi tidak baik.159

# Rekonstruksi Sistem Hukum Perkawinan Anak

Adanya implikasi negative dari sistem hukum perkawinan anak menyebabkan tidak berhasilnya proses penurunan angka perkawinan anak, terutama pada masa pandemic baik di Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Problematika sistem hukum tersebut membutuhkan upaya- upaya hukum yang tepat agar permasalahan yang ditimbulkan sebagai implikasi system hukum yang ada dapat diperbaiki dengan tepat.

Bahkan implikasi lebih jauh yang ditimbulkan adalah problem efektifitas hukum, sebagaimana pendapat Soekanto bahwa efektifitas hukum dapat berjalan manakala komponen hukum berjalan dengan baik, demikian pula Friedman bahwa efektifitas hukum berjalan dengan baik manakala ketiga indicator hukum baik substansi, struktur dan kultur hukum berjalan dengan baik. 160

Ketidakefektifan substansi Nampak dalam Undang- undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 pada ayat (1) yang

159 Christiyaningsih, “Menteri PPPA: Pernikahan Dini Sebabkan Terjadinya Stunting Pada Anak” (Republika, n.d.), https[://www.](http://www.republika.co.id/berita/r8w7w2459/menteri-pppa-pernikahan-)rep[ublika.co.id/berita/r8w7w2459/menteri-pppa-pernikahan-](http://www.republika.co.id/berita/r8w7w2459/menteri-pppa-pernikahan-) dini-sebabkan-terjadinya-stunting-pada-anak.

160 Friedman and Hayden, *American Law An Introduction*, 126–127; Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

menjelaskan tentang umur minimal kawin bagi laki-laki dan perempuan, namun pada ayat (2) membolehkan pengajuan dispensasi perkawinan bagi usia di bawah umur yang memiliki alasan darurat untuk menikah di bawah 19 tahun. Disamping itu pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam membolehkan itsbat nikah (penetapan nikah) dengan syarat “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan,” memberi peluang diajukannya isbath nikah bagi perkawinan sirri atau nikah yang tidak dicatatkan oleh pengantin yang menikah di bawah umur. Kondisi substansi hukum yang demikian seolah memberi kelonggaran hukum yang menunjang perkawinan anak di Indonesia. belum lagi hukum agama yang hidup di masyarakat membolehkan perkawinan dengan syarat akil baligh, dengan cara nikah sirri ataupun nikah yang dianggap sah menurut agama. Demikian pula, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasal Seksul (UU TPKS) yang mempidanakan pelaku yang menikahi anak bawah umur juga belum disahkan. Padahal di Negara Turki misalnya, memberi sanksi pidana dalam hukum privat, seperti sanksi pidana bagi pelaku poligami.161

Kedua, kurang efektifnya sistem hukum pada tataran struktur hukum menuntut adanya rekonstruksi konsep peran para pemangku negara dalam pembentukan hukum, penegankan hukum dan pembinaan hukum yang belum sepenuhnya melaksanakan upaya-upaya minimalisasir perkawinan anak. Beberapa upaya rekonstruksi yang penting dilakukan diantaranya; 1) Pihak legislative dan eksekutif perlu merumuskan dan mengesahkan undang- undang TPKS yang mempidanakan atau memberikan sanksi

161 M Zaki, “Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern” 14, no. 2 (2014): 307.

terhadap pelaku yang menikahi anak; 2) membuat Batasan konseptual dari tujuan-tujuan yang menjadi dasar dikabulkan tidaknya permohonan dispensasi dalam Perma nomor 5 tahun 2019; 3) perlunya penganggaran secara khusus untuk program sosialisasi terkait perkawinan anak dan problematikanya; 3) kebijakan program yang dilakukan baik oleh pihak BKKBN, DP3AK/ DP3AKB, Kemenkumham, pihak KUA perlu berbasis pada hasil dan luaran yang mengarah pada terciptanya penyadaran dan pemahaman hukum masyarakat tentang umur perkawinan ideal; dan 4) pentingnya rumusan konseptual alasan darurat dalam mengabulkan tidaknya permohonan dispensasi terutama alasan hamil sebagai alasan darurat yang menyebabkan permohonan dispensasi.

Ketiga, rekonstruksi budaya hukum sangat penting dilakukan karena budaya perkawinan anak dan perkawinan bawah tangan bagi anak dapat bergeser menjadi budaya perkawinan usia dewasa. Hal penting yang perlu direkonstruksi adalah pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang umur ideal perkawinan. Rekayasa social juga penting dilakukan dengan upaya-upaya ke arah penyadaran hukum dan membentuk kultur hukum yang mensupport budaya hukum perkawinan ideal. Hal ini karena budaya hukum masyarakat merupakan upaya penting agar hukum berjalan efektif.162 Hal penting yang harus dilakukan Negara adalah mengupayakan hukum sebagai budaya hukum yang hidup di masyarakat.163 Menciptakan budaya hukum harus dilakukan oleh semua pihak, masing-masing lembaga Negara dan masyarakat, semuanya memegang peranan penting (*role occupant*) dalam melaksanakan aturan hukum. Aturan hukum, sanksi-sanksi, kekuatan sosial,

162 Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

163 Friedman and Hayden, *American Law An Introduction*, 127.

ideologi dan politik juga sangat mendukung terciptanya budaya hukum perkawinan usia dewasa. Semuanya harus berorientasi pada tujuan hukum 164. Dengan demikian ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut berperan dalam menghilangkan problem perkawinan anak di Indonesia.

164 Leslie L. Rood and Robert B. Seidman, “The State, Law and Development,” *ASA Review of Books* (1980).

# BAB V PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

* 1. Negara berperan penting dalam keberhasilan meminimalisir angka perkawinan anak ataupun naiknya angka perkawinan anak. Peran penting negeri terwujud dalam peran pembentukan hukum, penegakkan hukum dan pembinaan hukum. Peran-peran tersebut merupakan perwujudan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Dalam pembentukan hukum perkawinan anak, negara telah hadir mengesahkan produk hukum untuk meminimalis angka perkawinan anak, yaitu dengan menaikkan umur perkawinan anak dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019. Namun dalam pasal yang sama yakni pasal 7 ayat (2-4) menjelaskan ketentuan dibolehkannya pengajuan dispensasi kawin dengan alasan darurat. Bahkan petunjuk operasionalnya ditetapkan dalam Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Di samping itu substansi hukum juga belum memuat aturan preventif pencegahan perkawinan anak dengan mempidanakan sesorang yang memaksa terjadinya perkawinan anak.

Begitu pula dalam penegakkan hukum perkawinan terkait anak, Hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin, bukan melakukan

pencegahan perkawinan sebagaimana pasal 60 KHI bahwa terhadap calon pengantin yang belum cukup umur dapat dilakukan upaya pencegahan perkawinan. Di sisi lain alasan diajukan permohonan dispensasi adalah karena calon mempelai telah hamil di luar nikah sehingga hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasinya. Selain peran pembentukan dan penegakkan juga terdapat peran pembinaan hukum yang dilakukan melakui sosialisasi dan penganggaran.

Namun demikian, peningkatan kasus perkawinan anak bukan hanya karena substansi dan struktur hukum tetapi juga dipengaruhi kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Oleh karenanya budaya hukum masyarakat menjadi salah satu penentu maraknya perkawinan anak baik disebabkan pemahaman agama, tradisi nikah sirri dan pengaruh budaya teknologi yang mempengaruhi tradisi pergaulan bebas anak sekolah yang hingga menyebabkan maraknya hamil di luar nikah sebagai dasar hukum pengajuan permohonan dispensasi kawin.

* 1. Implikasi konstruksi hukum perkawinan anak yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat menimbulkan adanya permasalahan baik dari sisi substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Permasalahan tersebut menjadikan hukum perkawinan tidak efektif terutama kinerja hukum sebagai “ *law as social engineering*”.
  2. Oleh karenanya penting dilakukan rekonstruksi baik dari sisi substansi hukum, struktur dan kultur hukum. Substansi hukum yang harus segera dilakukan adalah merumuskan konsep operasionalnya dalam Perma nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, dengan tujuan adanya Batasan konsep yang terdapat dalam poin-poin Perma

tersebut. Demikian pula penting disahkan segera aturan yang memberikan sanksi pagi seseorang yang memaksa adanya perkawinan anak, sebagaimana terdapat dana RUU PKS atau dalam aturan lain.

Rekonstruksi struktur hukum juga penting juga dilakukan dilakukan agar hakim memiliki persamaan persepsi tentang tentang tujuan dispensasi sebagaimana Perma Nomor 5 tahun 2019 dan konsep darurat yang merujuk pada kaidah *dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al masalih.* Demikian pula pemangku kebijakan lain agar program lebih berbasis pada hasil dan luarannya terutama pemahaman yang dihasilkan sosialisasi terkait perkawinan anak.

Adapun rekonstruksi budaya hukum harus selalu dilakukan dengan merubah paradigma perkawinan anak menjadi perkawinan ideal dan menjadikannya sebagai kesadaran hukum dan selanjutnya budaya hukum.

# Saran

* 1. Untuk pemerintah harus melakukan evaluasi program dan menindaklanjuti dengan uapaya-upaya maksimal baik upaya terstruktur maupun tidak terstruktur bekerja sama dengan masyarakat dari semua elemen.
  2. Untuk hakim harus mempertimbangkan tujuan dari dispensasi sebagaimana Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan menyeluruh, bukan secara parsial baik mempertimbangkan tujuan kesetaraan gender, kepentingan dan hak anak serta tanggung jawab orang tua.
  3. Untuk masyarakat, harus menerima pengetahuan terkait perkawinan anak dengan sadar dan penuh tanggung jawab, sehingga pengetahuan berkembang menjadi kesadaran hukum dan selanjutnya budaya hukum.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika pressindo, 1992.

Abubakar, Fatum. “Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* (2019).

Admin. “Ini Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Pernikahan Dini Di Kota Semarang,” n.d. https://semarangkota.go.id/p/2309/ini\_upaya\_dp3a\_tekan\_ angka\_kasus\_pernikahan\_dini\_di\_semarang.

Ahsanul Halik. “Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram.” *Schemata* 6, no. 2 (2017).

Al-Ansari, Syaikh al-Islam Abu Yahya Zakariya. *Fath Al- Wahhab Bi Syarh Minhaj Al-Tullab Juz II*. Semarang: Toha Putra, n.d.

Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā Bin Muḥammad. *Al- Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘Ah*. Arab Saudi: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Al-Ẓuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.

Damsyiq: Dar al-Fikr, 2010.

Aliwijaya, Agung. “Kesiapan Reproduksi Wanita Bagi Yang Ingin Menikah Muda.” *Skata*, 2018.

https://skata.info/article/detail/190/kesiapan-reproduksi- wanita-bagi-yang-ingin-menikah-muda.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. 11th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

———. “Penegakkan Hukum,” n.d. <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_H>

ukum.pdf.

Bilquis, Larossa, and Nurul Hidayat. “Kekuasaan Dan Pengetahuan: Diskursus Mitos Maskulinitas Pada Seksualitas Pemuda.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* (2020).

Burdansyah, Cecep. “Kasus Pernikahan Anak Di Jateng Melonjak 630 Persen.” *Https://Www.Tribunnews.Com/Regional/2021/06/15/*, 2021.

https:/[/www.tribunnews.com/regional/2021/06/15/kasus](http://www.tribunnews.com/regional/2021/06/15/kasus-)- pernikahan-anak-di-jateng-melonjak-630-persen.

Christiyaningsih. “Menteri PPPA: Pernikahan Dini Sebabkan Terjadinya Stunting Pada Anak.” Republika, n.d. https:/[/www.republika.c](http://www.republika.co.id/berita/r8w7w2459/menteri-)o[.id/berita/r8w7w2459/menteri-](http://www.republika.co.id/berita/r8w7w2459/menteri-) pppa-pernikahan-dini-sebabkan-terjadinya-stunting-pada- anak.

Creswell, John W. *Research Desaign Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Ed. Ke 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

CST. Kansil. *Pengertian Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Denzin, Norman K. and, and Yvonna S. Lincoln. *HandBook of Qualitative Research*. London: Sage Publications, 1994.

Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju. “Spirit Pencegahan Nikah Dini Di Hari Anak Nasional Sulbar 2021,” 2021. <http://mamujukab.go.id/spirit-pencegahan-> nikah-dini-di-han-sulbar-2021/.

Djamilah, and Reni Kartikawati. “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.” *JURNAL STUDI PEMUDA* Vol. 3, no. No. 1 (2014).

Dwi Hadya Jayani. *Dispensasi Perkawinan Anak Meningkat 3 Kali Lipat Pada 2020*, 2020.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dis pensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada- 2020.

Faisal, Sanapiah. *Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Al farabi. “BUDAYA ‘ KAWIN KYAI ’ Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.” *Al-Ahwal,* IV, no. 01 (2011): 21–56.

Fatmawati, Nita, Yunanto, and Marjo. “DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL

DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak) Nita.” *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1–16.

Foucoult, Michael. *Discipline & Punish*. *British Journal for the Philosophy of Science*, 1995.

Friedman, Lawrence M., and Grant M. Hayden. *American Law An Introduction*. Third Edit. New York: Oxford University Press, 2017.

Gubernur Jawa Tengah. “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,” 2022.

1. Ahsanul Halik. “PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram.” *Schemata Volume 6or 2, Desember 2017* 6, no. 2 (2017).

Hadi, Abdul. *Fiqh Munakaha*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Hadikusumah, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hanafi, Yusuf. “Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra. Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam.” *Istinbáth* Vol. 15, N, no. Desember (2016).

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. 1st ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. 19th ed. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.

J. Satrio. *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almiah*. Cet 2. Jakarta: Grasindo, 1998.

John, Mary E. *Child Marriage in An International Frame*. New York: Routledge, 2021.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, and Deviana Yuanitasari. “Woman, Law and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia.” *Notariil: Jurnal Kenotariatan* (2018).

Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. “Dispensasi Nikah Dalam Persfektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* (2020).

Kebung, Konrad. *Membaca Kuasa “Michel Foucault Dalam Kontek Kekuasaan Di Indonesia, Dalam Melintas, STFK Ledarero Moumere Indonesia*. STFK Ledarero Moumere Indonesia, n.d.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Https://Www.Kemenpppa.Go.Id/Index.Php/Page/Read/2 9/3001/Cegah-Perkawinan-Anak-Lakukan-Rekayasa- Budaya-Segera.”

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).” Last modified 2016.

https:/[/www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/s](http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/98dff-)l[ider/98dff-](http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/98dff-) pedoman-patbm.pdf .

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di

Indonesia.” *Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan* 22, no. 1 (2019).

MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, and Pilto. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Moh. Fauzi, Dkk. *Sikap Organisasi Keagamaan Terhadap Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi,*. Semarang: Lawwana, 2021.

Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Jurnal pemikiran dan penelitian Sosial Keagamaan Yudisia* 7, no. 2 (2016).

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.

Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*.

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mustaqim, Arif. “Perkawinan Usia Dini.” Brebes: Pengadilan Agama Brebes, 2020. Last modified 2020. https://www.pa- brebes.go.id/en/publikasi/berita-peradilan/291- perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif-mustaqim-mh.

Najwan, Johni. “Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum 1.” *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No, no. 1 (2013): 1–16.

Natsif, Fadli Andi. “Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 175–186.

Niapele, Jakobus A. Raharajan dan Sarifa. “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis (Public Policy).” *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis (Public Policy)* 2, no. 1 (2021).

Nur Sahrizal et.al. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta, 2020.

Oe, Meita Djohan. “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan

Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 137–147.

Pande, Ishita. *Sex, Law, and the Politics of Age*. *Sex, Law, and the Politics of Age*. Cambrigde: Cambridge University Press, 2020.

Parwata, Anak Agung Gede Oka, and dkk. *Memahami Hukum Dan Kebudayaan*. Denpasar Bali: Pustaka Ekspresi, 2016.

Pinem, Rasta Kurniawan Br et.al. “Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak.” *Maslahah* 2, no. 3 (2021): 138–150. <http://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Maslahah/article/> view/174/230.

Pranita, Ellyvon. “Peringkat Ke-2 Di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia.” *Kompas*. Last modified 2021.

https:/[/www.kompas.com/sains/re](http://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/1903001)a[d/2021/05/20/1903001](http://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/1903001) 23/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan- anak-di-indonesia?page=all.

Purwaka, Tommy Hendra. “Beberapa Pendekatan Untuk Memahami Hukum (Several Approaches for Understanding the Law).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (November 2015): 536.

Radar Semarang. “Hingga Mei 2021 Sudah 104 Anak Di Semarang Ajukan Dispensasi Kawin.” Last modified 2021. Accessed March 2, 2022.

https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang

/2021/06/16/hingga-mei-2021-sudah-104-anak-di- semarang-ajukan-dispensasi-kawin/.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, n.d.

Rood, Leslie L., and Robert B. Seidman. “The State, Law and

Development.” *ASA Review of Books* (1980).

Saleh, K. Wajik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

SD.Judiasih, and Bambang Daru Nugroho Susilowati S. Dajaan. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawindengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–222.

Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Statistik, badan Pusat. “10 Provinsi Dengan Perkawinan Wanita Di Usia 7-15 Tahun Tertinggi (2020),” 2021. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10- provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini- tertinggi-pada-2020.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.

Thaib, Siskawati. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* (2017).

Thaib, Zamakhsyari bin Hasballah. *Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Al-Qur’an Dan Hadits*, 2017. <http://repository.dharmawangsa.ac.id/486/1/Pemahaman>

Tekstual dan Kontekstual.pdf.

Wantu, Sastro Mustapa, Irwan Abdullah, Yowan Tamu, and Intan Permata Sari. “Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo.” *Samarah* 5, no. 2 (2021): 780–803.

Wijayanti, Dwi. “Pendidikan Yang Memanusiakan Manusia (Konsep Karakter Warga Negara Ideal Ki Hadjar Dewantara).” In *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-II: Penguatan Kajian Isu-Isu Aktual Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Dan Non Pendidikan*, 8. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, 2017.

https://journal.ustjogja.ac.id/pendidikan-yang- memanusiakan-manusia-konsep-karakter-warga-negara- ideal-ki-hadjar-dewantara/.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*.

Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.

Zaki, M. “Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern” 14, no. 2 (2014): 307–334.

Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017).

Zulkhairil, Azzis. “Selama 2020 Ada 9.821 Perkawinan Anak Di Jawa Barat.” *Jabar.Idntimes.Com*, n.d. https://jabar.idntimes.com/news/jabar/azzis- zilkhairil/selama-2020-ada-9821-perkawinan-anak-di- jawa-barat.

*Perkawinan-Usia-Dini-Masih-Tinggi @ Lokadata.Id*, n.d. “United Nations General Assembly Resolution 2018 XX 1-11-

1965,” 2018.

“United Nations International Children’s Emergency Fun,” 2005.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN